

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
DI PUSAT



BADAN PUSAT STATISTIK

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN ANGGARAN 2015
DI PUSAT**

No. Publikasi : -
Katalog BPS : -
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : $x + 136$ halaman

Naskah:

Bagian Penyusunan Rencana

Gambar Kulit:

Bagian Penyusunan Rencana

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik RI

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program Kementerian/Lembaga (K/L), lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Untuk selanjutnya Renja-KL dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pagu anggaran.

Rencana Kerja Badan Pusat Statistik (Renja-BPS) disusun menurut program dan kegiatan yang merupakan tupoksi BPS serta berdasarkan skala prioritas selama setahun. Kegiatan BPS disusun berdasarkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja Eselon 2 di BPS Pusat dan Rencana Kerja Fisik (RKF)¹ dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten-Kota. Dalam rangka penyusunan Rancangan Renja-BPS Tahun 2015 serta untuk mempermudah bagian/bidang/sub direktorat dalam menyusun RKA, maka diperlukan Buku Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2015.

Dengan disusunnya buku pedoman ini, RKA yang diusulkan diharapkan

¹ RKF akan dijelaskan dengan buku pedoman tersendiri

menjadi efektif, efisien, dan rasional berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, terukur, dan dilandasi dasar hitung yang jelas, sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Jakarta, November 2013

Sekretaris Utama BPS



Drs. Eri Hastoto, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN BPS.....	5
BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS	11
A. Tahapan Penyusunan RKA-BPS	11
B. Jadwal Penyusunan RKA-BPS 2015	15
C. Pola Penyusunan RKA	18
D. Penyusunan RKA Tahun 2015	25
E. Cara Pengajuan RKA.....	34
BAB IV BAGAN AKUN STANDAR (BAS)	35
A. Klasifikasi Akun Standar	35
B. Jenis Belanja yang Lazim Digunakan untuk Penyusunan RKA di BPS	36
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Program dan Kegiatan Rutin BPS Tahun Anggaran 2015.....	8
Tabel 2. Jadwal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	18
Tabel 3. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kota dan <i>Full Board</i>	26
Tabel 4. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Dalam Kota dan <i>Full Board</i>	27
Tabel 5. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan <i>Full day/Half day</i> di dalam kantor	27
Tabel 6. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan <i>Full day/Half day</i> di luar kantor	28
Tabel 7. Menghitung Biaya Perjalanan Dinas	29
Tabel 8. Menghitung Biaya Rapat di Kantor di Luar Jam Kerja	29
Tabel 9. Menghitung Biaya Pelatihan	31
Tabel 10. Menghitung Biaya Pengiriman Innas Mengajar	32
Tabel 11. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota	32
Tabel 12. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan	33
Tabel 13. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Umum Perkiraan Biaya Per Satuan Berdasarkan HSPK BPS dan Standar Biaya Tahun 2014 Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015	55
Lampiran 2. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015	90
Lampiran 3. Perkiraan Satuan Biaya Uang Harian dan Satuan Biaya Penginapan.....	91
Lampiran 4. Perkiraan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor	92
Lampiran 5. Perkiraan Satuan Biaya Uang Saku Paket Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.....	93
Lampiran 6. Perkiraan Rate Transpor di Daerah Tahun Anggaran 2015	94
Lampiran 7. Perkiraan Rate Uang Saku dan Akomodasi Konsumsi Pelatihan Petugas Tahun Anggaran 2015	95
Lampiran 8. Perkiraan Biaya Pengiriman Dokumen	96
Lampiran 9. Perkiraan Satuan Biaya Konsumsi Rapat.....	97
Lampiran 10. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)	98
Lampiran 11. Perkiraan Satuan Biaya Sewa Gedung, Biaya Keperluan Perkantoran, dan Biaya Penggantian/Pembelian Inventaris Tahun Anggaran 2015	99
Lampiran 12. Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015	100
Lampiran 13. Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2015.....	101
Lampiran 14. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda Empat Operasional Pejabat Tahun Anggaran 2015.....	102

Lampiran 15. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional Pejabat Tahun Anggaran 2015	103
Lampiran 16. Perkiraan Penggantian Inventaris Lama, Biaya Jasa Kebersihan, Satpam dan Pengemudi Tahun Anggaran 2015.....	104
Lampiran 17. Perkiraan Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2015.....	105
Lampiran 18. Contoh TOR Tahun 2015.....	113
Lampiran 19. Contoh RAB Tahun 2015.....	122
Lampiran 20. Pendukung RAB Alokasi Sampel Survei Kinerja	125
Lampiran 21. Supervisi	126
Lampiran 22. Pemanggilan Calon Innas.....	127
Lampiran 23. Pengiriman Innas Mengajar ke Daerah.....	128
Lampiran 24. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota	129
Lampiran 25. Pelatihan Survei Kinerja.....	130
Lampiran 26. Pengiriman Dokumen dan Publikasi Survei Kinerja ke Daerah	131
Lampiran 27. Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan	132
Lampiran 28. Personil.....	133
Lampiran 29. Perkiraan Kebutuhan Anggaran	133
Lampiran 30. Petunjuk Operasional Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013.....	134
Lampiran 31. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program PPIS, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program PSPA BPS Pusat, Dan Program P2A2 BPS	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pada era informasi saat ini, kebutuhan data statistik baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun konsumen data lainnya semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan informasi statistik, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien perlu dilakukan usaha-usaha koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melibatkan semua unsur, baik sumber data, pelaksana kegiatan statistik, maupun pengguna data. Mengingat keterbatasan di berbagai bidang, pengumpulan data statistik diprioritaskan pada jenis data statistik yang diperlukan secara berkesinambungan, memiliki manfaat yang luas, serta mendukung pencapaian program-program prioritas pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu perencanaan kegiatan dan pembiayaan yang efisien dan terpadu.

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada: 1. Pendekatan Anggaran Terpadu (*Unified Budget*); 2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*); dan 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Di samping menerapkan tiga pendekatan, dalam

anggaran belanja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar yaitu : 1. Klasifikasi Fungsi; 2. Klasifikasi Organisasi; dan 3. Klasifikasi Ekonomi atau Jenis Belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran yang dikenal sebagai RKA-K/L dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Perubahan mendasar akibat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara adalah restrukturisasi program dan kegiatan K/L. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan digunakan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/L 2010-2014, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. Berdasarkan Renstra BPS Tahun 2010-2014, BPS mempunyai satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan tiga program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS.

Sejalan dengan itu penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, sistem penganggaran mengalami beberapa perubahan mulai tahun 2011, meliputi:

1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan program sesuai hasil restrukturisasi; dan
2. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut program, kegiatan dan *output*.

Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan dan proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan

lebih berkualitas. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka pedoman penyusunan RKA juga mengalami perubahan dalam penyajiannya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Surat Dirjen perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013;
7. Peraturan Kepala BPS No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2014.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai panduan bagi bagian/bidang/subdirektorat di BPS dalam menyusun RKA 2015 yang dibiayai melalui APBN, baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan mendasar sebagai akibat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara adalah restrukturisasi program dan kegiatan K/L, dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja. Pada Renstra 2009-2014, setiap program dirancang secara spesifik untuk dilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi Eselon I, kemudian setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon II/satker di lingkungan Eselon I.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

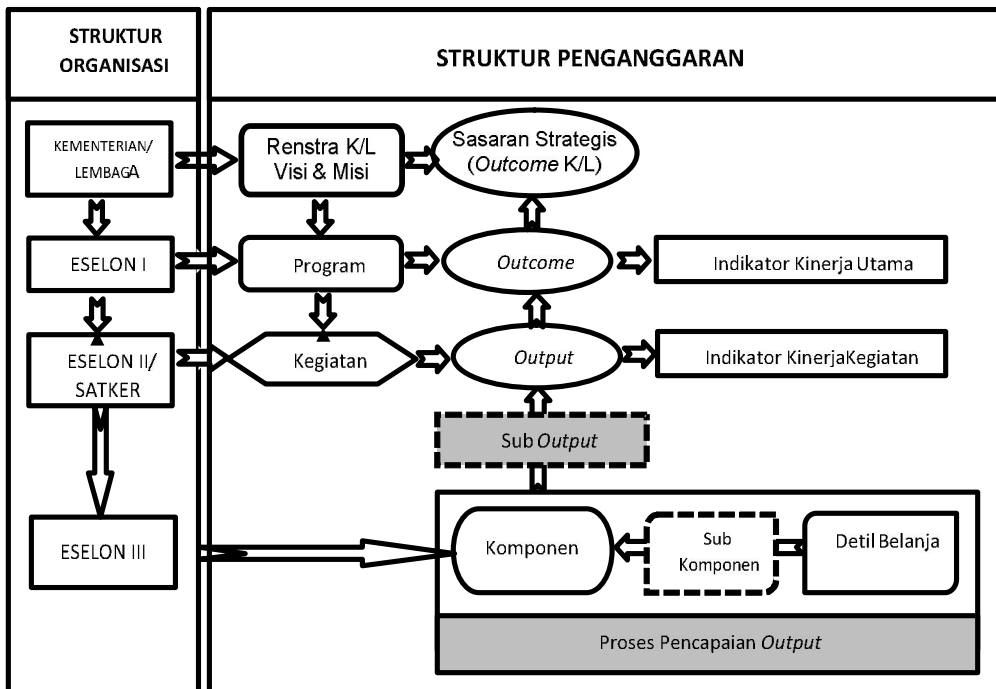
1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan atau mencapai tingkat kinerja tertentu (*output and outcome oriented*);
2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*);
3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the managers manages*).

Secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara target kinerja kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan besaran alokasi pendanaan anggaran yang akan dikelola K/L sesuai

tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L).

Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai merupakan kerangka PBK digambarkan seperti diagram di bawah ini:

Diagram 1. Hubungan antara Struktur Organisasi dan Struktur Penganggaran



Keterangan :

Penjelasan Diagram:

No.	Struktur Organisasi	Struktur Penganggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kementerian/ Lembaga	Visi	• Visi BPS dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui landasan pemikiran yang proaktif
		Misi	• Misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.
		Sasaran Strategis	• <i>Sasaran strategis</i> adalah sasaran yang didefinisikan secara luas yang harus dicapai agar sebuah strategi berhasil
2.	Eselon I	Program	• Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur

No.	Struktur Organisasi	Struktur Penganggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Hasil (<i>Outcome</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya <i>output</i> dari Kegiatan dalam satu Program Kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 1) Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi dan tugas-fungsinya; 2) Mendukung Sasaran Strategis K/L; dan 3) Dapat dilakukan evaluasi.
		Indikator Kinerja Utama Program	<ul style="list-style-type: none"> IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat Program. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasi pada kuantitas dan kualitas.
3.	Eselon II	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.
		<i>Output</i> /Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <i>Output</i> merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Kriteria dari <i>output</i> adalah : 1) Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan; Bersifat spesifik dan terukur; Setiap Kegiatan bisa menghasilkan <i>output</i> lebih dari satu jenis; Setiap <i>Output</i> didukung oleh komponen masukan dalam implementasinya;
		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :	<ul style="list-style-type: none"> IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga.
		<i>Suboutput</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Suboutput</i> pada hakekatnya merupakan output <i>Suboutput</i> sifatnya optional
4.	Eselon III	Komponen	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada <i>suboutput</i>
		Sub komponen	<ul style="list-style-type: none"> Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detail belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).
		Detail Belanja	<ul style="list-style-type: none"> Detail Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja.

Contoh hubungan struktur organisasi dan struktur penganggaran yang tercermin dalam POK dapat dilihat pada lampiran 30 halaman 131-132.

Sebagai hasil dari Restrukturisasi Program dan Kegiatan K/L, BPS mempunyai satu program teknis yaitu Program PPIS dan tiga program generik yaitu Program DMPTTL BPS, Program PSPA BPS dan Program PPAA BPS.

Dari keempat program tersebut terdapat 29 kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon II/satker di BPS RI. Untuk Program PPIS memiliki 16 kegiatan, Program DMPTTL BPS memiliki 8 kegiatan, Program PSPA BPS memiliki 2 kegiatan dan Program PPAA BPS memiliki 3 kegiatan. Setiap kegiatan dibangun oleh komponen-komponen yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Eselon III.

Secara rinci program dan kegiatan BPS saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Program dan Kegiatan Rutin BPS Tahun Anggaran 2015

No	Program Teknis/Generik	Kode Kegiatan	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan (Eselon II)
I	Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik	2895	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	BPS Propinsi
		2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	Direktur Analisis Pengembangan Statistik
		2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Direktur Diseminasi Informasi Statistik
		2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	Direktur Statistik Neraca Pengeluaran
		2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	Direktur Statistik Neraca Produksi
		2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
		2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Direktur Sistem Informasi Statistik
		2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	Direktur Statistik Distribusi
		2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	Direktur Statistik Harga
		2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	Direktur Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
		2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
		2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
		2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Direktur Statistik Ketahanan Sosial
		2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

No	Program Teknis/Generik	Kode Kegiatan	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan (Eselon II)
		2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
		2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Direktur Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
II	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	Biro Bina Program
		2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	Biro Humas dan Hukum
		2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Biro Kepegawaian
		2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	Biro Keuangan
		2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	Biro Umum
		2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	BPS Propinsi
		2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Pusdiklat
		2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	STIS
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	2890	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	Biro Umum
		2891	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	BPS Propinsi
IV	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BPS	2892	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	Inspektorat Wilayah I
		2893	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Inspektorat Wilayah II
		2894	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Inspektorat Wilayah III

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

A. Tahapan Penyusunan RKA-BPS

RKA yang disusun oleh setiap subdirektorat/bagian/bidang/fungsional dan RKF yang diusulkan oleh BPS (Pusat)/Provinsi/Kabupaten-Kota merupakan bahan untuk menyusun Rencana Kerja-BPS yang kemudian dijabarkan ke dalam RKA-BPS sampai akhirnya menjadi DIPA.

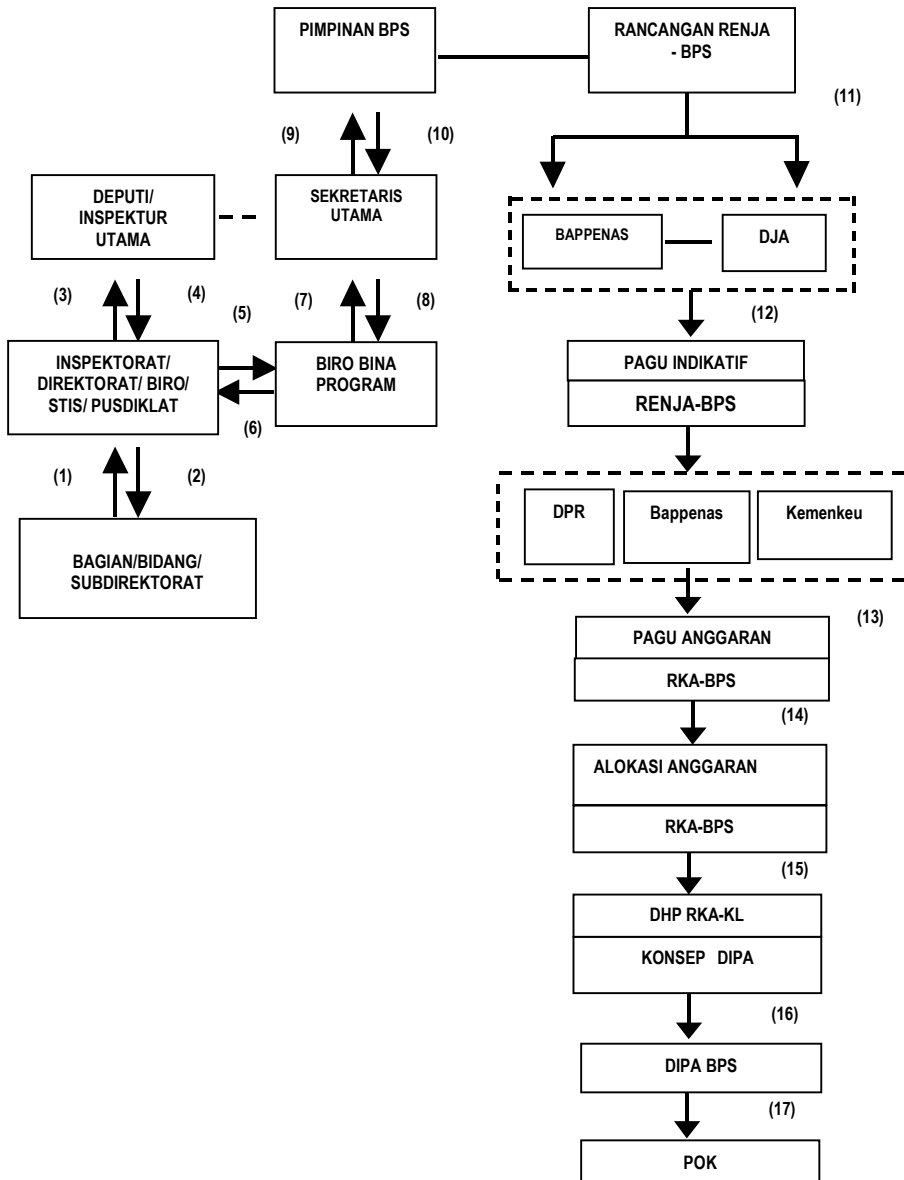
Tahapan penyusunannya dimulai dari penyusunan RKA di tingkat subdirektorat/ bagian/bidang/fungsional yang selanjutnya diajukan kepada Direktur/Kepala Biro/ Inspektur/Kepala Pusat dan yang setingkat untuk menentukan urgensi dan skala prioritas dan dikompilasi menjadi satu RKA (Satu TOR dan satu RAB). Penyusunan RKA ini agar dikoordinasikan pada tingkat Sestama/Irtama/Deputi untuk dievaluasi guna menghindari duplikasi rencana, dan pengabaian rencana yang dinilai penting. Setelah disetujui oleh Sestama/Irtama/Deputi, RKA dikirim ke Biro Bina Program ditujukan ke Bagian Penyusunan Rencana untuk dikompilasi, dievaluasi dan disusun sebagai *Draft* Rancangan Rencana Kerja-BPS ².

Rancangan Renja-BPS yang telah mendapat persetujuan Pimpinan BPS selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan, Bappenas dan DPR untuk mendapat persetujuan baik dari segi teknis maupun perkiraan pembiayaannya, dan seterusnya sehingga diperoleh DIPA BPS.

Secara rinci proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :

²⁾ Proses penyusunan RKA dilakukan secara *on-line* dengan memanfaatkan Program aplikasi SIREKA

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPS TAHUN ANGGARAN 2015



Keterangan Bagan :

- (1) Setiap Subdirektorat/Bagian/Bidang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah disusun dalam RENSTRA dan *MASTER PLAN* BPS kepada Direktur/Biro/Pusat/Inspektur. RKA yang telah disusun selanjutnya dibahas internal di Direktorat/Biro/Pusat/Inspektur untuk dikompilasi menjadi RKA Direktorat/Biro/Pusat/Inspektur dan ditentukan urgensi dan skala prioritas.
- (2), (4), (6) RKA yang telah dibahas di direktorat/biro/pusat disusun kembali/
- (8) & (10) disempurnakan oleh subdirektorat/bagian/bidang yang bersangkutan.
- (3) RKA dikoordinasikan kepada Sestama/Irtama/Deputi untuk dievaluasi guna menghindari duplikasi kegiatan dan pengabaian kegiatan yang dinilai penting.
- (5) RKA yang sudah final (sebagai hasil dari pembahasan dan evaluasi oleh Sestama/Irtama/Deputi) dikirim ke Biro Bina Program u.p. Bagian Penyusunan Rencana. Biro Bina Program akan mengkompilasi dan mengevaluasi usulan RKA sebagai Rancangan Renja-BPS.
- (7) & (9) Biro Bina Program mengajukan *Draft* Rancangan Renja-BPS kepada Pimpinan BPS melalui Sekretariat Utama untuk mendapatkan persetujuan menjadi Rancangan Renja-BPS.
- (11) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPS, Rancangan Renja-BPS selanjutnya diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembahasan.
- (12) Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan pagu indikatif yaitu ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada K/L sebagai pedoman

dalam penyusunan Renja-KL, dengan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan. Biro Bina Program akan menyusun Rancangan Renja-BPS menjadi Renja-BPS berdasarkan pagu indikatif yang diterima. Proses Penyusunan Renja-BPS dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan (*Trilateral Meeting*).

- (13) BPS menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Renja K/L, dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKP. Pemerintah menetapkan RKP dan menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN. Berdasarkan Renja-BPS dan besaran Pagu Indikatif, Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Anggaran yaitu batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada seluruh K/L dalam rangka penyusunan RKA-KL, dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Biro Bina Program akan menyesuaikan RKA-KL-BPS berdasarkan Pagu Anggaran yang diterima sesuai format dan sistem aplikasi dari DJA, Kementerian Keuangan.

- (14) RKA-BPS akan dibahas oleh BPS bersama-sama dengan komisi terkait dan Banggar (Badan Anggaran) di DPR. RKA-BPS hasil pembahasan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Menteri Negara PPN/Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan untuk ditelaah dan dihimpun menjadi Himpunan RKA-KL sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan dokumen pendukung RAPBN. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet untuk kemudian hasilnya disampaikan oleh Pemerintah

kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada K/L untuk dilakukan penyesuaian RKA-KL.

- (15) Penyesuaian RKA-KL tersebut menjadi dasar penyusunan Daftar Hasil Penelaahan (DHP RKA-KL) yang ditetapkan oleh DJA atas nama Menteri Keuangan. DHP RKA-KL menjadi dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), yang menjadi dasar bagi BPS untuk menyusun konsep DIPA.
- (16) Konsep DIPA tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk disahkan sebagai DIPA BPS. DIPA Induk BPS diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala BPS.
- (17) DIPA petikan BPS disampaikan ke setiap satuan kerja/satker (BPS Pusat, BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota). Setelah DIPA petikan diterima, masing-masing Satker menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

B. Jadwal Penyusunan RKA-BPS 2015

Mengingat sangat terbatasnya waktu penyusunan Renja BPS dan padatnya beban kerja pada setiap *subject matter* maka jadwal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagai berikut :

1. 21 November – 20 Desember 2013: - Penyusunan RKA dan pembahasan *internal* biro/direktorat/pusat/STIS dan pengajuan RKA ke Biro Bina Program.

2. 20 Desember 2013–11 Januari 2014 : - Evaluasi dan penyusunan RKA menjadi Rancangan Renja-BPS.
3. Januari - Februari 2014 : - Pembahasan awal Rancangan RKP dan Renja-BPS dengan Bappenas.
4. Maret 2014 : - Menerima Pagu Indikatif dan Rancangan awal RKP berdasarkan SEB Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
5. Maret – April 2014 : - Penyusunan Renja-BPS berdasarkan pagu indikatif melalui Proses *Trilateral Meeting* (Pembahasan Renja-BPS dengan Bappenas dan DJA).
6. Mei 2014 : - Menyerahkan Renja-BPS kepada Bappenas dan DJA).
7. Juni 2014 : - Menerima Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan.
- Penyusunan RKA-BPS berdasarkan Renja-BPS dan pagu anggaran.
8. Juli 2014 : - Pembahasan RKA-BPS dengan DPR.
9. Agustus 2014 : - Penelaahan RKA-BPS oleh Inspektorat dalam rangka penetapan Pagu RKA-KL yang bersifat final.
- Sidang kabinet pembahasan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.
10. September – Mg.III Oktober 2014 : - Pembahasan Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara pemerintah dengan DPR.
11. Mg. IV Oktober – Mg.I November : -Penyusunan/finalisasi RKA-BPS oleh BPS (termasuk review oleh Inspektorat) dan penyampaian kepada

- Menteri Keuangan c.q. DJA
12. Mg.IV Oktober – Mg. II November : -Penelaahan RKA-BPS antara BPS, DJA, dan Bappenas
13. November 2014 : - Penyesuaian RKA BPS berdasarkan optimalisasi pagu anggaran.
- DJA menetapkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-KL).
- Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
14. Mg. I Desember 2014 : - Penyusunan Konsep DIPA.
15. Mg.II Desember 2014 : - DIPA BPS diterima dari DJA dan DIPA BPS diserahkan ke setiap Satker (BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota).
16. Mg.III-IV Desember 2014 : - Penyelesaian administrasi DIPA dan POK.

Tabel 2. Jadwal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

No	KEGIATAN	Jadwal pelaksanaan	2013		2014												
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Penyusunan RKA dan pPembahasan intern Biro/Direktorat/Pusat/STIS dan pengajuan RKA ke Bio Bina program	November-Desember 2013															
2	Evaluasi dan Penyusunan RKA menjadi Rancangan Renja-BPS	Desember 2013-Januari 2014															
3	Pembahasan awal rancangan RKP dan Renja BPS bersama Bappenas	Januari-Februari 2014															
4	Menerima Pagu Indikatif dan Rancangan awal RKP berdasarkan SEB Kementerian Keuangan dan Bappenas	Maret 2014															
5	Penyusunan Renja-BPS berdasarkan pagu inddikatif melalui proses Trilateral Meeting (pembahasan Renja BPS bersama Bappenas dan DJA)	Maret-April 2014															
6	Menyerahkan Renja BPS kepada Bappenas dan DJA	Mei 2014															
7	- Menerima Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan	Juni 2014															
	- Penyusunan RKA BPS berdasarkan Renja-BPS dan pagu anggaran																
8	- pembahasan RKA-BPS dengan DPR	Juli 2014															
9	- Penelaahan RKA-BPS oleh Inspektorat dalam rangka penetapan Pagu RKA K/L yang bersifat final	Agustus 2014															
	- Sidang kabinet pembahasan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara pemerintah dengan DPR																
10	Pembahasan Rancangan APBN, dan Racangan Undang-Undang tentang APBN antara pemerintah dengan DPR	September-Oktober 2014															
11	Penyusunan/finalisasi RKA-BPS oleh BPS (termasuk review oleh Inspektorat) dan penyampaian kepada Menteri Keuangan c.q. DJA	Mg IV Okt- Mg I Nov															
12	Penelaahan RKA-BPS antara BPS, DJA, dan Bappenas	Mg IV Okt- Mg II Nov															
13	- Penyesuaian RKA BPS berdasarkan optimalisasi pagu anggaran	November 2014															
	- DJA menetapkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA K/L)																
	- Presiden meetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara																
14	Penyusunan konsep DIPA	Desember 2014															
15	DIPA BPS diterima dari DJA dan diserahkan ke setiap satker (BPS pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kab/kota)	Desember 2014															
16	Penyelesaian admin administrasi DIPA dan POK	Desember 2014															

C. Pola Penyusunan RKA

Berdasarkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh DJA Kementerian Keuangan, maka pola penyusunan RKA di BPS juga mengalami perubahan.

Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap RKA disusun untuk pengajuan kegiatan dalam satu Unit Eselon II, bukan satu aktivitas;

2. Format RKA (TOR dan RAB) terdapat beberapa perbedaan seperti adanya dasar hukum penyusunan dan tahapan pencapaian *output/suboutput* dalam setiap kegiatan/aktivitas.

Menurut skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap Direktorat/Biro, dibagi dalam 7 kategori yaitu:

1. Sensus/Periodik

Merupakan rangkaian aktivitas Sensus

2. Lanjutan

Merupakan lanjutan dari aktivitas tahun sebelumnya dan umumnya dilakukan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya yang dilakukan secara berkala.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Merupakan aktivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak

4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Merupakan aktivitas untuk pendamping PHLN

5. Reformasi Birokrasi (RB)

Merupakan aktivitas untuk melaksanakan dan mendukung Reformasi Birokrasi

6. *Ad-hoc*

Aktivitas yang sifatnya penugasan penting dari presiden atau pimpinan BPS, harus dibuktikan dengan surat permintaan resmi/MoU/Instruksi dari pimpinan atau K/L yang berkepentingan.

7. Baru

Merupakan usulan aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan.

Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra dan *Master Plan* BPS.

Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari dua bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) dan

Rencana Anggaran Belanja (RAB). Masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*), adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

Fungsi TOR adalah sebagai berikut:

- a) Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya;
- b) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- c) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut; dan
- d) Sebagai informasi bagaimana *output* kegiatan dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai *output*

Kandungan dalam TOR meliputi antara lain:

- a) Uraian mengenai apa (*what*) pengertian kegiatan yang akan dilaksanakan serta keluaran (*output*) yang akan dicapai;
- b) Mengapa (*why*) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh satuan kerja;
- c) Siapa (*who*) satker/panitia/tim/personil yang bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian *output*. Termasuk juga siapa (*who*)

sasaran yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut;

- d) Kapan (*when*) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (*how long*) waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya;
- e) Di mana/lokasi (*where*) kegiatan tersebut dilaksanakan;
- f) Bagaimana (*how*) kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
- g) Berapa perkiraan biayanya (*how much*) yang dibutuhkan.

Format TOR BPS untuk tahun 2015 dan seterusnya adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satker berupa Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen) dan yang lainnya serta kebijakan kementerian negara/lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktivitas berkenaan berupa peraturan perundangan yang berlaku.

II. Rencana Aktivitas Tahun Anggaran 2015

2.1.1. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat mengapa (*why*) aktivitas tersebut dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas yang dipilih dengan aktivitas keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan, mencakup:

i. Alasan umum

Diuraikan mengapa aktivitas ini perlu dilakukan

ii. Alasan penambahan/pengurangan sampel

Diuraikan mengapa aktivitas ini memerlukan penambahan/pengurangan cakupan.

iii. Cakupan wilayah

Lingkup aktivitas yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang lingkup dapat mencakup skala nasional atau daerah tertentu yang secara khusus disebutkan dengan jelas.

iv. Cakupan komoditi/penimbang

Diuraikan tentang objek/unit sampling yang akan dikerjakan

v. Kinerja dua tahun sebelumnya.

Menjelaskan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (minimal 2 tahun).

vi. Keterkaitan dengan prioritas nasional

Kegiatan yang diusulkan agar dijelaskan keterkaitannya dengan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengapa (*why*) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (*outcome*) kegiatan.

2.1.3. Keluaran

Menjelaskan keluaran (*output*) apa saja yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

2.1.4. Penerima Manfaat

Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas tercapainya keluaran (*output*) tersebut. Bisa unsur dari dalam satker/Kementerian/Lembaga atau masyarakat.

2.1.5. Strategi dan Pencapaian

i. Metode Pelaksanaan

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (*How*) dalam

rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara kontraktual atau dengan cara swakelola.

Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Contoh: Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, Pekerjaan *survey*, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan *survey* yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, dan lain-lain.

Kontraktual adalah pekerjaan yang cara pelaksanaannya memerlukan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Baran/Jasa.

ii. Metodologi Pelaksanaan

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (*how*) dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara panel survei atau sebagainya, serta bagaimana cara pengambilan sampelnya (metode pengumpulan data dan metode pengambilan sampel dan estimasi).

iii. Tahapan Pelaksanaan

Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, berupa penjelasan dari masing-masing komponen input (*what, how, who, where*). Bagaimana komponen input tersebut

dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (*when*) dari masing-masing komponen input berupa *time table* yang dituangkan dalam empat tahapan kegiatan, yaitu Perencanaan/Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan dan Laporan/Diseminasi.

2.1.6. Waktu Pelaksanaan

Merupakan jadwal waktu (*time table*) pelaksanaan, masing-masing aktivitas).

2.1.7. Waktu Pencapaian Keluaran

Menjelaskan kapan keluaran (*output*) kegiatan tersebut akan dicapai (*when*), apakah selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau terus menerus setiap tahun.

III. Rencana Anggaran Biaya

Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut (*how much*) secara global. Biaya lebih rinci tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan dengan TOR.

IV. Penandatanganan TOR

TOR harus ditandatangani oleh Eselon II, disetujui oleh Eselon I, dan dicap.

- 2) RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. RAB mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (*how much*) dalam rangka pencapaian *output* kegiatan dalam TOR.

RAB sekurang-kurangnya memuat:

- a) Rincian aktivitas/belanja;
- b) Perhitungan harga satuan, *volume* dan jumlah harga masing-masing komponen; dan

c) Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/*output*.

Fungsi RAB yaitu sebagai berikut:

1. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR;
2. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu *output* dalam TOR; dan
3. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu *output dalam* TOR.

Contoh format TOR dapat dilihat di lampiran 18 pada halaman 110, sementara contoh format RAB di lampiran 19 pada halaman 119

D. Penyusunan RKA Tahun 2015

Terkait dengan tata cara penyusunan RKA di Tahun 2015, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana kerja dengan biaya yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:

1. Usulan pekerjaan sensus/survei harus didukung/dilengkapi dengan alokasi populasi/sampel di tiap unit pendataan/pencacahan (blok sensus, rumah tangga, perusahaan, dsb) sampai dengan satker terkecil (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota). Besarnya alokasi populasi/sampel sangat penting sebagai dasar hitung biaya rencana kerja sensus/survei di setiap satuan kerja.
2. Rencana penyelenggaraan seminar/*workshop*/pelatihan harus dilengkapi dengan alokasi data pendukung di setiap satker, seperti: jumlah pembicara, moderator, narasumber, instruktur, peserta/undangan/petugas, kelas pelatihan, dan panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Besarnya alokasi data pendukung tersebut sangat penting sebagai dasar hitung biaya penyelenggaraan seminar/*workshop*/pelatihan, biaya transpor/perjalanan, dan honor yang diterima.

3. Penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dapat diselenggarakan dengan menggunakan satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, dan kepada para peserta diberikan uang saku sesuai dengan paket pertemuannya.

Penyelenggaraan konsinyering mengikuti Perka BPS No.31 tahun 2013. Ketentuan penyelenggaraan di dalam atau di luar kota mengikuti tempat penyelenggara/alokasi biaya.

Contoh:

BPS RI menyelenggarakan rateknas pimpinan BPS Provinsi Seluruh Indonesia. Alokasi anggaran ada di BPS RI dan Penyelenggara adalah BPS RI, maka:

a. Jika diadakan di Bandung menggunakan paket *meeting* Luar kota; atau

b. Jika diadakan di Jakarta, menggunakan paket *meeting* Dalam kota

Rumusan pelaksanaan konsinyering dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota (*Full Board*).

Tabel 3. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kota dan *Full Board*

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya transportasi PP	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota (524119)	\sum peserta (O-P)	Transpor perjalanan PP dari daerah asal ke tempat tujuan (<i>at cost</i>)
2.	Uang Harian PD		2 hari x \sum peserta (kecuali yang berasal dari lokasi penyelenggaraan)	Uang harian PD
3.	Uang Penginapan peserta yg berasal dari luar lokasi penyelenggaraan		\sum peserta (kecuali yang berasal dari lokasi penyelenggaraan)	Uang penginapan perjalanan dinas
4.	Paket <i>Meeting Fullboard</i> luar kota		$(\sum \text{hari}) \times \sum$ peserta (O-H)	Rate paket kegiatan rapat/pertemuan <i>full board</i> di daerah penyelenggaraan
5.	Uang Harian/Saku <i>fullboard Meeting</i> luar kota		$(\sum \text{hari}) \times \sum$ peserta (O-H)	Uang Harian/Saku <i>full board</i> luar kota

b. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (*Full Board*)

Tabel 4. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Dalam Kota dan *Full Board*

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya transportasi PP	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota (524114)	\sum peserta dalam kota (O-P)	Transpor perjalanan PP dari daerah asal ke tempat tujuan (<i>at cost</i>)
2.	Uang Harian		2 hari x \sum peserta (kecuali yang berasal dari lokasi penyelenggaraan)	Uang harian PD
3.	Uang Penginapan peserta yg berasal dari luar lokasi penyelenggaraan		\sum peserta (kecuali yang berasal dari lokasi penyelenggaraan)	Uang penginapan perjalanan dinas
4.	Paket <i>Meeting Fullboard</i> dalam kota		$(\sum \text{hari}) \times \sum$ peserta (O-H)	Rate paket kegiatan rapat/pertemuan <i>full board</i> di daerah setempat
5.	Uang Saku Paket <i>Meeting</i> dalam kota		$(\sum \text{hari}) \times \sum$ peserta (O-H)	Uang saku paket <i>full board</i> dalam kota

c. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (*Fullday dan halfday*) di dalam kantor

Tabel 5. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan *Fullday/Halfday* di dalam kantor

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konsumsi	Belanja Bahan (521211)	\sum peserta (O-K)	Konsumsi rapat <i>fullday</i> : 1 kali makan dan 2 kali snack Konsumsi rapat <i>halfday</i> : 1 kali makan dan 1 kali snack

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Uang Saku Paket Meeting Fullday/Halfday	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	Σ peserta luar BPS (O-H)	Uang saku paket meeting fullday/halfday di dalam kantor
3.	Transport Lokal Paket Meeting Fullday/Halfday		Σ peserta luar BPS (O-K)	Transport kegiatan dalam kab/kota (fullday/halfday)

- d. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (*Fullday dan halfday*) di luar kantor

Tabel 6. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan *Fullday/Halfday* di luar kantor

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paket Meeting Fullday/halfday	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	Σ peserta (O-H)	Paket kegiatan rapat/pertemuan fullday/halfday di luar kantor
2.	Uang Saku Paket Meeting Fullday/Halfday		Σ peserta (O-H)	Uang saku fullday/halfday di luar kantor
3.	Transport Lokal Paket Meeting Fullday/Halfday		Σ peserta Luar BPS (O-K)	Transport kegiatan dalam kab/kota (fullday/halfday)

4. Biaya perjalanan dinas biasa

Dalam melaksanakan perjalanan dinas terdapat tiga komponen biaya yang dihitung, yaitu:

- a. Transpor perjalanan dinas (PP), terdiri dari tiket pesawat+airport tax/kereta api/bus, dan transpor lokal dari bandara/pelabuhan/terminal ke lokasi (PP);

- b. Uang Harian, meliputi uang makan, transpor lokal, dan uang saku (*lumpsum*); dan
- c. Akomodasi/Penginapan, dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Tabel 7. Menghitung Biaya Perjalanan Dinas

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang harian PD	Belanja Perjalanan Biasa (524111)	$\sum \text{hari PD} \times \sum \text{orang-perjalanan}$	Uang harian PD
2.	Transpor PD Pulang-Pergi (PP)		$\sum \text{orang-perjalanan (O-P)}$	Transpor perjalanan PP
3.	Akomodasi/Penginapan		$\sum \text{hari PD-1} \times \sum \text{orang-perjalanan}$	Rate hotel di daerah setempat

5. Pelaksanaan rapat di kantor yang melebihi waktu kerja normal akan mendapat uang saku.

Komponen biaya yang dihitung adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Menghitung Biaya Rapat di Kantor di Luar Jam Kerja

Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi: 1 kali makan & 1 kali <i>snack</i>	Belanja Bahan (521211)	$\sum \text{peserta (O-K)}$	Rate snack dan uang makan rapat
Uang saku	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	$\sum \text{peserta (O-K)}$	Uang saku rapat di luar jam kantor
Uang Transport		$\sum \text{peserta luar BPS (O-K)}$	Uang transport lokal

6. Pelatihan Innas/Inda/Petugas

Dalam menyelenggarakan pelatihan terdapat lima komponen biaya yang dihitung, yaitu :

a. Transpor

Semua peserta mendapatkan transpor perjalanan dinas

b. Paket Kegiatan Pelatihan

Paket kegiatan pelatihan bisa dilakukan *fullday/fullboard* tergantung banyaknya materi pelatihan. Dapat pula dilakukan di dalam/ luar kota tergantung penyelenggara, alokasi biaya, dan peserta.

c. Uang Saku

Uang saku pelatihan diberikan sesuai dengan paket kegiatan

d. Biaya penginapan dan Uang Harian

Biaya penginapan dan uang harian diberikan jika peserta memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula.

e. Honor mengajar

Untuk instruktur mengajar akan mendapatkan honor mengajar.

Honor mengajar diberikan perjam, maksimal sehari adalah 8 jam.

f. Perlengkapan

Setiap peserta dan instruktur akan diberikan perlengkapan pelatihan bertugas yang terdiri dari tas, alat tulis, dan lain-lain yang diperlukan selama pelatihan atau bertugas.

Tabel 9. Menghitung Biaya Pelatihan

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya transportasi PP	Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota/ Luar kota (524114/ 524119)	$\sum \text{peserta} + \sum \text{panitia} + \text{instruktur}$	Transpor perjalanan PP
2.	Biaya penyelenggaraan Pelatihan		$(\sum \text{hari}) \times (\sum \text{peserta} + \sum \text{instruktur} + \sum \text{panitia})$	Paket kegiatan rapat/pertemuan (<i>full board/ full day</i>) atau paket <i>full board</i> pelatihan petugas
3.	Uang Saku		$\sum \text{hari} \times \sum \text{panitia}$ $\sum \text{hari} \times \sum \text{peserta}$	- Uang saku paket <i>meeting fullboard</i> - Uang saku paket <i>meeting pelatihan</i> petugas
4.	Uang Harian		2 hari $\times \sum \text{peserta}$ (kecuali yang berasal dari lokasi penyelenggaraan)	Uang harian perjalanan dinas peserta yang berasal dari luar lokasi penyelenggaraan
5.	Honor Instruktur (Intama/ Innas/ Inda)	Honor yang Terkait dengan <i>Output</i> Kegiatan (521213)	$\sum \text{jam mengajar} \times \sum \text{instruktur}$	Rate honor instruktur mengajar per jam
6.	Perlengkapan	Belanja Bahan (521211)	$\sum \text{peserta} + \sum \text{panitia} + \text{instruktur}$	Paket perlengkapan per orang

7. Pengiriman Innas Mengajar di Daerah

Biaya pengiriman Innas mengajar ke daerah terdiri atas unsur perjalanan dinas dan honor mengajar, yang masing-masing komponen dihitung sebagai berikut :

Tabel 10. Menghitung Biaya Pengiriman Innas Mengajar

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya transportasi PP	Belanja Perjalanan Biasa (524111)	\sum Innas pusat yang mengajar (O-P)	Transpor perjalanan PP
2.	Uang harian		2 hari x \sum Innas pusat	Uang harian
3.	Uang Penginapan		\sum Innas pusat	Uang penginapan PD
4.	Honor Innas mengajar	Honor yang Terkait dengan <i>Output</i> Kegiatan (521213)	\sum jam mengajar x \sum Innas pusat dan daerah yang mengajar	Rate honor Innas mengajar per jam

8. Pengawasan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota

Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota dihitung selama dua hari.

Tabel 11. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang harian	Belanja Perjalanan Biasa (524111)	2 hari x \sum orang-perjalanan	Uang harian PD
2.	Transpor perjalanan dari provinsi ke kabupaten/kota		\sum orang-perjalanan (O-P)	Transpor perjalanan dari provinsi ke kabupaten/kota PP
3.	Akomodasi		1 hari PD x \sum orang-perjalanan	Rate hotel di daerah setempat

9. Pengawasan dari BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan

Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke kecamatan dihitung selama 1 hari dengan menggunakan transpor dari BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan dengan satuan kunjungan.

Tabel 12. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan

No.	Komponen Biaya	Akun Belanja	Volume	Rate yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Transpor kunjungan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)	1 hari x Σ orang-kunjungan	Transpor perjalanan dari BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan

10. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNB

Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-KL mengacu pada:

- a. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNB;
- b. Pagu penggunaan PNB; dan
- c. Catatan Hasil Pembahasan PNB antara K/L dengan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) yang berisikan target PNB dan % (persen) pagu penggunaan sebagian dana dari PNB.

Penggunaan dana yang bersumber dari PNB difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau sesuai ketentuan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNB; Pembayaran honor pengelola kegiatan PNB (honor atasan langsung bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja

barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan *output* kegiatan (akun 521213).

E. Cara Pengajuan RKA

Dengan dikembangkannya Program Aplikasi Penyusunan RKA, maka penyusunan RKA dilakukan secara *online* melalui Program Aplikasi SIREKA. RKA yang telah selesai di-*entry* kemudian dicetak dan disahkan/ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (Kabid/Kabag/Kasubdit) dengan ditandatangani Direktur/Kepala Biro sebagai pengesahan untuk kemudian dikirimkan ke Biro Bina Program u.p. Bagian Penyusunan Rencana. Pedoman penyusunan RKA melalui Aplikasi SIREKA menggunakan Buku Pedoman Aplikasi Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (SIREKA) BPS Tahun 2015.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

A. Klasifikasi Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Seperti yang telah diuraikan pada Bagian Pendahuluan, disebutkan bahwa dalam menyusun Anggaran Belanja setiap Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan tiga klasifikasi belanja menurut BAS.

Posisi BPS di dalam Klasifikasi BAS dijelaskan sebagai berikut :

1. **Klasifikasi Organisasi**

Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur K/L, tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah pusat yang ada. Berdasarkan Lampiran 1 BAS dan Lampiran I PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, BPS mempunyai Kode Bagian Anggaran 054.

2. **Klasifikasi Berdasarkan Fungsi**

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (5) UU No.17 Tahun 2003, terdiri atas 11 fungsi utama. Dari kesebelas fungsi tersebut BPS mempunyai fungsi utama pelayanan umum kode (054.01).

3. **Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)**

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU No.17 Tahun 2003 terdiri atas delapan jenis belanja yaitu : Belanja Pegawai (51),

Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembayaran Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Bantuan Hibah (56), Bantuan Sosial (57), dan Belanja Lain-lain (58). Sedangkan di BPS umumnya menggunakan tiga jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53).

B. Jenis Belanja yang Lazim Digunakan untuk Penyusunan RKA di BPS

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dimaksudkan untuk mensinkronkan perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-KL dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran.

Ada tiga jenis belanja yang lazim digunakan untuk kegiatan di BPS, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengertian ketiga jenis belanja tersebut adalah :

1. Belanja Pegawai (510000)

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang. Belanja pegawai hanya digunakan untuk kegiatan yang termasuk pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS khususnya untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan administrasi keuangan.

Contoh : Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, anak, struktural, fungsional, PPh, beras, umum, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Vakasi, dan lain-lain.

2. Belanja Barang (520000)

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang Operasional dan Non-Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu kepada standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Beberapa jenis belanja barang yang biasa digunakan untuk penyusunan RKA- BPS adalah :

1) Belanja Barang Operasional (52111), merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis Pengeluarannya antara lain :

(1) Belanja Keperluan Perkantoran (521111), yaitu pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional K/L, seperti :

- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-

alat tulis, perlengkapan perkantoran, barang cetak, alat-alat rumah tangga, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu dan lain-lain.

- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, *cleaning service*, *telex*, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Biaya satpam/pengaman kantor & *cleaning service* pada belanja keperluan perkantoran (521111) harus didasarkan atas kontrak (SPK).
- Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian aset tetap/barang milik negara (BMN) yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker (satuan kerja) di bawah nilai minimum kapitalisasi.

Contoh : Biaya Koneksi Internet & VPN, Biaya Jasa Kebersihan, keamanan, pengemudi, resepsionis, pencetakan buku kerja, kalender, dan lain-lain.

- (2) Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh (521112), yaitu pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan/minuman/obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional pegawai, antara lain penyediaan obat-obatan, pengadaan bahan makanan/*extra fooding* pegawai, dan lain-lain.
- (3) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114).
- (4) Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya di bawah kapitalisasi.
- (5) Belanja Barang Operasional Lainnya (521119), yaitu pengeluaran untuk

membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114 dalam rangka kegiatan operasional.

Contoh : penyelenggaraan pelantikan, biaya *check up*, konsumsi rapat, pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai, dan lain-lain.

- (6) Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja (521115), yaitu honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti honor pejabat KPA, honor pejabat PPK, honor pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM, honor bendahara pengeluaran/Pemegang Uang Muka, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan barang dan jasa, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa penerima barang dan jasa, honor pengelola PNB (atasan langsung, bendahara penerimaan, dan sekretariat).

2) Belanja Barang Non Operasional (52121), merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Jenis Pengeluaran antara lain :

- 1) Honor yang Terkait dengan *Output* Kegiatan (521213), yaitu honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan *output*.

Contoh: Upah pengumpulan data, upah pengawasan/pemeriksaan, upah pengolahan, honor penyuluh non PNS, honor tim pelaksana kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan staf sekretaris), honor Intama, Innas, dan lain-lain.

- 2) Belanja Bahan (521211), yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti: ATK, Konsumsi/ Bahan Makanan, Bahan Cetakan, Dokumentasi, Spanduk, Biaya Fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti *dies natalis*, pameran, seminar, sosialisasi, rapat dan lain-lain.

Contoh: pencetakan, penggandaan, pengadaan ATK, pengadaan *computer supplies*, pengadaan seminar *kit*, konsumsi rapat, *housekeeping* dan lain-lain.

- 3) Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521211 dan 521212 termasuk belanja barang/modal yang akan diserahkan kepada masyarakat serta biaya-biaya *crash program*.

Contoh: biaya operasional, pengiriman dokumen dan lain-lain.

3) Belanja Jasa (5221), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk:

- (1) Belanja Langganan Daya dan Jasa (52211)

Contoh: biaya langganan listrik, telepon, dan air.

- (2) Belanja Jasa Konsultan (52213)

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara.

- (3) Belanja Jasa Profesi (52215), Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada PNS dan non PNS sebagai narasumber, pembicara, praktisi, dan pakar dalam kegiatan di luar direktorat atau Eselon I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas. Contoh: honor narasumber, pembicara, dan moderator.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

- Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

(4) Belanja Sewa (52214) yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja. Contoh: biaya sewa ruang *workshop*, sewa peralatan, dll.

- 4) **Belanja Pemeliharaan (5231)**, belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung (sesuai standar biaya umum), yang nilainya di bawah kapitalisasi.
- 5) **Belanja Perjalanan Dinas (524)**, yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas. Berdasarkan Surat Dirjen perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013, akun perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja

Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

a. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Pengumandahan/ detasering (penugasan sementara)
3. Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan
4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
5. Memperoleh pengobatan
6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
7. Mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/S2/S3
8. Mengikuti diklat
9. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
10. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman

b. Belanja Perjalanan Tetap (524112)

Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Pengumandahan (Detasering)
3. Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan
4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
5. Memperoleh pengobatan
6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
7. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
8. Mengikuti diklat
9. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/ pegawai negheri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota (524114)

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

1. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard*);
3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan konsinyering, perjalanan dinas dan rapat di luar jam kantor mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 31 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyering, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.

e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara,

serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

1. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. Biaya paket meeting (*fullboard*);
3. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya yang berlaku.

Berdasarkan PER-22/PB/2013, Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

- Melewati batas kota, diperlukan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
- Dalam kota:
 - ✓ ≥ 8 jam, diperlukan ST + SPD
 - ✓ ≤ 8 jam, hanya ST yang mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas

Tabel 13. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Paket <i>Fullboard</i>	Uang Saku Paket <i>Fullday/ Halfday</i>	Uang Transpor Pegawai	Biaya Penginapan	Uang Harian ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Melewati Batas Kota	√ ³⁾	-	√ ²⁾	√	√
2. Dalam Kota Lebih dari 8 jam	√ ³⁾	√ ³⁾	√	√ ⁴⁾	-
3. Dalam Kota sampai dengan 8 jam	-	√ ³⁾	√	-	-

Keterangan:

1. ¹⁾: Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2. ²⁾: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
3. ³⁾: Uang Saku *Fullboard/Fullday/Halfday* diberikan sesuai dengan jumlah paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
4. ⁴⁾: Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu tambahan untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan, karena kesulitan transportasi.

5. Uang Saku Paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya
6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

3. **Belanja Modal (530000)**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset K/L terkait serta bukan untuk dijual.

Jenis belanja modal yang biasa digunakan untuk penyusunan RKA BPS diantaranya :

- 1) Belanja Modal Tanah (5311), yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).

Contoh : biaya pengadaan tanah, biaya pengurangan, dan lain-lain.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321), yaitu biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin (kontraktual).

Contoh : pengadaan kendaraan, alat pengolah data, jaringan, *meubelair*, dll.

- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (53311), yaitu pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
- 4) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (53312), yaitu belanja modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.

Contoh : pembangunan infrastruktur (fasilitas sosial dan umum) dan lain-lain.

Penerapan konsep kapitalisasi didasarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.01/KM.12/2001 tentang Pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nilai minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

per unit dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;

- c. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Contoh pengeluaran yang masuk kategori belanja barang : pengisian *freon* AC, servis AC, pembelian ban, oli, bensin, *service/tune up*, pengecatan, pembuatan partisi non permanen, pembelian *gordyn*, perbaikan jalan berlubang/pemeliharaan berkala, biaya pengurusan STNK/BPKB, pembelian *accu* mobil dinas, pembelian lampu ruangan kantor, perbaikan atap gedung kantor, penggantian kompresor, perpanjangan lisensi *anti virus*, dll.

Contoh pengeluaran yang masuk kategori belanja modal : pembelian *memory* PC, *up grade* PC, pembelian *meubelair*, dispenser, *overhaul* kendaraan dinas, biaya lelang pengadaan aset, pembelian *tape* mobil dinas, penambahan jaringan dan pesawat telepon, penambahan jaringan listrik, pengadaan peta, jaringan, *software*, lambang instansi, alat kesehatan, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

Untuk melengkapi pedoman penyusunan RKA, dalam buku ini dilampirkan perkiraan satuan biaya yang akan digunakan di tahun anggaran 2015, yang mengacu kepada SBU Tahun Anggaran 2014, HSPK BPS tahun 2014, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di internal BPS. Demikian buku pedoman ini disusun, dengan harapan dapat menjadi panduan dan mempermudah para perencana di lingkungan Bagian/Bidang/Subdirektorat dalam menyusun RKA 2015, sehingga RKA yang diusulkan menjadi berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buku pedoman ini akan dievaluasi setiap tahun dalam rangka mengakomodasi setiap perkembangan peraturan dan dinamika dalam penerapannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Umum Perkiraan Biaya Per Satuan Berdasarkan HSPK BPS dan Standar Biaya Tahun 2014 Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.		KEGIATAN UMUM BPS					
		1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/ Esselon I/ Setara					
		a. Makan	O-K	112.000	112.000	112.000	112.000
		b. Snack	O-K	50.000	50.000	50.000	50.000
		2 Perlengkapan Innas/Intama/Master Intama	Set	214.000	214.000	214.000	214.000
		3 Perlengkapan Petugas	Set	129.000	129.000	129.000	129.000
		4 Perlengkapan Rateknas	Set	321.000	321.000	321.000	321.000
		5 Honor Master Intama	O-J	102.000	102.000	102.000	102.000
		6 Honor Instruktur Utama (Intama)	O-J	95.000	95.000	95.000	95.000
		7 Honor Instruktur Nasional (Innas)	O-J	83.000	83.000	83.000	83.000
		8 Honor Instruktur Daerah (Inda)	O-J	71.000	71.000	71.000	71.000
		9 Penyusunan Kerangka Sampel dan Daftar Sampel : Per Desa	Desa	8.000	8.000	8.000	8.000
		10 Penyusunan Kerangka Sampel dan Daftar Sampel : Per Dokumen	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		11 Penyusunan Kerangka Sampel dan Daftar Sampel : Per Blok Sensus	BS	11.000	11.000	11.000	11.000
		12 Penarikan Sampel : Per Blok Sensus	BS	24.000	24.000	24.000	24.000
		13 Penarikan Sampel : Per Dokumen	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		14 Updating Peta : Blok Sensus	Peta	90.000	97.000	102.000	107.000
		15 Updating Peta : Digital	Desa	27.000	27.000	27.000	27.000
		16 Updating Peta : Wilayah Administrasi	Peta	154.000	158.000	162.000	166.000
		17 Updating Listing Blok Sensus	BS	83.000	89.000	95.000	101.000
		18 Listing/Pendaftaran : Blok Sensus	BS	160.000	172.000	183.000	194.000
		19 Listing/Pendaftaran : Pasar	Pasar	171.000	172.000	173.000	174.000
		20 Pemeriksaan Peta	Peta	59.000	59.000	59.000	59.000
		21 Pemeriksaan Hasil Updating Listing Blok Sensus	BS	21.000	22.000	23.000	24.000
		22 Pemeriksaan Hasil Listing/Pendaftaran : Blok Sensus	BS	48.000	50.000	52.000	54.000
		23 Pemeriksaan Hasil Listing/Pendaftaran : Pasar	Dok	43.000	44.000	45.000	47.000
		24 Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data : Dok	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		25 Pengumpulan Data/Studi Literatur & Konsultasi	Kunj	59.000	59.000	59.000	59.000
		26 Pengumpulan/Inventarisasi Data Primer/Sekunder/Pendukung	Kunj	48.000	48.000	48.000	48.000
		27 Kompilasi Data : Per Blok Sensus	BS	42.000	42.000	42.000	42.000
		28 Kompilasi Data : Per Dokumen	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		29 Kompilasi Data : Per Tabel	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		30 Receiving-Batching	BS	5.000	5.000	5.000	5.000
		31 Penyusunan/penyempurnaan Program/Tabel	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		32 Cross Check Tabel : Tabel	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		33 Honor Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I					
		a. Pengarah	O-B	803.000	803.000	803.000	803.000
		b. Penanggung Jawab	O-B	749.000	749.000	749.000	749.000
		c. Ketua	O-B	696.000	696.000	696.000	696.000
		d. Wakil Ketua	O-B	642.000	642.000	642.000	642.000
		e. Sekretaris	O-B	535.000	535.000	535.000	535.000
		f. Anggota	O-B	535.000	535.000	535.000	535.000
		34 Honor Penanggung Jawab Pelaksana Provinsi	O-B	482.000	482.000	482.000	482.000
		35 Honor Penanggung Jawab Pelaksana Kabupaten/Kota	O-B	482.000	482.000	482.000	482.000
		36 Honor Tim Pelaksana Kegiatan di Daerah					
		a. Pengarah (Eselon II)	O-B	535.000	535.000	535.000	535.000
		b. Penanggung Jawab (Eselon III)	O-B	482.000	482.000	482.000	482.000
		c. Ketua (Eselon IV)	O-B	428.000	428.000	428.000	428.000
		d. Wakil Ketua	O-B	375.000	375.000	375.000	375.000
		e. Sekretaris	O-B	321.000	321.000	321.000	321.000
		f. Anggota	O-B	321.000	321.000	321.000	321.000
		37 Honor Camat	O-B	589.000	589.000	589.000	589.000
		38 Honor Kades	O-B	482.000	482.000	482.000	482.000
		39 Honor Ketua SLS	O-B	214.000	214.000	214.000	214.000
		40 Honor Penunjuk Jalan	O-H	142.000	142.000	142.000	142.000
		41 Honor Nara Sumber Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Desiminasi					
		a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	O-J	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
		b. Pejabat Eselon I	O-J	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
		c. Pejabat Eselon II	O-J	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		d. Pejabat Eselon III ke Bawah	O-J	963.000	963.000	963.000	963.000
		e. Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	O-J	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
		f. Moderator	O-J	749.000	749.000	749.000	749.000
		42 Honor Penerjemah Asing Ke Indonesia Dan Sebaliknya	Hal	150.000	150.000	150.000	150.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		43 Honor Tracking Batas Desa Baru Dan Marking Kantor Desa Baru Dengan GPS	Desa	54.000	54.000	54.000	54.000
		44 Honor Scanning Peta BS	BS	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 Biaya Updating Website	O-B	375.000	375.000	375.000	375.000
		46 Penyusunan Dan Pengetikan Naskah	O-J	14.000	14.000	14.000	14.000
		47 Pencetakan/Penggandaan Dokumen (Buku Pedoman, Kuesioner)	Lembar	450	550	650	750
		48 Pencetakan/Penggandaan Publikasi	Lembar	500	600	700	800
		49 Pencetakan Leaflet/Booklet	Lembar	9.000	9.000	9.000	9.000
		50 Pencetakan Buletin	Eksemplar	3.000	3.000	3.000	3.000
		51 Honor Tim Penyusunan Buletin/ Majalah					
		a. Penanggung Jawab	Oter	428.000	428.000	428.000	428.000
		b. Redaktur	Oter	321.000	321.000	321.000	321.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	268.000	268.000	268.000	268.000
		d. Desain Grafis & Fotografer	Oter	193.000	193.000	193.000	193.000
		e. Sekretariat	Oter	161.000	161.000	161.000	161.000
		f. Pembuat Artikel	Hal	107.000	107.000	107.000	107.000
		52 Honor Tim Penyusun Jurnal					
		a. Penanggung Jawab	Oter	482.000	482.000	482.000	482.000
		b. Redaktur	Oter	375.000	375.000	375.000	375.000
		c. Honor Tim Penyusun Jurnal : Penyunting/Editor	Oter	295.000	295.000	295.000	295.000
		d. Honor Tim Penyusun Jurnal : Desain Grafis & Fotografer	Oter	193.000	193.000	193.000	193.000
		e. Honor Tim Penyusun Jurnal : Sekretariat	Oter	161.000	161.000	161.000	161.000
		f. Honor Tim Penyusun Jurnal : Pembuat Artikel	Hal	161.000	161.000	161.000	161.000
		53 Pengiriman Dokumen Dari BPS Pusat Ke Provinsi	Kg	22.000	34.000	25.000	14.000
		Honor Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi					
		a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/pel	268.000	268.000	268.000	268.000
		b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/m.ujian	11.000	11.000	11.000	11.000
		c. Pengawas Ujian	O-H	311.000	311.000	311.000	311.000
		54 Transport Kegiatan dalam kota	O-K	120.000	120.000	120.000	120.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya					
		a. <u>Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</u>					
		Pemeliharaan inventaris /alat kantor (meja,kursi.mesin ketik. filling cabinet. lemari. dll)	O-T	75.000	75.000	75.000	75.000
		(1)					
		(2) Pemeliharaan dan operasional bahan bakar Genset : 40 KVA	UNIT	6.688.000	6.688.000	6.688.000	6.688.000
		(3) Pemeliharaan dan operasional bahan bakar Genset : 150 KVA	UNIT	12.327.000	12.327.000	12.327.000	12.327.000
		(4) Pemeliharaan dan operasional bahan bakar Genset : 500 KVA	UNIT	29.522.000	29.522.000	29.522.000	29.522.000
		(5) Pemeliharaan AC Split	UNIT	568.000	568.000	568.000	568.000
		(6) Pemeliharaan/maintenance komputer	UNIT	675.000	675.000	675.000	675.000
		(7) Pemeliharaan printer dan sejenisnya	UNIT	642.000	642.000	642.000	642.000
		b. <u>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</u>					
		(1) Honor rohaniawan	O-K	428.000	428.000	428.000	428.000
		c. <u>Satuan biaya uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</u>					
		(1) Golongan I dan II	O-H	27.000	27.000	27.000	27.000
		(2) Golongan III	O-H	29.000	29.000	29.000	29.000
		(3) Golongan IV	O-H	32.000	32.000	32.000	32.000
		d. <u>Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur</u>					
		Uang lembur					
		(1) Golongan I	O-J	11.000	11.000	11.000	11.000
		(2) Golongan II	O-J	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Golongan III	O-J	19.000	19.000	19.000	19.000
		(4) Golongan IV	O-J	22.000	22.000	22.000	22.000
		Uang makan lembur					
		(1) Golongan I dan II	O-H	27.000	27.000	27.000	27.000
		(2) Golongan III	O-H	29.000	29.000	29.000	29.000
		(3) Golongan IV	O-H	32.000	32.000	32.000	32.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2887		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)					
	a.	<u>Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan/Struktural*</u>					
	(1)	Diklat Pimpinan Tk. II (lama Diklat 10 minggu)	o-angk	32.380.000	32.380.000	32.380.000	32.380.000
	(2)	Diklat Pimpinan Tk. III (lama Diklat 7 minggu)	o-angk	23.674.000	23.674.000	23.674.000	23.674.000
	(3)	Diklat Pimpinan Tk. IV (lama Diklat 6 minggu)	o-angk	21.647.000	21.647.000	21.647.000	21.647.000
		*) Termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta					
		Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar/ Non Gelar Dalam Negeri					
	b.	<u>Non Gelar Dalam Negeri</u>					
		Honor Penguji Tesis	Mhs	268.000	268.000	268.000	268.000
		<u>Biaya hidup dan operasional</u>					
	(1)	Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1	OT	21.079.000	21.079.000	21.079.000	21.079.000
	(2)	Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2	OT	21.721.000	21.721.000	21.721.000	21.721.000
		<u>Uang Buku dan referensi per tahun</u>					
	(1)	Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1	OT	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	(2)	Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2	OT	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000
	c.	<u>Latihan Prajabatan (di luar perjalanan dinas) *</u>					
	(1)	Golongan III					
		CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)	o-angk	5.934.000	5.934.000	5.934.000	5.934.000
	(2)	Golongan I & II					
		CPNS Reguler (lama Diklat 10 hari)	o-angk	4.783.000	4.783.000	4.783.000	4.783.000
2888		Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)					
	a.	Tunjangan ikatan dinas	O-B	910.000	910.000	910.000	910.000
	b.	Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi					
	(1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ pel	268.000	268.000	268.000	268.000
	(2)	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ m. ujian	11.000	11.000	11.000	11.000
	(3)	Pengawas Ujian	O-H	311.000	311.000	311.000	311.000
	c.	Pembuatan Ijazah	Lembar	65.000	65.000	65.000	65.000
	d.	Honor Tutor	O-J	65.000	65.000	65.000	65.000
	e.	Honor Pembimbing Skripsi	O-K	65.000	65.000	65.000	65.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Honor Dosen/SKS	O-SKS	65.000	65.000	65.000	65.000
		g. Honorarium Tim Pengelola Website					
		(1) Web Admin	O-B	375.000	375.000	375.000	375.000
		(2) Web Developer	O-B	321.000	321.000	321.000	321.000
B.		KEGIATAN TEKNIS BPS					
	2896	Pengembangan dan Analisis Statistik					
		a. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen					
		(1) Pendataan Indeks Tendensi Bisnis	Kunj	18.000	19.000	20.000	21.000
		(2) Biaya pemeriksaan hasil pendataan survei tendensi bisnis	Kunj	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pendataan Survei Tendensi Konsumen	Kunj	18.000	19.000	20.000	21.000
		(4) Pemeriksaan Survei Tendensi Konsumen	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(5) Pengolahan hasil pendataan:					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Survei Beban Responden					
		(1) Pencacahan rumah tangga	Kunj	24.000	26.000	28.000	30.000
		(2) Pencacahan perusahaan	Kunj	37.000	39.000	41.000	43.000
		(3) Pemeriksaan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Pengolahan Data:		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		c. Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik					
		Pengolahan Data:					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		d. Studi Pengembangan Model <i>Spatial Shift Share</i>					
		Pengolahan Data	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik					
		a. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus					
		(1) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Penunjang Statistik Sektoral/Khusus Di Pusat	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Penunjang Statistik Sektoral/Khusus Daerah	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(3) Pengumpulan Data Penunjang Statistik Sektoral/Khusus Daerah	Kunj	30.000	32.000	33.000	34.000
		(4) Pengolahan Hasil Pengumpulan Data:					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(5) Pengumpulan Data Penunjang Statistik Sektoral/Khusus Di Pusat	Kunj	59.000	59.000	59.000	59.000
		(6) Pengumpulan Data Survei Kebutuhan Data Daerah	Kunj	30.000	32.000	33.000	34.000
		(7) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Survei Kebutuhan Data Daerah	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(8) Pengumpulan Survei Kebutuhan Data Di Pusat	Kunj	30.000	32.000	33.000	34.000
		(9) Penyusunan Tabel Metadata Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		b. Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi					
		(1) Penyempurnaan sistem informasi publikasi	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(2) Pembuatan multimedia katalog, flipping book dan softcopy publikasi	Dok	19.000	19.000	19.000	19.000
		(3) Pembuatan flipping book publikasi	Dok	19.000	19.000	19.000	19.000
		(4) Pembuatan softcopy publikasi	Dok	19.000	19.000	19.000	19.000
		c. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website					
		(1) Biaya Updating Website	OB	375.000	375.000	375.000	375.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran					
		a. Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan Dan Tahunan					
		(1) Pencacahan SKKRT	RESP	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan SKKRT	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Pengolahan Hasil Pencacahan SKKRT					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Kompilasi data SKKRT dan SKKLNP	BS	42.000	42.000	42.000	42.000
		b. Penyusunan Neraca Rumah Tangga Dan Institusi Nirlaba					
		(1) Pencacahan	RESP	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pencacahan Di Provinsi/Kabupaten/Kota	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Pengolahan Data		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Kompilasi Data SKTIR Dan SKLNP	BS	42.000	42.000	42.000	42.000
		(5) Biaya Pengumpulan Data Pelengkap Untuk Penyusunan Neraca Rumah Tangga	RESP	59.000	59.000	59.000	59.000
		(6) Pengumpulan Dan Updating Direktori LNP	RESP	36.000	39.000	42.000	45.000
		c. Penyusunan Neraca Pemerintah Dan Badan Usaha					
		(1) Listing Departemen/Kanwil/Dinas	kantor	27.000	28.000	29.000	30.000
		(2) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(3) Pemeriksaan	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		Pengolahan Data:		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(5) Pengumpulan & Updating Direktori Perusahaan BUMD	PERUSH	36.000	39.000	42.000	45.000
		d. PDB Triwulanan Menurut Sektor Dan Penggunaan					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(2) Pemeriksaan	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Pengolahan Data		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		e. Penyusunan Neraca Arus Dana					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan/Pengawasan	PERUSH	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Pengolahan Data		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Inventarisasi Data Laporan Keuangan, Perbankan, Asuransi Dan Lembaga	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(5) Pengumpulan Data Pokok Dan Pelengkap	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		f. Penyusunan Stok Kapital					
		(1) Pengumpulan Data Primer Di Daerah	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Primer	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(3) Pengolahan Data Penyusunan Stok Kapital Di Pusat		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		g. Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB					
		(1) Pengumpulan Data Sekunder	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(2) Pengolahan Hasil Indepth Studi	Dok	-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		h. Penyusunan Konsolidasi Neraca Pengeluaran dan Neraca Institusi					
		(1) Pengumpulan Data Primer	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(2) Pengolahan Data Sekunder		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(3) Pengolahan Data Primer		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Kompilasi Hasil Pengolahan	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		i. Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia					
		(1) Pengolahan Data Sekunder		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(2) Pengumpulan Data Pokok Dan Pelengkap SNSE	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(3) Honor Studi Kepustakaan SNSE	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(4) Kompilasi Hasil Pengolahan	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		j. Full Sequence Of Accounts					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data:		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		k. PDB Income					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		I. PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran					
		(1) Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi	Paket	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
		(2) Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran Kab/Kota	Paket	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
		(3) Biaya Pengumpulan Data Primer Untuk Penyusunan PDRB-E Triwulanan (Menurut Pengeluaran) Di Provinsi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(4) Biaya Pengumpulan Data Primer Kab/Kota	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(5) Pengumpulan Data Matriks Arus Komoditas Provinsi Dan Kab/Kota	KUNJ	41.000	43.000	45.000	48.000
		(6) Biaya Pengumpulan Data Sekunder Untuk Penyusunan PDRB-E Triwulanan (Menurut Pengeluaran) Di Provinsi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
	2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi					
		a. Survei Khusus Triwulanan Neraca Barang					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		b. Pengembangan Sistem Neraca Lingkungan Dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling)					
		(1) Pengolahan Data Sisnerling	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		(2) Pengolahan Data Pdb Triwulanan Sektor Barang	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		(3) Pengumpulan Data Pelengkap	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		c. Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB)					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Implementasi SNA 2008 Sektor Barang					
		(1) Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		e. Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (Stku) Sektor Jasa-Jasa (Sj)					
		(1) Pencacahan STKU	RESP	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Revisit STKU	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000
		(3) Pemeriksaan STKU	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		Pengolahan STKU					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		f. Survei Penyediaan Dan Penggunaan Jasa/Sut Jasa (Sppj)					
		(1) Upah Pencacahan	RESP	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Upah Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Upah Pengolahan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		g. Penyusunan Matriks Trade And Transport Margin (Ttm)					
		(1) Pencacahan	RESP	40.000	42.000	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Revisit Pencacahan	KUNJ	40.000	42.000	47.000	50.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. Survei Penyusunan Indikator Khusus SPIK (PDB Triwulanan)					
		(1) Pengumpulan Data	KUNJ	40.000	-	47.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Pengumpulan Data Sekunder Dalam dan Luar Negeri	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		i. Penyusunan dan Pengembangan Supply And Use Table (SUT) dan Tabel IO Indonesia					
		(1) Pencacahan	KUNJ	38.000	39.000	40.000	41.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		b. Data entry	Dok	15.000	15.000	15.000	15.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		j. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha					
		(1) Penyusunan PDRB Provinsi Tahunan dan Triwulanan	Paket	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
		(2) Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahunan	Paket	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
		(3) Inventarisasi Data Sekunder Sektor Barang dan Jasa Regional	O-H	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4) Perumusan dan Evaluasi Teknis Interdep Pendapatan Regional	O-H	14.000	14.000	14.000	14.000
	2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei					
		a. Pengembangan Dan Pemutakhiran Kerangka Sampel Statistik Bidang Sosial, Produksi, Distribusi Dan Jasa-jasa, Dan Pemutakhiran Mfd Dan Mbs Berbasis Web Th 2013					
		(1) Pelaksana pemutakhiran dan pemeliharaan mfd dan mbs berbasis web provinsi	Desa	10.000	10.000	10.000	10.000
		(2) Pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan mfd dan mbs	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berbasis web provinsi					
		Pelaksana pemutakhiran dan pemeliharaan mfd dan mbs berbasis web kabupaten	Desa	10.000	10.000	10.000	10.000
		(3)					
		Pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan mfd dan mbs berbasis web kabupaten	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(4)					
	2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi					
		a. Kompilasi data Statistik Ekspor					
		(1) Pengumpulan dokumen ekspor di jabotabek	Kunj	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Editing-coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(3) Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Kompilasi data Statistik Impor					
		(1) Pengumpulan dokumen impor di DKI Jakarta	Dok	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Pencacahan Perusahaan dan Importir	Dok	48.000	52.000	56.000	60.000
		(3) Editing coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(4) Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(5) Validasi hasil pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		c. Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi					
		(1) Pencacahan	Resp	37.000	38.000	39.000	40.000
		(2) Revisit	Kunj	37.000	38.000	39.000	40.000
		(3) Pemeriksaan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(4) Pengolahan					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		d. Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi					
		(1) Pencacahan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Resp	38.000	39.000	40.000	41.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pencacahan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Revisit Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Kunj	38.000	39.000	40.000	41.000
		(3) Pengolahan (editing, coding, data entry dan validasi)					
		(4) a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		e. Studi Angkutan Jalan Dan Jasa Pengiriman Di Dki Jakarta					
		(1) Pengumpulan Data	KUNJ	27.000	33.000	38.000	43.000
		(2) Revisit	KUNJ	27.000	33.000	38.000	43.000
		f. Kompilasi Data Transportasi					
		(1) Pengumpulan Data Statistik Angkutan Laut/Simoppel	Kunj	27.000	33.000	38.000	43.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Statistik Angkutan Laut/Simoppel					
		(a) Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(b) Di Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(3) Pengolahan Data Simoppel					
		(a) Receiving batching data Simoppel	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(b) Editing Coding data Simoppel	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(c) Validasi data Simoppel	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(6) Pengumpulan Data Statistik Angkutan Udara	Kunj	27.000	33.000	38.000	43.000
		(7) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Statistik Angkutan Udara					
		(a) Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(b) Di Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(8) Receiving batching data modul III/1	BS	5.000	5.000	5.000	5.000
		(9) Editing Coding data modul III/1	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(10) Validasi data modul III/1	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(11) Pengumpulan Data Statistik Angkutan Darat	Kunj	27.000	33.000	38.000	43.000
		(12) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Statistik Angkutan Darat					
		(a) Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(b) Di Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(13) Receiving batching data PT IIS&B ajr II 2&3	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(14) Editing Coding data modul III/1	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(15) Validasi data PT IIS&B ajr II 2&3	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(16) Cross Check Tabel	Dok	59.000	59.000	59.000	59.000
		(17) Pengumpulan data di DKI oleh Pusat	kunj	27.000	33.000	38.000	43.000
		(18) Pemeriksaan data di dki oleh pusat	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(19) Honor UPT Pelabuhan	OB	568.000	568.000	568.000	568.000
	2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga					
		a. Statistik Harga Produsen					
		(1) Pencacahan Survei Monitoring Harga Produsen Gabah bulanan (HP-G)	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Survei Harga Produsen Gabah (HP-G) di Kab/Kota	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(3) Pemeriksaan Hasil Survei Harga Produsen Gabah (HP-G) di Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(5) Penggantian contoh gabah	Kg	9.000	9.000	9.000	9.000
		(6) Biaya Tera Uji/Kalibrasi Moisture Tester	Unit	268.000	268.000	268.000	268.000
		(7) Pencacahan Survei Harga Produsen Umum Bulanan (HP-S)	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(8) Pencacahan Survei Harga Produsen Sektor Konstruksi Bulanan (HP-K)	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(9) Pemeriksaan Hasil Survei Harga Produsen (HP-S dan HP-K)	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		b. Penyusunan IKK					
		(1) Pencacahan harga bahan bangunan konstruksi	Resp	38.000	41.000	44.000	48.000
		pemeriksaan hasil pencacahan harga bahan bangunan konstruksi	Dok	15.000	15.000	15.000	15.000
		(3) Pencacahan Survei khusus Paket Komoditas IKK	Resp	38.000	41.000	44.000	48.000
		Pengawasan/pemeriksaan pencacahan khusus paket paket komoditas IKK DKI	Dok	15.000	15.000	15.000	15.000
		(6) Rekapitulasi hasil survei	Dok	18.000	18.000	18.000	18.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(7) Pengolahan/validasi harga antar kab/kota	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(8) Pengolahan harga satuan dasar	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(9) Penghitungan rasio tingkat kemahalan konstruksi	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(10) Penghitungan IKK	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		c. Survei Statistik Harga Perdagangan Besar					
		(1) Pencacahan (HPB-S)	RESP	33.000	36.000	40.000	43.000
		(2) Pemeriksaan (HPB-S)	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Pengolahan Data (HPB-S)					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		(4) Pencacahan (HPB-K2)	RESP	33.000	36.000	40.000	43.000
		(5) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota (HPB-K2)	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(6) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi (HPB-K2)	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(7) Pengolahan Data (HPB-K2)					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		(8) Pencacahan Survei HPB Konstruksi (Bulanan)	RESP	33.000	36.000	40.000	43.000
		(9) Pemeriksaan Hasil Survei HPB Konstruksi (Bulanan)	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(10) Pengolahan HPB-K2 Sektor Konstruksi					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		(11) Pengumpulan Data Komoditas Tambahan IHPB	RESP	33.000	36.000	40.000	43.000
		(12) Pengolahan Harga Komoditas Tambahan IHPB	Tabel	22.000	22.000	22.000	22.000
		(13) Pengolahan/Validasi Harga Barang Pertanian, Penggalan, Industri, Ekspor, dan Impor	Tabel	38.000	38.000	38.000	38.000
		(14) Revisit HPB-S Bulanan	RESP	33.000	36.000	40.000	43.000
		d. Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras					
		(1) Pencacahan HK-1.1 s/d HK-1.2	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(2) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota HK-1.1 s/d H.K-1.2	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(3) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi HK-1.1 s/d HK-1.2	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		Pengolahan Data HK-1.1 s/d HK-1.2					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Pencacahan HK-2.1 s/d HK-2.2	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(5) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota HK-2.1 s/d HK-2.2	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(6) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi HK-2.1 s/d HK-2.2	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(7) Pengolahan Data HK-2.1 s/d HK-2.2					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(8) Pencacahan HK-3 s/d HK-6	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(9) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota HK-3 s/d HK-6	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(10) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi HK-3 s/d HK-6	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(11) Pengolahan Data HK-3 s/d HK-6		-	-	-	-
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(12) Biaya Pencacahan Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Jakarta	RESP	27.000	33.000	38.000	43.000
		(13) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Jakarta	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(14) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Jakarta	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(15) Upah Pengolahan Hasil Pencacahan Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Jakarta					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		e. Pengembangan Metode Penghitungan Nilai Tukar Petani					
		(1) Pencacahan	KUNJ	30.000	34.000	37.000	40.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		f. Survei Harga Perdesaan					
		(1) Pencacahan	RESP	30.000	34.000	37.000	40.000
		(2) Pemeriksaan di Tingkat Kab/Kota	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(3) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(5) Honor Penyusunan Kerangka dan Daftar Sampel	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		g. Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP)					
		(1) Honor penyusunan program final tabulasi	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(2) Honor penyusunan kerangka dan daftar sampel	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(3) Pengumpulan data/studi literatur & konsultasi	Kunj	59.000	59.000	59.000	59.000
		(4) Kompilasi, validasi, dan tabulasi data diagram timbang					
		a. Ditingkat Kabupaten/kota	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		b. Ditingkat Provinsi	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
	2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Kontruksi					
		a. Survei Industri Besar/Sedang Bulanan					
		(1) Pencacahan	RESP	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Revisit	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(3) Pemeriksaan Kab/Kota	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(4) Pemeriksaan Provinsi	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(5) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengumpulan Data IBS Bulanan Di Pusat Ke Instansi Dan Asosiasi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(6)					
		b. Survei Industri Besar/Sedang Tahunan					
		(1) Pencacahan	RESP	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Revisit	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(3) Pemeriksaan Di Tingkat Kabupaten	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(4) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(5) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(6) Pengumpulan Data Ke Instansi Dan Asosiasi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(7) Pengutipan Direktori Dari Istansi Lain	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(8) Updating Direktori Hasil Matching Industri Besar/Sedang	PERUSH	59.000	59.000	59.000	59.000
		(9) Data Entry Untuk Pemasukan Dokumen Di KS Kab/Kota	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(10) Data Entry Kartu Kendali Dan Daftar IB	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(11) Pengecekan Lapangan Direktori Perusahaan	PERUSH	10.000	11.000	12.000	13.000
		(12) Pengolahan Direktori Prop/Kab/Kota (Dok)					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(13) Pengolahan Manual IBS Tahunan Di Pusat (Editing, Coding, Data Entry)					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(14) Biaya Kunjungan Ulang	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(15) Data Entry Keakuratan Isian Dan Tabulasi Pemantauan Dokumen	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan					
		(1) Pencacahan	Perush	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Revisit	Kunj	48.000	52.000	56.000	60.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(3) Pemeriksaan					
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		b. Di Tingkat Provinsi	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(4) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(5) Kompilasi data hasil entry vimk triwulanan	BS	42.000	42.000	42.000	42.000
		(6) Revisit hasil pencacahan vimk triwulanan	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(7) Penyusunan dummy tabel vimk triwulanan	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		d. Survei Industri Mikro Dan Kecil (Vimk) Triwulanan					
		(1) Pencacahan	PERUSH	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Revisit	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(3) Pemeriksaan Di Tingkat Kabupaten	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(4) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(5) Pengolahan Data	Dok				
		a. Editing & coding		4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry		9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan		5.000	5.000	5.000	5.000
		(6) Kompilasi Data Hasil Entry Di Pusat	BS	42.000	42.000	42.000	42.000
		(7) Revisit Hasil Pencacahan VIMK Triwulanan Di Jabotabek	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(8) Penyusunan Dummy Tabel VIMK Triwulanan	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		e. Survei Pertambangan					
		(1) Pencacahan	KUNJ	36.000	38.000	40.000	42.000
		(2) Revisit	KUNJ	36.000	38.000	40.000	42.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(4) Pemeriksaan Dokumen di Pusat	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		Biaya pemeriksaan survei pertambangan. energi. captiva power dan penggalan					
		(5)					

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		b. Di Tingkat Provinsi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(6) Revisit hasil survei pertambangan, energi, captiva power dan penggalan	KUNJ	22.000	24.000	25.000	27.000
		(7) Biaya pemeriksaan hasil pencacahan survei updating direktori perusahaan pertambangan dan energi					
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		b. Di Tingkat Provinsi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(9) Revisit di Pusat	KUNJ	36.000	38.000	40.000	42.000
		(10) Pencacahan Kantor Pusat Pertambangan Besar	RESP	36.000	38.000	40.000	42.000
		(11) Matching direktori dengan instansi terkait	KUNJ	20.000	21.000	22.000	23.000
		(12) Pengumpulan Data Khusus Dalam Rangka Penyusunan Neraca Energi Di Pusat	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(13) Pengutipan Direktori Ke Instansi Lain	KUNJ	21.000	22.000	23.000	24.000
		f. Survei Kontruksi					
		(1) Biaya pencacahan survei konstruksi triwulanan	RESP	36.000	38.000	40.000	42.000
		(2) Biaya revisit	KUNJ	36.000	38.000	40.000	42.000
		(3) Pengolahan					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(4) Biaya pemeriksaan					
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		b. Di Tingkat Provinsi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(5) Pengutipan direktori ke instansi lain	KUNJ	21.000	22.000	23.000	24.000
		(6) Biaya revisit ke perusahaan tergabung dalam aki	KUNJ	36.000	38.000	40.000	42.000
		(7) Upah pengumpulan Data Sekunder ke Instansi Terkait	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(8) Biaya pemeriksaan updating direktori konstruksi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
	2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan					
		a. Sakernas Triwulanan					
		(1) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	DOK	4.000	4.000	4.000	4.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Data entry	DOK	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	DOK	5.000	5.000	5.000	5.000
		(2) Pencacahan	RMT	36.000	40.000	41.000	43.000
		(3) Pemeriksaan Hasil Pencacahan Di Kab/Kota	DOK	11.000	11.000	11.000	11.000
		(4) Updating Listing	BS	83.000	89.000	95.000	101.000
		(5) Pemeriksaan Hasil Updating Listing	BS	21.000	22.000	23.000	24.000
		(6) Penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel	Desa	8.000	8.000	8.000	8.000
		b. Sakernas Tahunan					
		(1) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	DOK	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	DOK	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	DOK	5.000	5.000	5.000	5.000
		(2) Biaya pencacahan pcl	RMT	36.000	40.000	41.000	43.000
		(3) Biaya pemeriksaan pencacahan	DOK	11.000	11.000	11.000	11.000
		(4) Updating Listing	BS	83.000	89.000	95.000	101.000
		(5) Pemeriksaan Hasil Updating Listing	BS	21.000	22.000	23.000	24.000
		c. Survei Sektor Informal					
		(1) Pencacahan SSI 1 dan SSI 2	RMT	49.000	54.000	54.000	59.000
		(2) Pemeriksaan hasil pencacahan SSI 1 dan SSI 2	DOK	14.000	14.000	14.000	14.000
		(3) Revisit	PERUSH	49.000	54.000	54.000	59.000
		(4) Pengumpulan data pelengkap informal Sektoral SSI	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(5) Honor pengolahan dokumen (editing. coding dan entri data) SSI+SAK					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(6) Penyusunan krangka sampel dan Daftar sampel SSI 2012	Desa	8.000	8.000	8.000	8.000
		d. Survei Upah					
		(1) Pencacahan	RESP	35.000	37.000	39.000	41.000
		(2) Biaya pemeriksaan dokumen survei upah					
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	DOK	11.000	11.000	11.000	11.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Di Tingkat Provinsi	DOK	9.000	9.000	9.000	9.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	DOK	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	DOK	13.000	13.000	13.000	13.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	DOK	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Revisit di jabodetabek	Kunj	35.000	37.000	39.000	41.000
		(5) Receiving Batching	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		e. Survei Struktur Upah					
		(1) Pencacahan	RESP	35.000	37.000	39.000	41.000
		(2) Biaya pemeriksaan dokumen survei struktur upah					
		a. Di Tingkat Kabupaten/Kota	DOK	11.000	11.000	11.000	11.000
		b. Di Tingkat Provinsi	DOK	9.000	9.000	9.000	9.000
		(3) Upah pengolahan hasil survei struktur upah					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Revisit di Jabodetabek	Kunj	35.000	37.000	39.000	41.000
		(5) Receiving Batching	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
	2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat					
		a. Susenas					
		(1) Pencacahan	RT	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pencacahan Di Kab/Kota	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		(3) Updating Listing	BS	83.000	89.000	95.000	101.000
		(4) Pemeriksaan Hasil Updating Listing	BS	21.000	22.000	23.000	24.000
		(5) Biaya Pengolahan Susenas	Dok				
		a. Editing & coding		5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry		10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan		6.000	6.000	6.000	6.000
		(6) Studi Literatur Dan Konsultasi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(7) Penyempurnaan Program Dan Sistem Pengendalian	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(8) Receiving Batching Susenas 2013	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Susenas Panel					
		(1) Pencacahan	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		c. Susenas Modul					
		(1) Pencacahan	KUNJ	48.000	52.000	56.000	60.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
2907		Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial					
		a. Pendatan Potensi Desa 2014					
		(1) Pencacahan	KUNJ	61.000	65.000	68.000	71.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	24.000	24.000	24.000	24.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB), dan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)					
		(1) Pengumpulan Data SLHI	Kunj	48.000	50.000	52.000	54.000
		(2) Pengumpulan Data IPB	Kunj	48.000	50.000	52.000	54.000
		(3) Pengumpulan Data SDLP	Kunj	48.000	50.000	52.000	54.000
		(4) Cross Check Tabel	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(5) Kompilasi Hasil Pengolahan	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		(6) Biaya pengumpulan data	Kunj	48.000	50.000	52.000	54.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan					
		(1) Pengumpulan Data Di Pusat/Studi Literatur Dan Konsultasi	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		(2) Pengumpulan/Pencacahan Data	KUNJ	48.000	50.000	52.000	54.000
		(3) Pemeriksaan Hasil	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4) Pengolahan					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		d. Survei Perilaku Anti Korupsi					
		(1) Pencacahan	KUNJ	43.000	45.000	48.000	50.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		e. Survei Suara Rakyat (SSR)					
		(1) Pencacahan	KUNJ	38.000	41.000	44.000	49.000
		(2) Pemeriksaan	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		(3) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata					
		a. Statistik Lembaga Keuangan					
		(1) Pencacahan Lembaga Keuangan	PERUSH	29.000	33.000	36.000	40.000
		(2) Revisit Hasil Pencacahan Lembaga Keuangan	KUNJ	29.000	33.000	36.000	40.000
		(3) Pemeriksaan Hasil Pencacahan Lembaga Keuangan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(4) Monitoring Kurs Valuta Asing	PERUSH	29.000	33.000	36.000	40.000
		(5) Pengolahan Data					
	2908						

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(6) Pemeriksaan Monitoring Kurs Valas	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(7) Pengolahan Monitoring Kurs Valas					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(8) Pengumpulan Data Sekunder Statistik Pasar Modal	PERUSH	59.000	59.000	59.000	59.000
		(9) Penyusunan Kerangka Sampel Dan Daftar Sampel SLK	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(10) Upah Pengumpulan Data Sekunder Stat. Lembaga Keuangan	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000
		b. Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal					
		(1) Pencacahan Perusahaan BUMD	KUNJ	29.000	33.000	36.000	40.000
		(2) Biaya pemeriksaan BUMD					
		a. Ditingkat Kabupaten/kota	DOK	12.000	12.000	12.000	12.000
		b. Ditingkat Provinsi	DOK	8.000	8.000	8.000	8.000
		(3) Biaya pengolahan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(4) Biaya pencacahan bumh	Kunj	48.000	52.000	56.000	60.000
		(5) Biaya pemeriksaan bumh	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(6) Biaya updating direktori perusahaan bumh dan bumd	Perush	12.000	13.000	14.000	15.000
		(7) Biaya pencacahan dan monitoring kurs valas	PERUSH	29.000	33.000	36.000	40.000
		(8) Biaya pengolahan data valas					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(9) Biaya penyusunan dan pengetikan naskah publikasi bumh dan bumd	O-J	14.000	14.000	14.000	14.000
		(10) Biaya pengumpulan data sekunder statistik pasar modal	Kunj	59.000	59.000	59.000	59.000
		c. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah					

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(1) Pencacahan Survei Keuangan Tingkat Desa Tahunan	RESP	29.000	33.000	36.000	40.000
		(2) Pemeriksaan Di Tingkat Kab/Kota Survei Keuangan Tingkat Desa Tahunan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi Survei Keuangan Tingkat Desa Tahunan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(4) Pengolahan Data Survei Keuangan Tingkat Desa Tahunan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(5) Pencacahan Survei Keuangan Daerah Tingkat I Dan II Tahunan	RESP	29.000	33.000	36.000	40.000
		(6) Pemeriksaan Di Tingkat Kab/Kota Survei Keuangan Daerah Tingkat I Dan II Tahunan	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(7) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi Survei Keuangan Daerah Tingkat I Dan II Tahunan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(8) Kompilasi Data Keuangan Daerah Tingkat I Dan II Tahunan	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(9) Pencacahan Survei Statistik Keuangan BUMN/BUMD	RESP	29.000	33.000	36.000	40.000
		(10) Pemeriksaan Di Tingkat Kab/Kota Survei Statistik Keuangan BUMN/BUMD	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(11) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi Survei Statistik Keuangan BUMN/BUMD	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(12) Pengolahan Data Survei Statistik Keuangan BUMN/BUMD					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(13) Pencacahan APBD Provinsi Dan Kab/Kota	RESP	29.000	33.000	36.000	40.000
		(14) Pemeriksaan Di Tingkat Kab/Kota APBD Provinsi Dan Kab/Kota	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(15) Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi APBD Provinsi Dan Kab/Kota	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(16) Pengolahan Data APBD Provinsi dan Kab/Kota					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(17) Biaya Pengumpulan Data Sekunder	KUNJ	59.000	59.000	59.000	59.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(18) Biaya Penyusunan Kerangka Sampel	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(19) Biaya Pemeriksaan Realisasi Keuangan Kabupaten/Kota Ditingkat Kabupaten/Kota	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(20) Biaya Pemeriksaan Realisasi Keuangan Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		d. Survei Penggunaan Dan Penyerapan Sarana Komunikasi Dan Teknologi Informasi					
		Pengumpulan Data	KUNJ	27.000	30.000	35.000	40.000
		Revisit	KUNJ	27.000	30.000	35.000	40.000
		Pemeriksaan Di Tingkat Kab/Kota	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		Pemeriksaan Di Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		Pengolahan data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kompilasi Data Penggunaan Dan Penyerapan	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		e. Survei Perusahaan Komunikasi Dan Teknologi Informasi					
		(1) Pengumpulan Data	KUNJ	27.000	30.000	35.000	40.000
		(2) Revisit	KUNJ	27.000	30.000	35.000	40.000
		(3) Pemeriksaan Kab/Kota	Dok	12.000	12.000	12.000	12.000
		(4) Pemeriksaan Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(5) Pengolahan data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	13.000	13.000	13.000	13.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(6) Kompilasi Data Perusahaan KTI	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(7) Kompilasi Data LBDSE	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		(8) Penarikan Sampel Survei Perusahaan KTI	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(9) Penyusunan program/tabel survei perusahaan KTI	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(10) Cross Check Tabel Survei Perusahaan KTI	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(11) Upah Receiving-Batching Dokumen Perusahaan KTI	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Survei Bidang Jasa Pariwisata					
		(1) Pencacahan VHT-S	RESP	36.000	38.000	39.000	40.000
		(2) Revisit VHT-S	KUNJ	36.000	38.000	39.000	40.000
		(3) Pemeriksaan di Tingkat Kabupaten VHT-S	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(4) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi VHT-S	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(5) Pengolahan Data VHT-S:					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(6) Pencacahan VHT-L	RESP	36.000	38.000	39.000	40.000
		(7) Revisit VHT-L	KUNJ	36.000	38.000	39.000	40.000
		(8) Pemeriksaan di Tingkat Kabupaten VHT-L	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(9) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi VHT-L	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(10) Pengolahan Data VHT-L					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(11) Pencacahan VIOT	RESP	36.000	38.000	39.000	40.000
		(12) Revisit VIOT	KUNJ	36.000	38.000	39.000	40.000
		(13) Pemeriksaan di Tingkat Kabupaten VIOT	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(14) Pemeriksaan di Tingkat Provinsi VIOT	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		(15) Pengolahan Data VIOT					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(16) Pemeriksaan Hasil Pencacahan VREST	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(17) Pemeriksaan Hasil Pencacahan VBPW	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(18) Pencacahan/Revisit Restoran	RESP	36.000	38.000	39.000	40.000
		(19) Pencacahan/Revisit BPW	RESP	36.000	38.000	39.000	40.000
		(20) Pengolahan Data Restoran/BPW					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(21) Honor UPT Imigrasi yang membawahi TPI	O-B	535.000	535.000	535.000	535.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan					
		a. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH					
		(1) Pengumpulan Data Perusahaan Peternakan	PERUSH	43.000	47.000	50.000	53.000
		(2) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Perusahaan Peternakan Di Tingkat Kabupaten	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(3) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Perusahaan Peternakan Di Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4) Revisit	KUNJ	43.000	47.000	50.000	53.000
		(5) Upah Pengolahan Data Perusahaan Peternakan Di Pusat					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(6) Kompilasi	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(7) Pengolahan Data Rph Dan Keurmaster Di Provinsi					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(8) Pemeriksaan Hasil Pencacahan EPT Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(9) Pemeriksaan Hasil Pencacahan EPT Tingkat Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(10) Kompilasi Data Estimasi Parameter Ternak Di Pusat	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(11) Pengolahan Estimasi Parameter Ternak Di Pusat					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(12) Matching Direktori Perusahaan Dengan Instansi Terkait	KUNJ	48.000	50.000	52.000	54.000
		(13) Biaya Pencacahan Perusahaan Yang Datanya Di Kantor Pusat	PERUSH	43.000	47.000	50.000	53.000
		(14) Upah Receiving Batching Dokumen Perusahaan Peternakan Dan Rph/Keurmaster	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(15) Upah Programming Dan Penyusunan Tabulasi Estimasi Parameter Ternak	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Survei Perusahaan Perikanan dan TPI					
		(1) Pencacahan	PERUSH	40.000	43.000	47.000	51.000
		(2) Pemeriksaan Kab/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(3) Pemeriksaan Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4) Revisit	KUNJ	40.000	43.000	47.000	51.000
		(5) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	10.000	10.000	10.000	10.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		(6) Kompilasi Data TPI	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		Matching Direktori Perusahaan Perikanan dengan Instansi Lain di Pusat	KUNJ	48.000	50.000	52.000	54.000
		(7)					
		c. Survei Perusahaan Kehutanan					
		(1) Pencacahan	PERUSH	43.000	48.000	52.000	56.000
		(2) Revisit	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		Biaya Pemeriksaan Dokumen Survei Perusahaan Kehutanan di Kab/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(3)					
		Biaya Pemeriksaan Dokumen Survei Perusahaan Kehutanan di Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(4)					
		(5) Pengolahan Data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	8.000	8.000	8.000	8.000
		Pemeriksaan Hasil Pencacahan Survei Kehutanan Triwulanan di Kab/Kota	Dok	11.000	11.000	11.000	11.000
		(6)					
		Pemeriksaan Hasil Pencacahan Survei Kehutanan Triwulanan di Provinsi	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		(7)					
		Pengecekan Lapangan Direktori Perusahaan Kehutanan	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(8)					
		Biaya Pencacahan Perusahaan Kehutanan yang Kantor Pusatnya di DKI Jakarta	PERUSH	43.000	48.000	52.000	56.000
		(9)					

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
		a. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian					
		(1) Biaya Pimpinan Dan Staf Diperta I	O-H	19.000	19.000	19.000	19.000
		(2) Biaya Pimpinan Dan Staf Diperta II	O-H	12.000	12.000	12.000	12.000
		(3) Pengumpulan Data Luas Panen dan luas lahan	kec	118.000	130.000	142.000	154.000
		(4) Pengumpulan Data Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan	Ubinan	43.000	49.000	54.000	59.000
		(5) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan	Dok	19.000	19.000	19.000	19.000
		(6) Evaluasi Data Ramalan Produksi Tanaman Pangan	O-K	113.000	118.000	124.000	129.000
		(7) Pengolahan Data:					
		a. Editing & coding	Dok	4.000	4.000	4.000	4.000
		b. Data entry	Dok	7.000	7.000	7.000	7.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		(8) Kompilasi Hasil Ubinan/Luas Panen	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(9) Penggantian Biaya Responden	RESP	24.000	24.000	24.000	24.000
		(10) Pemeriksaan Luas Panen Setahun	Dok	51.000	51.000	51.000	51.000
		(11) Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Luas Panen Setahun	Dok	51.000	51.000	51.000	51.000
		(12) Upah Receiving-Batching Data Ubinan (Jlh BS)	BS	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian					
		Biaya pengutipan dan pemutahiran direktori perusahaan hortikultura	RESP	43.000	48.000	52.000	56.000
		(1) Biaya pencacahan perusahaan hortikultura di kantor pusat *	RESP	43.000	48.000	52.000	56.000
		(3) Pengolahan data					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(4) Kompilasi data survei hortikultura	Tabel	30.000	30.000	30.000	30.000
		(5) Pengolahan data rata-rata produksi hortikultura					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(6) Biaya pengumpulan data indikator pertanian dari instansi terkait *	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(7) Pemeriksaan tabel indikator pertanian	Tabel	59.000	59.000	59.000	59.000
		(8) Penyusunan program tabulasi dan evaluasi indikator pertanian	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(9) Penyusunan tabel indikator pertanian	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(10) Biaya pengutipan dan updating direktori perusahaan horti dari instansi terkait	Kunj	43.000	48.000	52.000	56.000
		(11) Biaya pengecekan lapangan hasil matching ph di daerah	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(12) Biaya pencacahan ph di daerah *	PERUSH	43.000	48.000	52.000	56.000
		(13) Biaya pemeriksaan ph di Kabupaten*	Dok	14.000	14.000	14.000	14.000
		(14) Biaya pemeriksaan ph di propinsi *	DOK	11.000	11.000	11.000	11.000
		(15) Revisit ph yang sulit dan baru di kab/kota *	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(16) Listing Studi Produktivitas Hortikultura	BS	160.000	172.000	183.000	194.000
		(17) Pemeriksaan Hasil Listing Studi Produktivitas Hortikultura	BS	48.000	50.000	52.000	54.000
		(18) Pengumpulan Data Luas Panen Setahun	Kec	107.000	118.000	129.000	140.000
		(19) Biaya pengumpulan data rata-rata produksi hortikultura *	UBIN	43.000	48.000	52.000	56.000
		(20) Biaya pemeriksaan data rata-rata produksi hortikultura *	DOK	14.000	14.000	14.000	14.000
		(21) Biaya Pimpinan Dan Staf Diperta I	O-H	19.000	19.000	19.000	19.000
		(22) Biaya Pimpinan Dan Staf Diperta II	O-H	12.000	12.000	12.000	12.000
		(23) Penggantian biaya ubinan untuk responden	RESP	24.000	24.000	24.000	24.000
		c. Survei Perusahaan Perkebunan					
		(1) Biaya pencacahan perusahaan perkebunan di kantor pusat	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(2) Biaya pengutipan & updating direktori perusahaan perkebunan dari instansi lain	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(3) Upah pengolahan survei perusahaan perkebunan bulanan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(4) Upah pengolahan survei perusahaan perkebunan tahunan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000

No.	Kegiatan	Uraian	Satuan	Estimasi 2015			
				Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(5) Upah pengolahan direktori perusahaan perkebunan hasil pengecekan lapangan					
		a. Editing & coding	Dok	5.000	5.000	5.000	5.000
		b. Data entry	Dok	9.000	9.000	9.000	9.000
		c. Validasi Hasil Pengolahan	Dok	6.000	6.000	6.000	6.000
		(6) Upah kompilasi data perusahaan perkebunan *	Dok	17.000	17.000	17.000	17.000
		(7) Upah penyusunan program survei perusahaan perkebunan bulanan	Tabel	66.000	66.000	66.000	66.000
		(8) Biaya pencacahan survei pershn.perkebunan tahunan/struktur ongkos perusahaan perkebunan	RESP	43.000	48.000	52.000	56.000
		(9) Pemeriksaan Kab/Kota	DOK	9.000	9.000	9.000	9.000
		(10) Pemeriksaan Provinsi	DOK	7.000	7.000	7.000	7.000
		(11) Biaya pencacahan revisit perkebunan bulanan	KUNJ	43.000	48.000	52.000	56.000
		(12) Biaya pengutipan & updating direktori perusahaan perkebunan dari instansi lain di daerah (31 prov+238 kab/kota x 3 inst x 1 kunjungan) *	RESP	43.000	48.000	52.000	56.000
		(13) Upah pengecekan lapangan hasil matching direktori perusahaan perkebunan	DOK	20.000	22.000	24.000	26.000

Keterangan:

Wil I : Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat

Wil II : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo

Wil III : Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara

Wil IV : DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Lampiran 2. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015

No	Provinsi	Ibukota Provinsi	Satuan	Transpor Perjalanan Dinas (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Banda Aceh	OP	5.525.000
2	Sumatera Utara	Medan	OP	5.074.000
3	Sumatera Barat	Padang	OP	3.954.000
4	Riau	Pekanbaru	OP	3.846.000
5	Jambi	Jambi	OP	3.212.000
6	Sumatera Selatan	Palembang	OP	3.067.000
7	Bengkulu	Bengkulu	OP	3.434.000
8	Lampung	Bandar Lampung	OP	2.386.000
9	Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	OP	2.859.000
10	Kep. Riau	Tanjung Pinang	OP	4.079.000
11	DKI Jakarta	Jakarta	OP	374.000 *)
12	Jawa Barat	Bandung	OP	594.000 *)
13	Jawa Tengah	Semarang	OP	2.885.000
14	DI. Yogyakarta	Yogyakarta	OP	3.076.000
15	Jawa Timur	Surabaya	OP	3.641.000
16	Banten	Serang	OP	1.001.000 *)
17	Bali	Denpasar	OP	4.218.000
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	OP	4.396.000
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	OP	6.122.000
20	Kalimantan Barat	Pontianak	OP	3.669.000
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	OP	3.833.000
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	OP	3.882.000
23	Kalimantan Timur	Balikpapan	OP	5.328.000
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	OP	5.328.000
25	Sulawesi Utara	Manado	OP	6.229.000
26	Sulawesi Tengah	Palu	OP	6.131.000
27	Sulawesi Selatan	Ujung Pandang	OP	4.868.000
28	Sulawesi Tenggara	Kendari	OP	5.263.000
29	Gorontalo	Gorontalo	OP	5.934.000
30	Sulawesi Barat	Mamuju	OP	6.206.000
31	Maluku	Ambon	OP	8.540.000
32	Maluku Utara	Ternate	OP	8.088.000
33	Papua Barat	Manokwari	OP	12.567.000
34	Papua	Jayapura	OP	10.166.000

Keterangan:

- Tarif tiket pesawat kelas ekonomi sudah termasuk transpor taksi dan airport tax (PP)
- Tarif kereta api kelas executive, termasuk transpor lokalnya
- *) Transport kereta/kendaraan umum PP

Lampiran 3. Perkiraan Satuan Biaya Uang Harian dan Satuan Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian	Tarif Hotel			
				Pejabat Eselon I/II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	O-H	386.000	1.400.000	1.156.000	439.000	396.000
2.	Sumatera Utara	O-H	396.000	1.291.000	753.000	503.000	332.000
3.	Sumatera Barat	O-H	407.000	1.225.000	946.000	493.000	396.000
4.	Riau	O-H	396.000	1.250.000	771.000	482.000	407.000
5.	Jambi	O-H	396.000	1.103.000	746.000	396.000	311.000
6.	Sumatera Selatan	O-H	407.000	1.314.000	645.000	550.000	300.000
7.	Bengkulu	O-H	407.000	846.000	762.000	641.000	546.000
8.	Lampung	O-H	407.000	1.390.000	824.000	401.000	381.000
9.	Kep. Bangka Belitung	O-H	439.000	1.231.000	910.000	571.000	326.000
10.	Kepulauan Riau	O-H	396.000	996.000	696.000	407.000	300.000
11.	DKI Jakarta	O-H	568.000	1.070.000	696.000	653.000	428.000
12.	Jawa Barat	O-H	461.000	1.876.000	1.016.000	532.000	496.000
13.	Jawa Tengah	O-H	396.000	1.554.000	803.000	482.000	375.000
14.	DI. Yogyakarta	O-H	450.000	1.336.000	717.000	565.000	415.000
15.	Jawa Timur	O-H	439.000	1.455.000	900.000	519.000	307.000
16.	Banten	O-H	396.000	1.531.000	1.096.000	595.000	428.000
17.	Bali	O-H	514.000	1.937.000	1.306.000	968.000	705.000
18.	Nusa Tenggara Barat	O-H	471.000	1.308.000	789.000	578.000	386.000
19.	Nusa Tenggara Timur	O-H	461.000	1.070.000	749.000	589.000	428.000
20.	Kalimantan Barat	O-H	407.000	1.210.000	865.000	461.000	354.000
21.	Kalimantan Tengah	O-H	386.000	1.708.000	988.000	498.000	467.000
22.	Kalimantan Selatan	O-H	407.000	1.716.000	874.000	535.000	406.000
23.	Kalimantan Timur	O-H	461.000	1.561.000	874.000	589.000	482.000
24.	Kalimantan Utara	O-H	461.000	1.561.000	874.000	589.000	482.000
25.	Sulawesi Utara	O-H	396.000	1.662.000	685.000	535.000	311.000
26.	Sulawesi Tengah	O-H	396.000	1.389.000	821.000	428.000	354.000
27.	Sulawesi Selatan	O-H	461.000	1.215.000	913.000	577.000	402.000
28.	Sulawesi Tenggara	O-H	407.000	1.145.000	859.000	482.000	450.000
29.	Gorontalo	O-H	396.000	1.081.000	974.000	439.000	257.000
30.	Sulawesi Barat	O-H	439.000	1.103.000	974.000	428.000	386.000
31.	Maluku	O-H	407.000	1.103.000	728.000	518.000	300.000
32.	Maluku Utara	O-H	461.000	1.618.000	642.000	450.000	407.000
33.	Papua Barat	O-H	514.000	1.586.000	963.000	428.000	396.000
34.	Papua	O-H	621.000	1.631.000	771.000	493.000	443.000

Lampiran 4. Perkiraan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	212.000	321.000	696.000
2	Sumatera Utara	OH	185.000	295.000	578.000
3	Sumatera Barat	OH	156.000	236.000	559.000
4	Riau	OH	149.000	198.000	541.000
5	Jambi	OH	196.000	302.000	585.000
6	Sumatera Selatan	OH	231.000	278.000	657.000
7	Bengkulu	OH	193.000	236.000	755.000
8	Lampung	OH	179.000	253.000	685.000
9	Kep. Bangka Belitung	OH	280.000	318.000	642.000
10	Kep. Riau	OH	150.000	257.000	664.000
11	DKI Jakarta	OH	247.000	354.000	675.000
12	Jawa Barat	OH	235.000	294.000	753.000
13	Jawa Tengah	OH	161.000	225.000	578.000
14	DI. Yogyakarta	OH	224.000	329.000	578.000
15	Jawa Timur	OH	214.000	353.000	582.000
16	Banten	OH	223.000	311.000	701.000
17	Bali	OH	247.000	423.000	1.070.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	268.000	440.000	692.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	198.000	327.000	557.000
20	Kalimantan Barat	OH	200.000	240.000	598.000
21	Kalimantan Tengah	OH	224.000	360.000	617.000
22	Kalimantan Selatan	OH	188.000	316.000	813.000
23	Kalimantan Timur	OH	214.000	359.000	659.000
24	Kalimantan Utara	OH	214.000	359.000	659.000
25	Sulawesi Utara	OH	171.000	257.000	712.000
26	Sulawesi Tengah	OH	193.000	269.000	589.000
27	Sulawesi Selatan	OH	193.000	332.000	883.000
28	Sulawesi Tenggara	OH	200.000	297.000	589.000
29	Gorontalo	OH	185.000	252.000	808.000
30	Sulawesi Barat	OH	172.000	300.000	498.000
31	Maluku	OH	161.000	309.000	603.000
32	Maluku Utara	OH	142.000	193.000	573.000
33	Papua Barat	OH	220.000	327.000	589.000
34	Papua	OH	191.000	350.000	801.000

Lampiran 5. Perkiraan Satuan Biaya Uang Saku Paket Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Uang Saku		
			Paket Fullboard di Luar Kota	Paket Fullboard di Dalam Kota	Paket Fullday/Halfday di Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	129.000	107.000	91.000
2	Sumatera Utara	OH	140.000	118.000	102.000
3	Sumatera Barat	OH	129.000	107.000	91.000
4	Riau	OH	129.000	107.000	91.000
5	Jambi	OH	140.000	118.000	102.000
6	Sumatera Selatan	OH	129.000	107.000	91.000
7	Bengkulu	OH	140.000	118.000	102.000
8	Lampung	OH	140.000	118.000	102.000
9	Kep. Bangka Belitung	OH	140.000	118.000	102.000
10	Kep. Riau	OH	140.000	118.000	102.000
11	DKI Jakarta	OH	193.000	161.000	140.000
12	Jawa Barat	OH	161.000	134.000	113.000
13	Jawa Tengah	OH	140.000	118.000	102.000
14	DI. Yogyakarta	OH	150.000	124.000	107.000
15	Jawa Timur	OH	150.000	124.000	107.000
16	Banten	OH	129.000	107.000	91.000
17	Bali	OH	172.000	145.000	124.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	161.000	134.000	113.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	150.000	124.000	107.000
20	Kalimantan Barat	OH	140.000	118.000	102.000
21	Kalimantan Tengah	OH	129.000	107.000	91.000
22	Kalimantan Selatan	OH	140.000	118.000	102.000
23	Kalimantan Timur	OH	161.000	134.000	113.000
24	Kalimantan Utara	OH	161.000	134.000	113.000
25	Sulawesi Utara	OH	140.000	118.000	102.000
26	Sulawesi Tengah	OH	140.000	118.000	102.000
27	Sulawesi Selatan	OH	161.000	134.000	113.000
28	Sulawesi Tenggara	OH	140.000	118.000	102.000
29	Gorontalo	OH	140.000	118.000	102.000
30	Sulawesi Barat	OH	129.000	107.000	91.000
31	Maluku	OH	129.000	107.000	91.000
32	Maluku Utara	OH	140.000	118.000	102.000
33	Papua Barat	OH	172.000	145.000	124.000
34	Papua	OH	214.000	182.000	150.000

Lampiran 6. Perkiraan Rate Transpor di Daerah Tahun Anggaran 2015

No.	Provinsi	Satuan	Rata-rata Transpor Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rata-rata Transpor dari kabupaten/kota ke kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Aceh	O-P	349.000	97.000
02	Sumatera Utara	O-P	785.000	117.000
03	Sumatera Barat	O-P	124.000	231.000
04	Riau	O-P	294.000	288.000
05	Jambi	O-P	218.000	179.000
06	Sumatera Selatan	O-P	187.000	130.000
07	Bengkulu	O-P	199.000	112.000
08	Lampung	O-P	138.000	115.000
09	Kep. Bangka Belitung	O-P	314.000	103.000
10	Kepulauan Riau	O-P	1.181.000	297.000
11	DKI Jakarta	O-P	225.000	177.000
12	Jawa Barat	O-P	120.000	69.000
13	Jawa Tengah	O-P	144.000	84.000
14	DI. Yogyakarta	O-P	96.000	97.000
15	Jawa Timur	O-P	127.000	96.000
16	Banten	O-P	161.000	88.000
17	Bali	O-P	137.000	78.000
18	Nusa Tenggara Barat	O-P	517.000	177.000
19	Nusa Tenggara Timur	O-P	2.059.000	291.000
20	Kalimantan Barat	O-P	468.000	329.000
21	Kalimantan Tengah	O-P	363.000	446.000
22	Kalimantan Selatan	O-P	284.000	199.000
23	Kalimantan Timur	O-P	782.000	630.000
24	Kalimantan Utara	O-P	915.000	1.643.000
25	Sulawesi Utara	O-P	268.000	133.000
26	Sulawesi Tengah	O-P	399.000	180.000
27	Sulawesi Selatan	O-P	221.000	134.000
28	Sulawesi Tenggara	O-P	377.000	194.000
29	Gorontalo	O-P	148.000	118.000
30	Sulawesi Barat	O-P	347.000	231.000
31	Maluku	O-P	2.143.000	1.160.000
32	Maluku Utara	O-P	990.000	585.000
33	Papua Barat	O-P	3.647.000	4.250.000
34	Papua	O-P	6.001.000	4.305.000

Lampiran 7. Perkiraan Rate Uang Saku dan Akomodasi Konsumsi Pelatihan Petugas Tahun Anggaran 2015

No	Provinsi	Satuan	Uang saku	Paket Meeting Pelatihan Petugas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	O-H	107.000	488.000
2	Sumatera Utara	O-H	118.000	405.000
3	Sumatera Barat	O-H	107.000	392.000
4	Riau	O-H	107.000	379.000
5	Jambi	O-H	118.000	410.000
6	Sumatera Selatan	O-H	107.000	460.000
7	Bengkulu	O-H	118.000	529.000
8	Lampung	O-H	118.000	480.000
9	Kep. Bangka Belitung	O-H	118.000	450.000
10	Kep. Riau	O-H	118.000	465.000
11	DKI Jakarta	O-H	161.000	473.000
12	Jawa Barat	O-H	134.000	528.000
13	Jawa Tengah	O-H	118.000	405.000
14	DI. Yogyakarta	O-H	124.000	405.000
15	Jawa Timur	O-H	124.000	408.000
16	Banten	O-H	107.000	491.000
17	Bali	O-H	145.000	749.000
18	Nusa Tenggara Barat	O-H	134.000	485.000
19	Nusa Tenggara Timur	O-H	124.000	390.000
20	Kalimantan Barat	O-H	118.000	419.000
21	Kalimantan Tengah	O-H	107.000	432.000
22	Kalimantan Selatan	O-H	118.000	570.000
23	Kalimantan Timur	O-H	134.000	462.000
24	Kalimantan Utara	O-H	134.000	462.000
25	Sulawesi Utara	O-H	118.000	499.000
26	Sulawesi Tengah	O-H	118.000	413.000
27	Sulawesi Selatan	O-H	134.000	619.000
28	Sulawesi Tenggara	O-H	118.000	413.000
29	Gorontalo	O-H	118.000	566.000
30	Sulawesi Barat	O-H	107.000	349.000
31	Maluku	O-H	107.000	423.000
32	Maluku Utara	O-H	118.000	402.000
33	Papua Barat	O-H	145.000	413.000
34	Papua	O-H	182.000	561.000

Lampiran 8. Perkiraan Biaya Pengiriman Dokumen

No.	Provinsi	Satuan	Dari Pusat ke Provinsi	Dari Provinsi ke Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Aceh	kg	34.000	19.000
02	Sumatera Utara	kg	29.000	24.000
03	Sumatera Barat	kg	27.000	24.000
04	Riau	kg	25.000	26.000
05	Jambi	kg	24.000	16.000
06	Sumatera Selatan	kg	25.000	13.000
07	Bengkulu	kg	24.000	21.000
08	Lampung	kg	22.000	20.000
09	Kep. Bangka Belitung	kg	25.000	22.000
10	Kepulauan Riau	kg	38.000	32.000
11	DKI Jakarta	kg	14.000	14.000
12	Jawa Barat	kg	22.000	16.000
13	Jawa Tengah	kg	22.000	16.000
14	DI. Yogyakarta	kg	22.000	19.000
15	Jawa Timur	kg	22.000	17.000
16	Banten	kg	19.000	11.000
17	Bali	kg	24.000	6.000
18	Nusa Tenggara Barat	kg	27.000	21.000
19	Nusa Tenggara Timur	kg	52.000	15.000
20	Kalimantan Barat	kg	27.000	16.000
21	Kalimantan Tengah	kg	29.000	29.000
22	Kalimantan Selatan	kg	33.000	11.000
23	Kalimantan Timur	kg	42.000	22.000
24	Kalimantan Utara	kg	42.000	20.000
25	Sulawesi Utara	kg	47.000	37.000
26	Sulawesi Tengah	kg	67.000	12.000
27	Sulawesi Selatan	kg	36.000	22.000
28	Sulawesi Tenggara	kg	45.000	15.000
29	Gorontalo	kg	65.000	11.000
30	Sulawesi Barat	kg	39.000	17.000
31	Maluku	kg	69.000	55.000
32	Maluku Utara	kg	49.000	21.000
33	Papua Barat	kg	107.000	63.000
34	Papua	kg	73.000	60.000

Lampiran 9. Perkiraan Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No.	Provinsi	Satuan	Rapat Biasa	
			Makan	Snack
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Aceh	O-K	49.000	15.000
02	Sumatera Utara	O-K	47.000	13.000
03	Sumatera Barat	O-K	44.000	17.000
04	Riau	O-K	41.000	15.000
05	Jambi	O-K	38.000	18.000
06	Sumatera Selatan	O-K	44.000	18.000
07	Bengkulu	O-K	44.000	17.000
08	Lampung	O-K	41.000	18.000
09	Kep. Bangka Belitung	O-K	41.000	18.000
10	Kepulauan Riau	O-K	40.000	20.000
11	DKI Jakarta	O-K	48.000	18.000
12	Jawa Barat	O-K	45.000	14.000
13	Jawa Tengah	O-K	38.000	13.000
14	DI. Yogyakarta	O-K	37.000	13.000
15	Jawa Timur	O-K	44.000	14.000
16	Banten	O-K	44.000	14.000
17	Bali	O-K	44.000	17.000
18	Nusa Tenggara Barat	O-K	42.000	18.000
19	Nusa Tenggara Timur	O-K	42.000	22.000
20	Kalimantan Barat	O-K	43.000	17.000
21	Kalimantan Tengah	O-K	41.000	14.000
22	Kalimantan Selatan	O-K	45.000	14.000
23	Kalimantan Timur	O-K	43.000	17.000
24	Kalimantan Utara	O-K	43.000	17.000
25	Sulawesi Utara	O-K	44.000	18.000
26	Sulawesi Tengah	O-K	41.000	14.000
27	Sulawesi Selatan	O-K	45.000	14.000
28	Sulawesi Tenggara	O-K	41.000	20.000
29	Gorontalo	O-K	43.000	14.000
30	Sulawesi Barat	O-K	45.000	15.000
31	Maluku	O-K	48.000	20.000
32	Maluku Utara	O-K	55.000	21.000
33	Papua Barat	O-K	55.000	25.000
34	Papua	O-K	61.000	32.000

Lampiran 10. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)

No.	Provinsi	Satuan	Pakaian Dinas Pegawai	Pakaian Seragam Mahasiswa/wi	Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Pakaian Kerja Satpam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Aceh	Stel	493.000	428.000	493.000	1.049.000
02	Sumatera Utara	Stel	535.000	482.000	471.000	996.000
03	Sumatera Barat	Stel	535.000	482.000	535.000	963.000
04	Riau	Stel	535.000	482.000	471.000	1.070.000
05	Jambi	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
06	Sumatera Selatan	Stel	535.000	482.000	471.000	1.070.000
07	Bengkulu	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
08	Lampung	Stel	482.000	407.000	482.000	1.038.000
09	Kep. Bangka Belitung	Stel	535.000	482.000	471.000	1.070.000
10	Kepulauan Riau	Stel	535.000	482.000	471.000	1.006.000
11	DKI Jakarta	Stel	632.000	568.000	632.000	1.284.000
12	Jawa Barat	Stel	428.000	375.000	471.000	835.000
13	Jawa Tengah	Stel	482.000	407.000	386.000	856.000
14	DI. Yogyakarta	Stel	439.000	386.000	375.000	846.000
15	Jawa Timur	Stel	493.000	428.000	418.000	910.000
16	Banten	Stel	461.000	407.000	386.000	856.000
17	Bali	Stel	493.000	428.000	418.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
19	Nusa Tenggara Timur	Stel	589.000	535.000	525.000	1.017.000
20	Kalimantan Barat	Stel	535.000	482.000	535.000	963.000
21	Kalimantan Tengah	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
22	Kalimantan Selatan	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
23	Kalimantan Timur	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
24	Kalimantan Utara	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
25	Sulawesi Utara	Stel	493.000	428.000	535.000	985.000
26	Sulawesi Tengah	Stel	493.000	428.000	418.000	910.000
27	Sulawesi Selatan	Stel	493.000	428.000	418.000	974.000
28	Sulawesi Tenggara	Stel	493.000	428.000	418.000	910.000
29	Gorontalo	Stel	535.000	482.000	471.000	963.000
30	Sulawesi Barat	Stel	493.000	428.000	418.000	910.000
31	Maluku	Stel	589.000	535.000	525.000	1.177.000
32	Maluku Utara	Stel	589.000	535.000	525.000	1.284.000
33	Papua Barat	Stel	664.000	589.000	578.000	1.391.000
34	Papua	Stel	696.000	642.000	632.000	1.498.000

Keterangan:

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

Lampiran 11. Perkiraan Satuan Biaya Sewa Gedung, Biaya Keperluan Perkantoran, dan Biaya Penggantian/Pembelian Inventaris Tahun Anggaran 2015

No.	Provinsi	Sewa Gedung Pertemuan*) (Per hari)	Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Dalam Negeri		Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru (Pgw/th)
			≤ 40 pegawai (Satker/th)	> 40 pegawai (OT)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Aceh	7.276.000	61.632.000	1.541.000	1.680.000
02	Sumatera Utara	11.770.000	60.776.000	1.520.000	1.584.000
03	Sumatera Barat	6.955.000	60.776.000	1.520.000	1.616.000
04	Riau	7.811.000	60.776.000	1.520.000	1.595.000
05	Jambi	7.062.000	60.348.000	1.509.000	1.627.000
06	Sumatera Selatan	9.630.000	60.776.000	1.520.000	1.595.000
07	Bengkulu	7.062.000	60.776.000	1.520.000	1.584.000
08	Lampung	8.560.000	59.920.000	1.498.000	1.595.000
09	Kep. Bangka Belitung	7.811.000	60.348.000	1.509.000	1.563.000
10	Kepulauan Riau	8.239.000	62.488.000	1.563.000	1.573.000
11	DKI Jakarta	18.725.000	61.204.000	1.531.000	1.616.000
12	Jawa Barat	23.102.000	61.204.000	1.531.000	1.584.000
13	Jawa Tengah	11.235.000	61.632.000	1.541.000	1.680.000
14	DI. Yogyakarta	11.235.000	61.204.000	1.531.000	1.670.000
15	Jawa Timur	10.807.000	61.204.000	1.531.000	1.595.000
16	Banten	8.946.000	61.632.000	1.541.000	1.595.000
17	Bali	16.050.000	62.060.000	1.552.000	1.680.000
18	Nusa Tenggara Barat	7.918.000	61.204.000	1.531.000	1.616.000
19	Nusa Tenggara Timur	7.918.000	61.204.000	1.531.000	1.541.000
20	Kalimantan Barat	7.490.000	61.204.000	1.531.000	1.573.000
21	Kalimantan Tengah	8.025.000	60.348.000	1.509.000	1.659.000
22	Kalimantan Selatan	7.490.000	60.776.000	1.520.000	1.584.000
23	Kalimantan Timur	8.239.000	61.204.000	1.531.000	1.563.000
24	Kalimantan Utara	8.239.000	61.204.000	1.531.000	1.563.000
25	Sulawesi Utara	19.688.000	62.916.000	1.573.000	1.552.000
26	Sulawesi Tengah	9.128.000	60.776.000	1.520.000	1.552.000
27	Sulawesi Selatan	11.235.000	61.632.000	1.541.000	1.627.000
28	Sulawesi Tenggara	7.704.000	61.204.000	1.531.000	1.648.000
29	Gorontalo	7.597.000	61.632.000	1.541.000	1.531.000
30	Sulawesi Barat	7.704.000	57.780.000	1.445.000	1.498.000
31	Maluku	8.560.000	65.270.000	1.632.000	1.712.000
32	Maluku Utara	8.560.000	65.270.000	1.632.000	1.766.000
33	Papua Barat	15.708.000	68.480.000	1.712.000	1.873.000
34	Papua	16.050.000	74.900.000	1.873.000	1.980.000

Keterangan:

*) Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

Lampiran 12. Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015

No.	Provinsi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Aeh	m ² /Tahun	168.000	130.000	11.000
02	Sumatera Utara	m ² /Tahun	176.000	131.000	11.000
03	Sumatera Barat	m ² /Tahun	156.000	106.000	11.000
04	R i a u	m ² /Tahun	182.000	136.000	11.000
05	J a m b i	m ² /Tahun	179.000	133.000	11.000
06	Sumatera Selatan	m ² /Tahun	179.000	121.000	11.000
07	B e n g k u l u	m ² /Tahun	160.000	98.000	11.000
08	L a m p u n g	m ² /Tahun	182.000	110.000	11.000
09	Kep. Bangka Belitung	m ² /Tahun	174.000	111.000	11.000
10	Kepulauan Riau	m ² /Tahun	203.000	151.000	11.000
11	DKI Jakarta	m ² /Tahun	175.000	130.000	11.000
12	Jawa Barat	m ² /Tahun	155.000	88.000	11.000
13	Jawa Tengah	m ² /Tahun	152.000	86.000	11.000
14	DI. Yogyakarta	m ² /Tahun	152.000	88.000	11.000
15	Jawa Timur	m ² /Tahun	171.000	127.000	11.000
16	Banten	m ² /Tahun	175.000	125.000	11.000
17	B a l i	m ² /Tahun	175.000	130.000	11.000
18	Nusa Tenggara Barat	m ² /Tahun	191.000	132.000	11.000
19	Nusa Tenggara Timur	m ² /Tahun	177.000	116.000	11.000
20	Kalimantan Barat	m ² /Tahun	176.000	115.000	11.000
21	Kalimantan Tengah	m ² /Tahun	198.000	127.000	11.000
22	Kalimantan Selatan	m ² /Tahun	167.000	115.000	11.000
23	Kalimantan Timur	m ² /Tahun	187.000	176.000	11.000
24	Kalimantan Utara	m ² /Tahun	187.000	176.000	11.000
25	Sulawesi Utara	m ² /Tahun	180.000	103.000	11.000
26	Sulawesi Tengah	m ² /Tahun	190.000	142.000	11.000
27	Sulawesi Selatan	m ² /Tahun	163.000	118.000	11.000
28	Sulawesi Tenggara	m ² /Tahun	168.000	124.000	11.000
29	Gorontalo	m ² /Tahun	165.000	109.000	14.000
30	Sulawesi Barat	m ² /Tahun	186.000	137.000	11.000
31	Maluku	m ² /Tahun	201.000	140.000	14.000
32	Maluku Utara	m ² /Tahun	202.000	135.000	14.000
33	Papua Barat	m ² /Tahun	479.000	356.000	19.000
34	Papua	m ² /Tahun	382.000	218.000	14.000

Lampiran 13. Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Tahun Anggaran 2015 (Unit/Tahun)

No.	Provinsi	Roda Empat Eselon II	Roda Empat Eselon III	Double Gardan	Roda Dua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Aceh	40.222.000	35.096.000	37.579.000	3.724.000
02	Sumatera Utara	39.826.000	34.786.000	37.162.000	3.692.000
03	Sumatera Barat	40.147.000	35.043.000	37.525.000	3.756.000
04	Riau	39.826.000	34.775.000	37.172.000	3.649.000
05	Jambi	40.168.000	35.054.000	37.525.000	3.713.000
06	Sumatera Selatan	39.815.000	34.775.000	37.140.000	3.649.000
07	Bengkulu	39.901.000	34.840.000	37.226.000	3.660.000
08	Lampung	40.254.000	35.118.000	37.622.000	3.735.000
09	Kep. Bangka Belitung	40.104.000	35.000.000	37.450.000	3.703.000
10	Kepulauan Riau	40.029.000	34.925.000	37.397.000	3.649.000
11	DKI Jakarta	40.222.000	35.032.000	37.632.000	3.671.000
12	Jawa Barat	39.976.000	34.850.000	37.354.000	3.606.000
13	Jawa Tengah	41.099.000	35.781.000	38.595.000	3.863.000
14	DI. Yogyakarta	40.949.000	35.653.000	38.413.000	3.831.000
15	Jawa Timur	40.211.000	35.064.000	37.590.000	3.692.000
16	Banten	40.051.000	34.915.000	37.440.000	3.628.000
17	Bali	41.345.000	36.027.000	38.820.000	3.992.000
18	Nusa Tenggara Barat	40.575.000	35.417.000	37.975.000	3.820.000
19	Nusa Tenggara Timur	39.933.000	34.893.000	37.258.000	3.692.000
20	Kalimantan Barat	40.511.000	35.738.000	37.846.000	3.820.000
21	Kalimantan Tengah	41.581.000	36.680.000	39.013.000	4.077.000
22	Kalimantan Selatan	40.650.000	35.867.000	38.007.000	3.852.000
23	Kalimantan Timur	40.361.000	35.631.000	37.675.000	3.778.000
24	Kalimantan Utara	40.361.000	35.631.000	37.675.000	3.778.000
25	Sulawesi Utara	40.286.000	35.546.000	37.611.000	3.788.000
26	Sulawesi Tengah	40.372.000	35.653.000	37.675.000	3.820.000
27	Sulawesi Selatan	40.607.000	35.407.000	38.050.000	3.756.000
28	Sulawesi Tenggara	41.399.000	36.530.000	38.799.000	4.024.000
29	Gorontalo	40.051.000	35.364.000	37.333.000	3.767.000
30	Sulawesi Barat	39.237.000	34.305.000	36.520.000	3.489.000
31	Maluku	40.382.000	35.685.000	37.664.000	3.895.000
32	Maluku Utara	40.254.000	35.557.000	37.525.000	3.885.000
33	Papua Barat	40.650.000	35.920.000	37.943.000	3.992.000
34	Papua	40.693.000	35.963.000	37.975.000	4.099.000

**Lampiran 14. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat
Tahun Anggaran 2015**

No	Provinsi	Satuan	Operasional Pejabat	Pick Up	Minibus	Double Gardan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Aceh	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
02	Sumatera Utara	Unit	414.572.000	207.570.000	305.592.000	469.623.000
03	Sumatera Barat	Unit	414.572.000	207.570.000	305.592.000	469.623.000
04	Riau	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
05	Jambi	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
06	Sumatera Selatan	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
07	Bengkulu	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
08	Lampung	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
09	Kep. Bangka Belitung	Unit	408.954.000	205.654.000	304.469.000	468.500.000
10	Kepulauan Riau	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
11	DKI Jakarta	Unit	406.707.000	201.011.000	294.357.000	459.512.000
12	Jawa Barat	Unit	406.707.000	201.011.000	294.357.000	459.512.000
13	Jawa Tengah	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
14	DI. Yogyakarta	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
15	Jawa Timur	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
16	Banten	Unit	406.707.000	201.011.000	294.357.000	459.512.000
17	Bali	Unit	414.572.000	207.570.000	305.592.000	469.623.000
18	Nusa Tenggara Barat	Unit	414.572.000	207.570.000	305.592.000	469.623.000
19	Nusa Tenggara Timur	Unit	414.572.000	207.570.000	305.592.000	469.623.000
20	Kalimantan Barat	Unit	415.695.000	218.280.000	339.297.000	488.723.000
21	Kalimantan Tengah	Unit	417.942.000	222.250.000	341.544.000	490.970.000
22	Kalimantan Selatan	Unit	415.695.000	218.280.000	339.297.000	488.723.000
23	Kalimantan Timur	Unit	415.695.000	218.280.000	339.297.000	488.723.000
24	Kalimantan Utara	Unit	415.695.000	218.280.000	339.297.000	488.723.000
25	Sulawesi Utara	Unit	415.695.000	218.280.000	339.297.000	488.723.000
26	Sulawesi Tengah	Unit	417.942.000	222.250.000	341.544.000	490.970.000
27	Sulawesi Selatan	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
28	Sulawesi Tenggara	Unit	417.942.000	222.250.000	341.544.000	490.970.000
29	Gorontalo	Unit	417.942.000	222.250.000	341.544.000	490.970.000
30	Sulawesi Barat	Unit	407.831.000	202.584.000	299.975.000	465.129.000
31	Maluku	Unit	422.436.000	229.173.000	350.532.000	499.958.000
32	Maluku Utara	Unit	422.436.000	229.173.000	350.532.000	499.958.000
33	Papua Barat	Unit	424.683.000	232.126.000	352.779.000	502.205.000
34	Papua	Unit	426.930.000	237.262.000	355.026.000	504.452.000

**Lampiran 15. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional
Pejabat Tahun Anggaran 2015**

No.	Provinsi	Satuan	Operasional Kantor	Lapangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Aceh	Unit	20.116.000	33.170.000
02	Sumatera Utara	Unit	20.448.000	35.310.000
03	Sumatera Barat	Unit	20.448.000	35.310.000
04	Riau	Unit	20.116.000	33.170.000
05	Jambi	Unit	20.116.000	33.170.000
06	Sumatera Selatan	Unit	20.116.000	33.170.000
07	Bengkulu	Unit	20.116.000	33.170.000
08	Lampung	Unit	20.116.000	33.170.000
09	Kep. Bangka Belitung	Unit	20.116.000	33.170.000
10	Kepulauan Riau	Unit	19.528.000	32.100.000
11	DKI Jakarta	Unit	19.057.000	31.030.000
12	Jawa Barat	Unit	19.057.000	31.030.000
13	Jawa Tengah	Unit	19.528.000	32.100.000
14	DI. Yogyakarta	Unit	19.528.000	32.100.000
15	Jawa Timur	Unit	19.528.000	32.100.000
16	Banten	Unit	19.057.000	31.030.000
17	Bali	Unit	20.448.000	35.310.000
18	Nusa Tenggara Barat	Unit	20.448.000	35.310.000
19	Nusa Tenggara Timur	Unit	20.448.000	35.310.000
20	Kalimantan Barat	Unit	21.047.000	36.380.000
21	Kalimantan Tengah	Unit	21.861.000	37.450.000
22	Kalimantan Selatan	Unit	21.047.000	36.380.000
23	Kalimantan Timur	Unit	21.047.000	36.380.000
24	Kalimantan Utara	Unit	21.047.000	36.380.000
25	Sulawesi Utara	Unit	21.047.000	36.380.000
26	Gorontalo	Unit	21.861.000	37.450.000
27	Sulawesi Barat	Unit	19.528.000	32.100.000
28	Sulawesi Selatan	Unit	19.528.000	32.100.000
29	Sulawesi Tengah	Unit	21.861.000	37.450.000
30	Sulawesi Tenggara	Unit	21.861.000	37.450.000
31	Maluku	Unit	22.139.000	38.520.000
32	Maluku Utara	Unit	22.139.000	38.520.000
33	Papua Barat	Unit	22.524.000	39.590.000
34	Papua	Unit	23.359.000	41.730.000

Lampiran 16. Perkiraan Penggantian Inventaris Lama, Biaya Jasa Kebersihan, Satpam dan Pengemudi Tahun Anggaran 2015

No	Provinsi	Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru (Pegawai/Tahun)	Biaya jasa kebersihan/ cleaning service (O-B)	Biaya jasa pengemudi (O-B)	Biaya satuan pengamanan/ satpam (O-B)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.680.000	1.852.000	2.033.000	2.033.000
2	Sumatera Utara	1.584.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
3	Sumatera Barat	1.595.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
4	Riau	1.573.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
5	Jambi	1.627.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
6	Sumatera Selatan	1.616.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
7	Bengkulu	1.595.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
8	Lampung	1.595.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
9	Kep. Bangka Belitung	1.584.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
10	Kep. Riau	1.563.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
11	DKI Jakarta	1.595.000	2.633.000	2.900.000	2.900.000
12	Jawa Barat	1.584.000	2.504.000	2.761.000	2.761.000
13	Jawa Tengah	1.616.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
14	DI. Yogyakarta	1.680.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
15	Jawa Timur	1.670.000	2.076.000	2.290.000	2.290.000
16	Banten	1.595.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
17	Bali	1.680.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.616.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.541.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
20	Kalimantan Barat	1.573.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
21	Kalimantan Tengah	1.659.000	1.862.000	2.044.000	2.044.000
22	Kalimantan Selatan	1.584.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
23	Kalimantan Timur	1.563.000	2.098.000	2.301.000	2.301.000
24	Kalimantan Utara	1.563.000	2.098.000	2.301.000	2.301.000
25	Sulawesi Utara	1.552.000	1.862.000	2.044.000	2.044.000
26	Sulawesi Tengah	1.531.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
27	Sulawesi Selatan	1.498.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
28	Sulawesi Tenggara	1.627.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
29	Gorontalo	1.552.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
30	Sulawesi Barat	1.648.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
31	Maluku	1.712.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
32	Maluku Utara	1.766.000	1.819.000	1.926.000	1.926.000
33	Papua Barat	1.873.000	2.066.000	2.269.000	2.269.000
34	Papua	1.980.000	2.055.000	2.258.000	2.258.000

Lampiran 17. Perkiraan Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2015

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. COMPUTER SUPPLIES		
	A. CONTINUOUS FORM NCR		
1	Continuous Form 1 ply Uk. 9 ½ Sinar Dunia	Box	155.000
2	Continuous Form 2 ply Uk. 9 ½ Sinar Dunia	Box	207.000
3	Continuous Form 3 ply Uk. 9 ½ Sinar Dunia	Box	310.000
4	Continuous Form 1 ply Uk. 14 7/8 Sinar Dunia	Box	235.000
5	Continuous Form 2 ply Uk. 14 7/8 Sinar Dunia	Box	315.000
	B. TINTA PRINTER		
1	Ink Jet HP 51645AA Black	Buah	281.000
2	Ink Jet HP C6578DA	Buah	315.000
3	Ink Jet HP C 6656 AA Black	Buah	201.000
4	Ink Jet HP C 6657 AA Colour	Buah	287.000
5	Ink Jet HP C 8727AA Black	Buah	195.000
6	Ink Jet HP C 8728 Colour	Buah	241.000
7	Ink Jet HP 21 (C 9351 AA)	Buah	155.000
8	Ink Jet HP 22 (C 9352 AA)	Buah	167.000
9	Tinta HP Deskjet 960 C Colour 45BK	Buah	281.000
10	Tinta HP Deskjet 960 C Black 78 C01	Buah	315.000
11	Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Cyan	Buah	126.000
12	Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Yellow	Buah	126.000
13	Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Magenta	Buah	126.000
14	Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Black	Buah	126.000
15	Ink Jet Canon PIXMA PGI - 5 Black	Buah	126.000
16	Ink Jet Cartridge T. 0491 Black Epson	Buah	126.000
17	Ink Jet Cartridge T. 0492 Cyan Epson	Buah	126.000
18	Ink Jet Cartridge T. 0493 Magenta Epson	Buah	126.000
19	Ink Jet Cartridge T. 0494 Yellow Epson	Buah	126.000
20	Ink Jet Cartridge T. 0495 Light Cyan Epson	Buah	126.000
21	Ink Jet Cartridge T. 0496 Light Magenta Epson	Buah	126.000
22	Ink Jet Epson T.0540	Buah	69.000
23	Ink Jet Epson T.0541	Buah	133.000
24	Ink Jet Epson T.0542	Buah	133.000
25	Ink Jet Epson T.0543	Buah	133.000
26	Ink Jet Epson T.0544	Buah	133.000
27	Ink Jet Epson T.0547	Buah	133.000
28	Ink Jet Epson T.0548	Buah	133.000
29	Ink Jet Epson T.0549	Buah	133.000
30	Ink Jet Epson T 6641 Hitam	Buah	69.000
31	Ink Jet Epson T 6642 Biru	Buah	69.000
32	Ink Jet Epson T 6643 Merah	Buah	69.000
33	Ink Jet Epson T 6644 Kuning	Buah	69.000
34	Tinta Duplo Ink 514K Black	Buah	247.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Roll Master Duplo DR-835	Buah	962.000
	C. TONER LASER		
1	Toner Laser HP Q 7553A	Buah	888.000
2	Toner Laser Jet HP Q 7551 A/51 A	Buah	1.300.000
3	Toner Laser Jet HP 1200 (C7115A)	Buah	756.000
4	Toner Laser Jet HP C4092A	Buah	687.000
5	Toner HP 1320 (Q 5949A)	Buah	871.000
6	Toner HP Q 2610 A	Buah	1.512.000
7	Toner HP Q 2612 A/1010	Buah	716.000
8	Toner HP Q 2613 A	Buah	911.000
9	Toner HP Q 6000 A	Buah	831.000
10	Toner HP Q 6001 A	Buah	865.000
11	Toner HP Q 6002 A	Buah	865.000
12	Toner HP Q 6003 A	Buah	865.000
13	Toner CE 5055a (HP 2055D)	Buah	939.000
14	Toner Printer Laserjet HPP 4515 X (HP CC364A)	Buah	1.718.000
15	Toner Xerox CT 2000856 Black C4350	Buah	2.926.000
16	Toner Xerox CT 2000857 Cyan C4350	Buah	3.492.000
17	Toner Xerox CT 2000858 Magenta C4350	Buah	3.492.000
18	Toner Xerox CT 2000859 Yellow C4350	Buah	3.492.000
19	Toner Fuji Xerox P6360 Black 18 K	Buah	2.565.000
20	Toner Fuji Xerox P6360 Cyan 12 K	Buah	4.191.000
21	Toner Fuji Xerox P6360 Magenta 12 K	Buah	4.191.000
22	Toner Fuji Xerox P6360 Yellow 12 K	Buah	4.191.000
23	Toner Fuji Xerox 3428 4K	Buah	1.289.000
24	Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Black	Buah	722.000
25	Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Magenta	Buah	2.033.000
26	Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Cyan	Buah	2.033.000
27	Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Yellow	Buah	2.033.000
28	Toner Fuji Xerox C3290FS Black 8K	Buah	1.809.000
29	Toner Fuji Xerox C3290FS Cyan 6K	Buah	1.998.000
30	Toner Fuji Xerox C3290FS Magenta 6K	Buah	1.998.000
31	Toner Fuji Xerox C3290FS Yellow 6K	Buah	1.998.000
32	Drum Fuji Xerox CT200856	Buah	2.977.000
33	Drum Cartridge C 3055	Buah	3.183.000
34	Toner Fax Panasonic KX-FA 76 A	Buah	310.000
35	Drum Faximile Panasonic KX-FA 78	Buah	2.238.000
	D. ALAT PENYIMPAN DATA		
1	CD-R Sony 52X (tanpa casing)	Buah	3.000
2	CD-R Verbatim 52X (tanpa casing)	Buah	4.000
3	CD-R GT-PRO Plus 56X	Buah	3.000
4	CD-R Ink Jet Printable 700 MB Maxell	Buah	3.000
5	CD RW Sony	Buah	14.000
6	DVD-R Sony	Buah	3.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Mini DVD-RW Sony 60	Buah	53.000
8	Kaset mini DV Sony 60	Buah	29.000
9	Flash Disk 4 GB Kingston	Buah	69.000
10	Flash Disk 8 GB Kingston	Buah	86.000
	E. PRINTER RIBBON DAN BAHAN LAINNYA		
1	Ribbon Epson LQ 2170 (SO 15086)	Roll	114.000
2	Ribbon Epson LX 300	Roll	35.000
3	Manesman Taly MJ 691 Hologram	Buah	287.000
	II. BAHAN CETAK		
	A. C H E M I C A L/ALAT PEREKAT		
1	Lem Stick UHU uk. 9 gram	Buah	7.000
2	Lem Putih INDRAKOL (1 galon = 4,5 Kg) KW1	Paket	121.000
3	Cellotape ukuran Besar Panfix	Kaleng	90.000
4	Cellotape ukuran 1" Lion	Buah	14.000
5	Double Tape uk. 2" Daimaru	Buah	10.000
6	Plakband Plastik uk. 2" X 90 yard Daimaru	Roll	11.000
7	Plakband Linnen uk 2" X 90 yard Daimaru	Roll	12.000
	B. PLATE & FILM		
1	Master Risograph RZ 370 A3	Roll	844.000
2	Master Risograph RN B4	Roll	529.000
3	Master Risograph RA/GR B4	Roll	529.000
	C. TINTA CETAK		
1	Tinta Risograph RZ (1 Tube = 1.000 ml)	Tube	353.000
	D. PEMOTONG/CUTTER		
1	Mata Pisau Cutter Kecil A100 Joyko	Tube	2.000
2	Mata Pisau Cutter Besar L150 Joyko	Tube	4.000
3	Pisau Cutter Kecil A300 Joyko	Buah	4.000
4	Pisau Cutter Besar L500 Joyko	Buah	9.000
5	Pengasah Pensil Angel	Buah	42.000
6	Pisau Lipat kecil	Lusin	5.000
	III. ALAT-ALAT TULIS KANTOR		
	A. KERTAS H V S		
1	Pembungkus Ceasing SAMSON 90 X 120/ 80 gr	Rim	33.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kertas NCR TOP berbagai warna putih Double Folio	Rim	36.000
3	Karton Kartotik Uk. 79 X 109/ Plano 200 gr warna putih	Lembar	36.000
4	Paper Faximile 210 X 30 Merk Fak	Buah	41.000
5	Kertas Stiker A4 Cromo	Lembar	70.000
6	Kertas bergaris DF	Rim	25.000
	B. BERBAGAI KERTAS		
1	Pembungkus Ceasing SAMSON 90 X 120/ 80 gr	Rim	571.000
2	Kertas NCR TOP berbagai warna putih Double Folio	Rim	83.000
3	Karton Kartotik Uk. 79 X 109/ Plano 200 gr warna putih	Lembar	3.000
4	Paper Faximile 210 X 30 Merk Fak	Buah	17.000
5	Kertas Stiker A4 Cromo	Rim	3.000
6	Kertas bergaris DF	Rim	35.000
	C. KERTAS COVER		
1	Cover Kunsdruk 100 gram Plano	Lembar	2.000
2	Cover Kunsdruk 150 gram Plano ukuran 79x109 (Merk Pindo Deli)	Lembar	2.000
3	Cover Kunsdruk 210 gram Plano ukuran 79x109 (Merk Chiwi)	Lembar	3.000
4	Cover Kunsdruk 260 gram Plano ukuran 79x100 (Merk Pindo Deli)	Lembar	4.000
5	Cover Manila Plano berbagai warna	Lembar	3.000
	D. BUKU TULIS		
1	Buku Tulis Register Folio 100 lembar	Buah	13.000
2	Buku Tulis Register Kwarto 100 lembar	Buah	8.000
3	Buku Tulis Expedisi	Buah	8.000
4	Buku Surat Keluar Masuk Folio 100 lembar	Buah	15.000
5	Blok Note Folio	Buah	6.000
	E. AMPLOP		
1	Amplop Dinas Putih 90 Jaya (1 Dus = 100 Pcs)	Dus	19.000
2	Amplop Coklat uk. 24 x 35 Samson (1 Dus = 100 Pcs)	Dus	38.000
	F. TRANSPARANT SHEET		
1	Transparant Sheet	Lembar	3.000
2	Plastik Laminating Panas merk Toho uk. Folio (100 lembar)	Pak	115.000
	G. PENJEPIT KERTAS		
1	Hechmachine No. 3 MAX	Buah	47.000
2	Hechmachine No.10 MAX	Buah	12.000
3	Hechmachine MAX HD-12L	Buah	974.000
4	Hecnechces No.3 MAX (20 kotak)	Dus	75.000
5	Hecnechces No.10 MAX (20 kotak)	Dus	33.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Hecnechces MAX HD-12L	Kotak	17.000
7	Binder Clips No. 107 Joyko (Isi 12 Pcs)	Kotak	2.000
8	Binder Clips No. 111 Joyko (Isi 12 Pcs)	Kotak	3.000
9	Binder Clips No. 200 Joyko (Isi 12 Pcs)	Kotak	8.000
10	Trigonal Paper Clips No. 3 Joyco (10 kotak)	Dus	10.000
11	Paper clip warna	Dus	4.000
	H. PENGHAPUS		
1	Karet Penghapus Pensil Kecil Staedtler	Buah	2.000
2	Penghapus White Board Atary	Buah	6.000
3	Tip Ex Liquid (Re-Type + Thinner)	Set	7.000
	I. ORDNER & MAP		
1	Ordner Map Folio Bantex	Buah	19.000
2	File Box Plastik Bindex	Buah	17.000
3	Stop Map Folio Diamond (isi 50)	Pak	75.000
4	Map Bertali	Lusin	29.000
5	Map Snelhecter Folio Diamond (isi 50)	Pak	69.000
6	Map Plastik	Lusin	14.000
7	Aco Snelhecter	Pak	7.000
8	Clip Board	Buah	5.000
	J. PENGGARIS		
1	Penggaris 30 cm Plastik Butterfly	Buah	2.000
2	Penggaris 30 cm Besi	Buah	5.000
3	Penggaris 50 cm Plastik Butterfly	Buah	11.000
4	Penggaris 50 cm Besi	Buah	12.000
	K. ALAT TULIS		
1	Pensil Hitam 2B Staedtler	Lusin	33.000
2	Spidol Hitam 70 Artline	Lusin	75.000
3	Spidol White Board 500 Artline	Lusin	98.000
4	Ballpoint Merk Faster	Lusin	26.000
5	Ballpoint Balliner	Lusin	149.000
6	Ballpoint Boxi	Lusin	81.000
7	Ballpoint BIC 4 Warna	Buah	10.000
8	Stabillo Boss	Buah	7.000
9	Stabillo Pen 76 Medium/Fine	Buah	8.000
	L. ALAT TULIS KANTOR LAINNYA		
1	Perpurator uk. Kecil No. 30	Buah	10.000
2	Perpurator uk. Besar No. 85	Buah	37.000
3	Numerator Machine Great Wall 8 digit	Buah	121.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Post It mark & Note	Pak	9.000
5	Post It Flag	Pak	19.000
6	Stiker CD	Pak	15.000
	M. TINTA STEMPEL		
1	Tinta Stempel uk. kecil (50 cc)	Botol	9.000
2	Tinta Numerator LION 30 cc	Tube	33.000
3	Bak Stempel No. 1 Artline	Buah	30.000
	N. PITA MESIN TIK		
1	Pita Mesin Canon AP 01 Fullmark	Roll	31.000
2	Pita Mesin Canon AP 12/250/AP.1500 Fullmark	Roll	54.000
3	Pita Mesin Tik Manual Merk Swallow	Pcs	17.000
4	Pita Mesin Tik Elektrik Brother	Pcs	41.000
	O. ALAT PENGIKAT		
1	Straping Band (8 Kg) Merk 3Band	Roll	92.000
2	Tali Plastik (1 Kg) Merk Surya	Roll	18.000
	P. BATU BATERAI		
1	Batu Baterai ukuran AAA Alkaline ABC (1 set = 2 buah)	Set	8.000
2	Batu Baterai ukuran AA Alkaline Energizer (1 set = 2 buah)	Set	9.000
3	Batu Baterai ukuran A/UM1 ABC Biru	Buah	5.000
4	Batu Baterai Kotak 9 Volt Energizer	Buah	21.000
	IV. ALAT RUMAH TANGGA KANTOR		
	A. SAPU DAN SIKAT		
1	Alat pel 404 Nagata	Buah	52.000
2	Sikat Kecil Nagata	Buah	6.000
3	Sikat WC Nagata Pakai tempat	Buah	17.000
4	Sikat Lantai Bartangkai (50 cm) Nagata 833	Buah	29.000
5	Sapu Lantai Nagata	Buah	29.000
6	Karet dorong Nagata	Buah	32.000
	B. ALAT PEMBERSIH/LAP		
1	Keset kamar mandi (Ukuran 60 x 90 cm) karet	Buah	35.000
2	Serbet	Buah	5.000
3	Kain Pel Biru	Buah	6.000
4	Tissu Gulung Halus Tessa TOT-04	Roll	6.000
5	Tissu Kotak Tessa 300 lembar	Kotak	14.000
6	Tissu Gulung Kasar Nice	Roll	3.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Tempat sampah Nagata 968	Buah	21.000
8	Pengki Plastik Nagata 160	Buah	21.000
9	Single Bucket/ Ember pemeras 20 Lt merk Clarts	Buah	21.000
	C. PERABOT KANTOR LAINNYA		
1	Kamper Bulat Kelereng Bagus 300 Gr W-3601 White	Bungkus	17.000
2	Gunting Rumput Ken Master	Buah	110.000
3	Ember 6 GL Lion Star Tanpa Tutup	Buah	43.000
4	Gayung Plastik Lion Star Polos GL-3	Buah	6.000
	Gunting Kenko (SC-843N)	Buah	12.000
	B. PERALATAN LEDENG		
1	Kran Air Wastafel Putar Biasa SAN EI	Buah	195.000
2	Kran Air Wastafel Engkel SAN EI	Buah	287.000
3	Kran Air Wastafel Baling Nanas SAN EI	Buah	272.000
4	Kran Tembok Wasser	Buah	138.000
5	Kran Shower Cabang Tangkai Baling Wasser	Buah	224.000
6	Kran Shower Cabang Tangkai Nanas Wasser	Buah	224.000
7	Kran Angsa Tangkai Baling Wasser	Buah	248.000
8	Kran Angsa Tangkai Nanas Wasser	Buah	255.000
9	Kran Taman Wasser	Buah	161.000
10	Kran Fleksibel Puter Wasser	Buah	126.000
	F. ALAT-ALAT LISTRIK / TELEPON		
1	Kabel Telephon 4 x 0,625 mm (500 m Supreme)	Roll	1.128.000
2	Kabel Speaker 2 x 120	Roll	172.000
3	Kabel NYM 4 x 2,5 (50 m)	Roll	647.000
4	Kabel NYM 3 x 2,5 (50 m)	Roll	499.000
5	Kabel Roll Yunion	Roll	52.000
6	Lampu PL 9 Watt Philips	Buah	19.000
7	Lampu PLC 13 Watt Phillips	Buah	27.000
8	Lampu TL 10 Watt Philips	Buah	8.000
9	Lampu TL 15 Watt Philips	Buah	10.000
10	Lampu TL 18 Watt Osram Lumilux	Buah	12.000
11	Lampu TL 20 Watt Bulat Philips	Buah	29.000
12	Lampu TL 36 Watt Bulat Philips	Buah	15.000
13	Lampu TL Ring 32 Watt Phillips	Buah	34.000
14	Box TL 20 Watt Komplit Simbad Philips	Set	95.000
16	Lampu SL 23 Watt Philips	Buah	38.000
17	Lampu T5 14 Watt Philips	Buah	69.000
18	Lampu T5 28 Watt Philips	Buah	101.000
19	Lampu Philips PL-C 18W/840/2P	Buah	25.000
20	Lampu HPIT (400W)	Buah	189.000
21	Lampu Halogen 20 Watt / 12 V Phillips	Buah	9.000

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
22	Kaki TL	Set	5.000
23	Ignitor HPIT sisi Phillips	Buah	41.000
24	Capasitor HPIT	Buah	35.000
25	Fitting HPIT	Buah	23.000
26	Fitting PLC	Buah	7.000
27	Fitting SL	Buah	9.000
28	Stop Kontak In Blok Engkel Panasonic	Buah	16.000
29	Kontaktor LC.ID.09	Buah	149.000
30	Kontaktor LC.ID.12	Buah	172.000
31	Kontaktor LC.ID.18	Buah	224.000
32	Saklar Engkel Merk Berker	Buah	11.000
33	Saklar Double Merk Berker	Buah	19.000
34	Saklar 2 titik	Buah	29.000
35	Saklar 4 titik	Buah	61.000
36	Saklar 6 titik	Buah	67.000
37	Saklar 8 titik	Buah	167.000
38	Balast 20 watt	Buah	33.000
39	Balast 40 watt	Buah	36.000
40	Balast PLC 9 Watt	Buah	29.000
41	Balast PLC 18 Watt	Buah	35.000
42	Balast Halogen 20 Watt	Buah	38.000
43	Balast HPIT (400W)	Buah	212.000
44	Stecker Arde Broco	Buah	9.000
45	Stater S10/TL 40 W/220 V	Buah	5.000
46	Stater S2	Buah	5.000

Lampiran 18. Contoh TOR Tahun 2015

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN : Badan Pusat Statistik (BPS)
 UNIT ESELON I : Sekretaris Utama
 PROGRAM : DMPTTL (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya)
 HASIL :
 1. Meningkatkan kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
 UNIT ESELON II/ SATKER : Biro Bina Program
 KEGIATAN : Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran
 INDIKATOR KINERJA :
 KEGIATAN :
 1. Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang
 2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB

SATUAN UKUR : Dokumen/Laporan
 JENIS KELUARAN : Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan BPS Provinsi/Laporan Monitoring Rencana Penggunaan Anggaran
 VOLUME : 1 (satu) Dokumen/Laporan

I. PENDAHULUAN

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada pendekatan anggaran terpadu (*unifiedbudget*), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Bagian Penyusunan Rencana sebagai unit perencanaan di BPS, sangat penting untuk menilai dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Untuk itu, Survei Kinerja ini penting untuk dilakukan di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota terpilih, yang dikaitkan dengan program-program kegiatan BPS. Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan dan proses penganggaran, diharapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- 7) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
- 8) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2013

II. RENCANA AKTIVITAS TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka kegiatan penyusunan, pengembangan dan evaluasi program dan anggaran pada tahun 2013 akan diselenggarakan berbagai aktivitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh tiga bagian di Biro Bina Program. Berikut adalah rincian aktivitas beserta unit kerja pelaksanaannya :

Tabel 14. Daftar Aktivitas dan Unit Kerja Pelaksana

	Aktivitas	Unit Kerja Pelaksana	Status aktivitas
1.	Survei Evaluasi Kinerja	Bagian Penyusunan Rencana	Rutin

2.2. Survei Kinerja

2.1.1. Gambaran Umum

Alasan Umum:

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pemerintah menjadi pilihan strategis. Bagian Penyusunan Rencana sebagai unit perencanaan di BPS, sangat penting untuk menilai dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Untuk itu, Survei Kinerja ini penting untuk dilakukan di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota terpilih, yang dikaitkan dengan program-program kegiatan BPS. Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan dan proses penganggaran, diharapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Alasan Penambahan/Pengurangan Cakupan/Sampel/Peserta (Untuk Kegiatan Lanjutan):

-

Cakupan Wilayah:

Pekerjaan survei kinerja dilakukan di seluruh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel. Responden merupakan Pegawai di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

Cakupan Komoditi/Penimbang:

-

Tabel 1. Kinerja					
Kinerja	Tahun	Periode	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah Laporan/Publikasi	2010	2010-2011	1	1	100

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional:

-

2.1.2. Maksud dan Tujuan

1. Untuk menghitung besarnya alokasi tunjangan kinerja tiap pegawai (per individu)
2. Untuk menilai beban kerja pegawai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.1.3 Keluaran

Laporan Hasil Survei Kinerja

2.1.4. Penerima Manfaat

Badan Pusat Statistik

2.1.5. Strategi Pencapaian

Metoda Pelaksanaan

Metode pelaksanaan ini adalah swakelola

Metodologi/ Tahapan Pelaksanaan

a. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei di BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota

b. Metodologi Pengambilan Sampel dan Estimasi

Metodologi penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak

Tahapan Pelaksanaan

i. Perencanaan/ Persiapan

- Perencanaan dan persiapan meliputi penyusunan metodologi dan rancangan kuesioner.
- Pelatihan Intama/Innas/petugas pengumpulan data

ii. Pelaksanaan

- Pengumpulan data di pusat dan daerah.

iii. Pengolahan

- Pengolahan dan penyusunan laporan hasil survei.

iv. Laporan/ Diseminasi

- Memberikan Laporan Penyusunan Kinerja dan Grade
- Menghasilkan analisis kinerja BPS Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota Tahun 2015

2.1.6. Waktu Pelaksanaan

Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan												
Pencetakan kuesioner dan buku pedoman survei kinerja												
Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
Pengadaan komputer supplies												

Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Pengadaan bahan dan atk di BPS Provinsi												
Pengadaan bahan dan atk di BPS Kabupaten/Kota												
Pengadaan komputer supplies di daerah												
Perlengkapan Innas ((33 + 7) innas + 2 Intama)												
Perlengkapan petugas ((20 petugas+2 panitia) x 33)												
Konsumsi rapat di luar jam kerja dalam rangka Survei Kinerja BPS Tahun 2014												
Honor Intama (4 hari x 8 jam x 2 orang)												
Honor Innas (4 hari x 8 jam x 40 orang)												
Penyelenggaraan pelatihan petugas di Kabupaten/Kota (3 hari penyelenggaraan):												
- Akomodasi dan konsumsi pelatihan petugas selama 3 hari (3 hari x 22 orang x 33 kab/kota)												
- Transport petugas dalam pelatihan petugas di kabupaten (20 orang x 33 kabupaten/kota)												
- Transport panitia dalam rangka pelatihan di kabupaten (2 orang x 33 kabupaten/kota)												
- Uang saku panitia pelatihan petugas (3 hari x 2 orang x 33 kab/kota)												
- Uang saku petugas dalam rangka pelatihan (3 hari x 20 orang x 33 kab/kota)												
Uang Saku rapat di kantor di luar jam kerja dalam rangka Survei Kinerja BPS Tahun 2014												

Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Konsinyering pembahasan metodologi survei kinerja di Jakarta (3 hari penyelenggaraan):												
- Fullboard Pembahasan metodologi survei kinerja (11 orang x 3 hari)												
- Transpor pembahasan metodologi survei kinerja di jakarta (11 orang)												
- Uang saku Pembahasan metodologi survei kinerja (3 hari x 11 orang)												
Penyelenggaraan pelatihan calon Innas di Jakarta:												
- Penyelenggaraan pelatihan calon innas di Jakarta (4 hari x (33 + 17) orang)												
- Uang saku/harian peserta pelatihan calon innas (Dalam Kota =4 hari x (32+18) orang)												
- Transport pelatihan calon Innas (Luar Kota = 32 orang)												
- Uang harian peserta luar kota (32 orang x 2 hari)												
- Uang penginapan peserta luar kota (32 orang)												
Pengiriman Innas mengajar ke daerah (7 Orang)												
Pelaksanaan												
Honor Penanggung jawab												
Honor ketua												
Honor wakil ketua												
Honor anggota												

Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Upah pengolahan hasil survei kinerja												
Biaya pencacahan survei kinerja												
Biaya pemeriksaan dokumen survei di kabupaten/kota												
Biaya pemeriksaan dokumen survei di provinsi												
Biaya operasional survei kinerja												
Pengiriman dokumen dari BPS Provinsi ke Kabuapten/Kota												
Biaya operasional BPS Provinsi												
Biaya operasional BPS Kabupaten/Kota												
Pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja di Jakarta selama 4 hari kalender (3 hr penyelenggaraan) sebanyak 11:												
- Paket fulboard dalam kota (11 orang x 3 hari)												
- Uang saku pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja selama 4 hari kalender di Jakarta (11 orang x 3 hari)												
- Transport pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja (Full Board Dalam Kota)												
Supervisi												
Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke kecamatan												
Pengawasan pelaksanaan kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota												
Pelaporan/ Diseminasi												
Penggandaan laporan survei kinerja												

Aktivitas	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Pengiriman dokumen & Publikasi survei kinerja ke survei kinerja ke BPS Provinsi												

2.1.6. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran harus dicapai pada tahun 2015 dan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya

III. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Seluruh kegiatan ini membutuhkan biaya sebagaimana Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penanggung Jawab

ttd

Arie Sukarya, M.Comm
NIP.19570831 198103 1 002

Lampiran 19. Contoh RAB Tahun 2015

Akun Belanja/Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jadwal
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
SURVEI KINERJA					
Persiapan					
520000 Belanja Barang dan Jasa				2.642.499.000	
521211 Belanja Bahan					
Pencetakan kuesioner dan buku pedoman survei kinerja	315.346	Lembar	750	236.510.000	April
Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak	1	Paket	7.000.000	7.000.000	Januari-Desember
Pengadaan komputer supplies	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Januari-Desember
Pengadaan bahan dan atk di BPS Provinsi	33	Paket	1.500.000	49.500.000	Januari-Desember
Pengadaan bahan dan atk di BPS Kabupaten/Kota	250	Paket	500.000	125.000.000	Januari-Desember
Pengadaan komputer supplies di daerah	33	Paket	1.000.000	33.000.000	Januari-Desember
Perlengkapan innas ((33 + 7) innas + 2 Intama)	42	Paket	214.000	8.988.000	April
Perlengkapan petugas ((20 petugas+2 panitia) x 33)	726	Paket	129.000	93.654.000	Juni
Konsumsi rapat di luar jam kerja dalam rangka Survei Kinerja BPS Tahun 2014	20	O-K	66.000	1.320.000	Februari
521213 Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan					
Honor Intama (4 hari x 8 jam x 2 orang)	32	O-J	95.000	3.040.000	Mei
Honor Innas (4 hari x 8 jam x 40 orang)	640	O-J	83.000	53.120.000	Juni
521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya					
Uang Saku rapat di luar jam kerja dalam rangka Survei Kinerja BPS Tahun 2014	20	O-H	275.000	5.500.000	Februari
524111 Belanja Perjalanan Biasa					
Pengiriman Innas mengajar ke daerah (7 Orang)	7	O-P	6.278.714	43.951.000	Juni
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
Konsinyering pembahasan metodologi survei kinerja di Jakarta (3 hari penyelenggaraan):					
- Fullboard Pembahasan metodologi survei kinerja (11 orang x 3 hari)	33	O-H	675.000	22.275.000	Maret
- Transpor pembahasan metodologi survei kinerja di Jakarta (11 orang)	11	O-P	120.000	1.320.000	Maret
- Uang saku Pembahasan metodologi survei kinerja (3 hari x 11 orang)	33	OH	161.000	5.313.000	Maret
Penyelenggaraan pelatihan petugas di Kabupaten/Kota (3 hari penyelenggaraan):					
- Akomodasi dan konsumsi pelatihan petugas selama 3 hari kalender (3 hari x 22 orang x 33 kab/kota)	1.980	O-H	398.212	788.460.000	Juni
- Transport petugas dalam pelatihan petugas di kabupaten (20 orang x 33 kabupaten/kota)	660	O-P	721.485	476.180.000	Juni
- Transport panitia dalam rangka pelatihan di kabupaten (2 orang x 33 kabupaten/kota)	66	O-P	476.394	31.442.000	
- Uang saku panitia pelatihan petugas (3 hari x 2 orang x 33 kab/kota)	198	O-H	122.697	24.294.000	
- Uang saku petugas dalam rangka pelatihan (3 hari x 20 orang x 33 kab/kota)	1.980	O-H	122.697	242.940.000	Juni

Akun Belanja/Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jadwal
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
Penyelenggaraan pelatihan calon innas (4 hari penyelenggaraan di Jakarta, 32 peserta luar kota, 18 peserta dalam kota):					
- Penyelenggaraan pelatihan calon innas di Jakarta (4 hari x (32 + 18) orang)	200	O-H	675.000	135.000.000	Mei
- Transport antar wilayah pelatihan calon innas (32+18 orang)	50	O-P	3.071.120	153.556.000	Mei
- Uang harian peserta luar kota (32 orang x 2 hari)	64	O-P	430.750	27.568.000	Mei
- Uang saku/harian peserta pelatihan calon innas (4 hari x (32+18) orang)	200	O-H	181.480	36.296.000	Mei
- Uang penginapan peserta luar kota (32 orang)	32	O-H	696.000	22.272.000	Mei
Pelaksanaan					
520000 Belanja Barang dan Jasa				947.246.000	
521213 Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan					
Honor Penanggung jawab	12	O-B	749.000	8.988.000	Januari-Desember
Honor ketua	12	O-B	696.000	8.352.000	Januari - Desember
Honor wakil ketua	12	O-B	642.000	7.704.000	Januari-Desember
Honor anggota	12	O-B	535.000	6.420.000	Januari-Desember
Upah pengolahan hasil survei kinerja	6.930	Dok	8.000	55.440.000	Agustus
521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya					
Biaya pencacahan survei kinerja	6.930	Responden	24.822	172.017.000	Juli
Biaya pemeriksaan dokumen survei di kabupaten/kota	6.930	Dok	5.233	36.265.000	Juli
Biaya pemeriksaan dokumen survei di provinsi	6.930	Dok	3.837	26.591.000	Juli
Biaya operasional survei kinerja	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Januari-Desember
Pengiriman dokumen dari BPS Provinsi ke Kabuapten/Kota	2.500	Kg	4.800	13.960.000	September
Biaya operasional BPS Provinsi	33	Paket	2.000.000	66.000.000	Januari-Desember
Biaya operasional BPS Kabupaten/Kota	250	Paket	1.000.000	250.000.000	Januari-Desember
524111 Belanja Perjalanan Biasa					
Supervisi	4	O-P	6.666.500	26.666.000	Juni-Agustus
Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke kecamatan	33	Kunjungan	476.394	15.721.000	Juli
Pengawasan pelaksanaan kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota	99	O-P	2.113.273	209.214.000	Juli
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
Pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja di Jakarta selama 3 hari sebanyak 11:					
- Paket <i>fullboard</i> dalam kota (11 orang x 3 hari)	33	O-H	675.000	22.275.000	Oktober
- Uang saku pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja selama 3 hari di Jakarta (11 orang x 3 hari)	33	O-H	161.000	5.313.000	Oktober
- Transport pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja (<i>FullBoard</i> Dalam Kota)	11	O-K	120.000	1.320.000	Oktober

Akun Belanja/Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jadwal
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Pelaporan/Diseminasi					
520000 Belanja Barang dan Jasa				233.000.000	
521211 Belanja Bahan					
Penggandaan laporan survei kinerja	207.000	Lembar	750	155.250.000	November
521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya					
Pengiriman dokumen & Publikasi survei kinerja ke BPS Provinsi	3.000	Kg	25.917	77.750.000	April
530000 Belanja Modal					
Total Belanja				3.822.745.000	

Lampiran 20. Pendukung RAB Alokasi Sampel Survei Kinerja

Provinsi/Kabupaten/Kota	Kantor BPS	Responden
(1)	(2)	(3)
Prop. Aceh	1	30
1101 Simeulue		
1102 Aceh Singkil	1	15
1103 Aceh Selatan	1	15
1104 Aceh Tenggara		
1105 Aceh Timur	1	15
1106 Aceh Tengah	1	15
1107 Aceh Barat		
1108 Aceh Besar	1	15
1109 Pidie	1	15
1110 Bireuen		
1111 Aceh Utara	1	15
1112 Aceh Barat Daya	1	15
1113 Gayo Lues		
1114 Aceh Tamiang		
1115 Nagan Raya	1	15
1116 Aceh Jaya	1	15
1117 Bener Meriah		
1118 Kab. Pidie Jaya		
1171 Banda Aceh	1	15
1172 Sabang	1	15
Jumlah	13	210

Demikian seterusnya sampai seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang diambil sampel teralokasi

Lampiran 21. Supervisi

No	Provinsi	Tarif PP (Standar Garuda)			Uang Harian			Tarif Hotel Pejabat Eselon III/Golongan IV			Biaya Supervisi
		Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	-	5.525.000	-	-	386.000	-	-	1.156.000	-	-
2	Sumatera Utara	-	5.074.000	-	-	396.000	-	-	753.000	-	-
3	Sumatera Barat	1	3.954.000	3.954.000	3	407.000	1.221.000	2	946.000	1.892.000	7.067.000
4	Riau	-	3.846.000	-	-	396.000	-	-	771.000	-	-
5	Jambi	-	3.212.000	-	-	396.000	-	-	746.000	-	-
6	Sumatera Selatan	-	3.067.000	-	-	407.000	-	-	645.000	-	-
7	Bengkulu	-	3.434.000	-	-	407.000	-	-	762.000	-	-
8	Lampung	-	2.386.000	-	-	407.000	-	-	824.000	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	2.859.000	-	-	439.000	-	-	910.000	-	-
10	Kep. Riau	-	4.079.000	-	-	396.000	-	-	696.000	-	-
11	DKI Jakarta	-	132.000	-	-	568.000	-	-	696.000	-	-
12	Jawa Barat	1	473.000	473.000	3	461.000	1.383.000	2	1.016.000	2.032.000	3.888.000
13	Jawa Tengah	-	2.885.000	-	-	396.000	-	-	803.000	-	-
14	DI. Yogyakarta	-	3.076.000	-	-	450.000	-	-	717.000	-	-
15	Jawa Timur	-	3.641.000	-	-	439.000	-	-	900.000	-	-
16	Banten	-	473.000	-	-	396.000	-	-	1.096.000	-	-
17	Bali	-	4.218.000	-	-	514.000	-	-	1.306.000	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	4.396.000	-	-	471.000	-	-	789.000	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	6.122.000	-	-	461.000	-	-	749.000	-	-
20	Kalimantan Barat	-	3.669.000	-	-	407.000	-	-	865.000	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	3.833.000	-	-	386.000	-	-	988.000	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	3.882.000	3.882.000	3	407.000	1.221.000	2	874.000	1.748.000	6.851.000
23	Kalimantan Timur	-	5.328.000	-	-	461.000	-	-	874.000	-	-
24	Kalimantan Utara	-	5.328.000	-	-	461.000	-	-	874.000	-	-
25	Sulawesi Utara	-	6.229.000	-	-	396.000	-	-	685.000	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	6.131.000	-	-	396.000	-	-	821.000	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	4.868.000	-	-	461.000	-	-	913.000	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	5.263.000	-	-	407.000	-	-	859.000	-	-
29	Gorontalo	-	5.934.000	-	-	396.000	-	-	974.000	-	-
30	Sulawesi Barat	1	6.206.000	6.206.000	3	439.000	1.317.000	2	974.000	1.948.000	9.471.000
31	Maluku	-	8.540.000	-	-	407.000	-	-	728.000	-	-
32	Maluku Utara	-	8.088.000	-	-	461.000	-	-	642.000	-	-
33	Papua Barat	-	12.567.000	-	-	514.000	-	-	963.000	-	-
34	Papua	-	10.166.000	-	-	621.000	-	-	771.000	-	-
Total		4		14.515.000	12		5.142.000	8		7.620.000	27.277.000

Lampiran 22. Pemanggilan Calon Innas

No	Provinsi	Tarif PP (Standar Garuda)			Uang Harian Peserta Pelatihan Calon Innas			Uang Saku Peserta Pelatihan Calon Innas			Total Biaya Peserta Pelatihan Calon Innas	Biaya Penginapan peserta luar kota (Bintang 3)		
		Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai		Volume	Harga Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	1	5.525.000	5.525.000	2	386.000	772.000	4	193.000	772.000	7.069.000	1	696.000	696.000
2	Sumatera Utara	1	5.074.000	5.074.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	6.638.000	1	696.000	696.000
3	Sumatera Barat	1	3.954.000	3.954.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	5.540.000	1	696.000	696.000
4	Riau	1	3.846.000	3.846.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	5.410.000	1	696.000	696.000
5	Jambi	1	3.212.000	3.212.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	4.776.000	1	696.000	696.000
6	Sumatera Selatan	1	3.067.000	3.067.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	4.653.000	1	696.000	696.000
7	Bengkulu	1	3.434.000	3.434.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	5.020.000	1	696.000	696.000
8	Lampung	1	2.386.000	2.386.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	3.972.000	1	696.000	696.000
9	Kep. Bangka Belitung	1	2.859.000	2.859.000	2	439.000	878.000	4	193.000	772.000	4.509.000	1	696.000	696.000
10	Kep. Riau	1	4.079.000	4.079.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	5.643.000	1	696.000	696.000
11	DKI Jakarta	1	132.000	132.000	-	568.000	-	4	161.000	644.000	776.000	0	696.000	-
12	Jawa Barat	1	473.000	473.000	2	461.000	922.000	4	193.000	772.000	2.167.000	1	696.000	696.000
13	Jawa Tengah	1	2.885.000	2.885.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	4.449.000	1	696.000	696.000
14	DI. Yogyakarta	1	3.076.000	3.076.000	2	450.000	900.000	4	193.000	772.000	4.748.000	1	696.000	696.000
15	Jawa Timur	1	3.641.000	3.641.000	2	439.000	878.000	4	193.000	772.000	5.291.000	1	696.000	696.000
16	Banten	1	473.000	473.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	2.037.000	1	696.000	696.000
17	Bali	1	4.218.000	4.218.000	2	514.000	1.028.000	4	193.000	772.000	6.018.000	1	696.000	696.000
18	Nusa Tenggara Barat	1	4.396.000	4.396.000	2	471.000	942.000	4	193.000	772.000	6.110.000	1	696.000	696.000
19	Nusa Tenggara Timur	1	6.122.000	6.122.000	2	461.000	922.000	4	193.000	772.000	7.816.000	1	696.000	696.000
20	Kalimantan Barat	1	3.669.000	3.669.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	5.255.000	1	696.000	696.000
21	Kalimantan Tengah	1	3.833.000	3.833.000	2	386.000	772.000	4	193.000	772.000	5.377.000	1	696.000	696.000
22	Kalimantan Selatan	1	3.882.000	3.882.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	5.468.000	1	696.000	696.000
23	Kalimantan Timur	1	5.328.000	5.328.000	2	461.000	922.000	4	193.000	772.000	7.022.000	1	696.000	696.000
24	Kalimantan Utara		5.328.000	-	-	461.000	-	-	193.000	-	-	0	696.000	-
25	Sulawesi Utara	1	6.229.000	6.229.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	7.793.000	1	696.000	696.000
26	Sulawesi Tengah	1	6.131.000	6.131.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	7.695.000	1	696.000	696.000
27	Sulawesi Selatan	1	4.868.000	4.868.000	2	461.000	922.000	4	193.000	772.000	6.562.000	1	696.000	696.000
28	Sulawesi Tenggara	1	5.263.000	5.263.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	6.849.000	1	696.000	696.000
29	Gorontalo	1	5.934.000	5.934.000	2	396.000	792.000	4	193.000	772.000	7.498.000	1	696.000	696.000
30	Sulawesi Barat	1	6.206.000	6.206.000	2	439.000	878.000	4	193.000	772.000	7.856.000	1	696.000	696.000
31	Maluku	1	8.540.000	8.540.000	2	407.000	814.000	4	193.000	772.000	10.126.000	1	696.000	696.000
32	Maluku Utara	1	8.088.000	8.088.000	2	461.000	922.000	4	193.000	772.000	9.782.000	1	696.000	696.000
33	Papua Barat	1	12.567.000	12.567.000	2	514.000	1.028.000	4	193.000	772.000	14.367.000	1	696.000	696.000
34	Papua	1	10.166.000	10.166.000	2	621.000	1.242.000	4	193.000	772.000	12.180.000	1	696.000	696.000
	Pusat	17	-	-	-	568.000	-	68	161.000	10.948.000	10.948.000			
Total		50		153.556.000	64		27.568.000	200		36.296.000	217.420.000	32		2.272.000

Lampiran 23. Pengiriman Innas Mengajar ke Daerah

No	Provinsi	Tarif PP (Standar Garuda)			Uang Harian			Biaya Pengiriman Innas Mengajar ke Daerah
		Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	-	5.525.000	-	-	386.000	-	-
2	Sumatera Utara	-	5.074.000	-	-	396.000	-	-
3	Sumatera Barat	1	3.954.000	3.954.000	2	407.000	814.000	4.768.000
4	Riau	-	3.846.000	-	-	396.000	-	-
5	Jambi	-	3.212.000	-	-	396.000	-	-
6	Sumatera Selatan	-	3.067.000	-	-	407.000	-	-
7	Bengkulu	-	3.434.000	-	-	407.000	-	-
8	Lampung	-	2.386.000	-	-	407.000	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	2.859.000	-	-	439.000	-	-
10	Kep. Riau	-	4.079.000	-	-	396.000	-	-
11	DKI Jakarta	-	132.000	-	-	568.000	-	-
12	Jawa Barat	1	473.000	473.000	2	461.000	922.000	1.395.000
13	Jawa Tengah	-	2.885.000	-	-	396.000	-	-
14	DI. Yogyakarta	-	3.076.000	-	-	450.000	-	-
15	Jawa Timur	-	3.641.000	-	-	439.000	-	-
16	Banten	-	473.000	-	-	396.000	-	-
17	Bali	1	4.218.000	4.218.000	2	514.000	1.028.000	5.246.000
18	Nusa Tenggara Barat	-	4.396.000	-	-	471.000	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	6.122.000	-	-	461.000	-	-
20	Kalimantan Barat	-	3.669.000	-	-	407.000	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	3.833.000	-	-	386.000	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	3.882.000	3.882.000	2	407.000	814.000	4.696.000
23	Kalimantan Timur	-	5.328.000	-	-	461.000	-	-
24	Kalimantan Utara	-	5.328.000	-	-	461.000	-	-
25	Sulawesi Utara	-	6.229.000	-	-	396.000	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	6.131.000	-	-	396.000	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	4.868.000	-	-	461.000	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	5.263.000	-	-	407.000	-	-
29	Gorontalo	-	5.934.000	-	-	396.000	-	-
30	Sulawesi Barat	1	6.206.000	6.206.000	2	439.000	878.000	7.084.000
31	Maluku	1	8.540.000	8.540.000	2	407.000	814.000	9.354.000
32	Maluku Utara	-	8.088.000	-	-	461.000	-	-
33	Papua Barat	-	12.567.000	-	-	514.000	-	-
34	Papua	1	10.166.000	10.166.000	2	621.000	1.242.000	11.408.000
Total		7		37,439,000	14		6,512,000	43,951,000

Lampiran 24. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Transport (PP) per Orang-Perjalanan (Rp)			Uang Harian			Pejabat Eselon III/Golongan IV			Biaya Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota
		Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	Volume	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	3	349.000	1.047.000	6	386.000	2.316.000	3	439.000	1.317.000	4.680.000
2	Sumatera Utara	3	785.000	2.355.000	6	396.000	2.376.000	3	503.000	1.509.000	6.240.000
3	Sumatera Barat	3	124.000	372.000	6	407.000	2.442.000	3	493.000	1.479.000	4.293.000
4	Riau	3	294.000	882.000	6	396.000	2.376.000	3	482.000	1.446.000	4.704.000
5	Jambi	3	218.000	654.000	6	396.000	2.376.000	3	396.000	1.188.000	4.218.000
6	Sumatera Selatan	3	187.000	561.000	6	407.000	2.442.000	3	550.000	1.650.000	4.653.000
7	Bengkulu	3	199.000	597.000	6	407.000	2.442.000	3	641.000	1.923.000	4.962.000
8	Lampung	3	138.000	414.000	6	407.000	2.442.000	3	401.000	1.203.000	4.059.000
9	Kep. Bangka Belitung	3	314.000	942.000	6	439.000	2.634.000	3	571.000	1.713.000	5.289.000
10	Kep. Riau	3	1.181.000	3.543.000	6	396.000	2.376.000	3	407.000	1.221.000	7.140.000
11	DKI Jakarta	3	225.000	675.000	6	568.000	3.408.000	3	653.000	1.959.000	6.042.000
12	Jawa Barat	3	116.000	348.000	6	461.000	2.766.000	3	532.000	1.596.000	4.710.000
13	Jawa Tengah	3	144.000	432.000	6	396.000	2.376.000	3	482.000	1.446.000	4.254.000
14	DI. Yogyakarta	3	96.000	288.000	6	450.000	2.700.000	3	565.000	1.695.000	4.683.000
15	Jawa Timur	3	127.000	381.000	6	439.000	2.634.000	3	519.000	1.557.000	4.572.000
16	Banten	3	161.000	483.000	6	396.000	2.376.000	3	595.000	1.785.000	4.644.000
17	Bali	3	137.000	411.000	6	514.000	3.084.000	3	968.000	2.904.000	6.399.000
18	Nusa Tenggara Barat	3	517.000	1.551.000	6	471.000	2.826.000	3	578.000	1.734.000	6.111.000
19	Nusa Tenggara Timur	3	2.059.000	6.177.000	6	461.000	2.766.000	3	589.000	1.767.000	10.710.000
20	Kalimantan Barat	3	468.000	1.404.000	6	407.000	2.442.000	3	461.000	1.383.000	5.229.000
21	Kalimantan Tengah	3	363.000	1.089.000	6	386.000	2.316.000	3	498.000	1.494.000	4.899.000
22	Kalimantan Selatan	3	284.000	852.000	6	407.000	2.442.000	3	535.000	1.605.000	4.899.000
23	Kalimantan Timur	3	782.000	2.346.000	6	461.000	2.766.000	3	589.000	1.767.000	6.879.000
24	Kalimantan Utara		782.000			461.000			589.000		-
25	Sulawesi Utara	3	268.000	804.000	6	396.000	2.376.000	3	535.000	1.605.000	4.785.000
26	Sulawesi Tengah	3	399.000	1.197.000	6	396.000	2.376.000	3	428.000	1.284.000	4.857.000
27	Sulawesi Selatan	3	221.000	663.000	6	461.000	2.766.000	3	577.000	1.731.000	5.160.000
28	Sulawesi Tenggara	3	377.000	1.131.000	6	407.000	2.442.000	3	482.000	1.446.000	5.019.000
29	Gorontalo	3	148.000	444.000	6	396.000	2.376.000	3	439.000	1.317.000	4.137.000
30	Sulawesi Barat	3	347.000	1.041.000	6	439.000	2.634.000	3	428.000	1.284.000	4.959.000
31	Maluku	3	2.143.000	6.429.000	6	407.000	2.442.000	3	518.000	1.554.000	10.425.000
32	Maluku Utara	3	990.000	2.970.000	6	461.000	2.766.000	3	450.000	1.350.000	7.086.000
33	Papua Barat	3	3.647.000	10.941.000	6	514.000	3.084.000	3	428.000	1.284.000	15.309.000
34	Papua	3	6.001.000	18.003.000	6	621.000	3.726.000	3	493.000	1.479.000	23.208.000
Total		99		71.427.000	198		86.112.000	99		51.675.000	209.214.000

Lampiran 25. Pelatihan Survei Kinerja

No	Provinsi	Transport (PP) per O-P (Rp)			Transport (PP) panitia			Uang saku panitia pelatihan			Uang Saku peserta			Paket Meeting Pelatihan Petugas			Total Biaya
		Vol	Harga Satuan	Nilai	Vol	Harga Satuan	Nilai	Vol	Harga Satuan	Nilai	Vol	Harga Satuan	Nilai	Vol	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	20	349.000	6.980.000	2	97.000	194.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	418.000	32.208.000	46.444.000
2	Sumut	20	785.000	15.700.000	2	117.000	234.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	347.000	26.730.000	50.452.000
3	Sumbang	20	124.000	2.480.000	2	231.000	462.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	336.000	25.872.000	35.876.000
4	Riau	20	294.000	5.880.000	2	288.000	576.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	325.000	25.014.000	38.532.000
5	Jambi	20	218.000	4.360.000	2	179.000	358.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	351.000	27.060.000	39.566.000
6	Sumsel	20	187.000	3.740.000	2	130.000	260.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	395.000	30.360.000	41.422.000
7	Bengkulu	20	199.000	3.980.000	2	112.000	224.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	453.000	34.914.000	46.906.000
8	Lampung	20	138.000	2.760.000	2	115.000	230.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	411.000	31.680.000	42.458.000
9	Babel	20	314.000	6.280.000	2	103.000	206.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	386.000	29.700.000	43.974.000
10	Kep. Riau	20	1.181.000	23.620.000	2	297.000	594.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	399.000	30.690.000	62.692.000
11	DKI Jakarta	20	225.000	4.500.000	2	177.000	354.000	6	161.000	966.000	60	161.000	9.660.000	66	405.000	31.218.000	46.698.000
12	Jawa Barat	20	116.000	2.320.000	2	70.000	140.000	6	134.000	804.000	60	134.000	8.040.000	66	452.000	34.848.000	46.152.000
13	Jateng	20	144.000	2.880.000	2	84.000	168.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	347.000	26.730.000	37.566.000
14	DIY	20	96.000	1.920.000	2	97.000	194.000	6	124.000	744.000	60	124.000	7.440.000	66	347.000	26.730.000	37.028.000
15	Jatim	20	127.000	2.540.000	2	96.000	192.000	6	124.000	744.000	60	124.000	7.440.000	66	350.000	26.928.000	37.844.000
16	Banten	20	161.000	3.220.000	2	88.000	176.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	421.000	32.406.000	42.864.000
17	Bali	20	137.000	2.740.000	2	78.000	156.000	6	145.000	870.000	60	145.000	8.700.000	66	642.000	49.434.000	61.900.000
18	NTB	20	517.000	10.340.000	2	177.000	354.000	6	134.000	804.000	60	134.000	8.040.000	66	416.000	32.010.000	51.548.000
19	NTT	20	2.059.000	41.180.000	2	291.000	582.000	6	124.000	744.000	60	124.000	7.440.000	66	335.000	25.740.000	75.686.000
20	Kalbar	20	468.000	9.360.000	2	329.000	658.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	359.000	27.654.000	45.460.000
21	Kalteng	20	363.000	7.260.000	2	446.000	892.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	371.000	28.512.000	43.726.000
22	Kalsel	20	284.000	5.680.000	2	199.000	398.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	488.000	37.620.000	51.486.000
23	Kalim	20	782.000	15.640.000	2	630.000	1.260.000	6	134.000	804.000	60	134.000	8.040.000	66	396.000	30.492.000	56.236.000
24	Kaltara		-			3.684.000						134.000			396.000		-
25	Sulut	20	268.000	5.360.000	2	133.000	266.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	428.000	32.934.000	46.348.000
26	Sulteng	20	399.000	7.980.000	2	180.000	360.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	354.000	27.258.000	43.386.000
27	Sulsel	20	221.000	4.420.000	2	134.000	268.000	6	134.000	804.000	60	134.000	8.040.000	66	530.000	40.854.000	54.386.000
28	Sultra	20	377.000	7.540.000	2	194.000	388.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	354.000	27.258.000	42.974.000
29	Gorontalo	20	148.000	2.960.000	2	118.000	236.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	485.000	37.356.000	48.340.000
30	Sulbar	20	347.000	6.940.000	2	231.000	462.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	299.000	23.034.000	37.498.000
31	Maluku	20	2.143.000	42.860.000	2	1.160.000	2.320.000	6	107.000	642.000	60	107.000	6.420.000	66	362.000	27.918.000	80.160.000
32	Malut	20	990.000	19.800.000	2	585.000	1.170.000	6	118.000	708.000	60	118.000	7.080.000	66	344.000	26.532.000	55.290.000
33	Papbar	20	3.647.000	72.940.000	2	4.250.000	8.500.000	6	145.000	870.000	60	145.000	8.700.000	66	354.000	27.258.000	118.268.000
34	Papua	20	6.001.000	120.020.000	2	4.305.000	8.610.000	6	182.000	1.092.000	60	182.000	10.920.000	66	481.000	37.026.000	177.668.000
Total		660		476.180.000	66		31.442.000	198		24.294.000	1.980		242.980.000	2.178		1.011.978.000	1.786.834.000

Lampiran 26. Pengiriman Dokumen dan Publikasi Survei Kinerja ke Daerah

No	Provinsi	Tarif per Kg			Biaya Pengiriman Dokumen dari BPS Pusat ke BPS Provinsi	Tarif per Kg			Biaya Pengiriman Dokumen dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota
		Volume	Harga Satuan	Nilai		Volume	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	100	25.000	2.500.000	2.500.000	75	7.500	562.500	562.500
2	Sumatera Utara	100	18.500	1.850.000	1.850.000	75	7.000	525.000	525.000
3	Sumatera Barat	100	18.000	1.800.000	1.800.000	75	4.500	337.500	337.500
4	Riau	100	18.000	1.800.000	1.800.000	75	6.000	450.000	450.000
5	Jambi	100	20.000	2.000.000	2.000.000	75	5.000	375.000	375.000
6	Sumatera Selatan	100	18.000	1.800.000	1.800.000	75	3.500	262.500	262.500
7	Bengkulu	100	19.000	1.900.000	1.900.000	75	4.500	337.500	337.500
8	Lampung	100	17.000	1.700.000	1.700.000	75	3.500	262.500	262.500
9	Kep. Bangka Belitung	50	19.000	950.000	950.000	75	3.500	262.500	262.500
10	Kep. Riau	50	21.000	1.050.000	1.050.000	75	6.000	450.000	450.000
11	DKI Jakarta	50	9.000	450.000	450.000	75	1.500	112.500	112.500
12	Jawa Barat	100	13.000	1.300.000	1.300.000	75	1.500	112.500	112.500
13	Jawa Tengah	100	16.000	1.600.000	1.600.000	100	2.500	250.000	250.000
14	DI. Yogyakarta	100	16.000	1.600.000	1.600.000	75	2.000	150.000	150.000
15	Jawa Timur	100	16.000	1.600.000	1.600.000	75	3.000	225.000	225.000
16	Banten	50	14.000	700.000	700.000	75	1.500	112.500	112.500
17	Bali	50	17.000	850.000	850.000	75	5.500	412.500	412.500
18	Nusa Tenggara Barat	100	18.000	1.800.000	1.800.000	75	6.500	487.500	487.500
19	Nusa Tenggara Timur	100	34.000	3.400.000	3.400.000	75	8.000	600.000	600.000
20	Kalimantan Barat	100	18.000	1.800.000	1.800.000	75	5.500	412.500	412.500
21	Kalimantan Tengah	100	26.000	2.600.000	2.600.000	75	5.500	412.500	412.500
22	Kalimantan Selatan	100	19.000	1.900.000	1.900.000	75	5.000	375.000	375.000
23	Kalimantan Timur	100	22.000	2.200.000	2.200.000	75	8.500	637.500	637.500
24	Kalimantan Utara		22.000		-		8.500		-
25	Sulawesi Utara	100	28.500	2.850.000	2.850.000	75	7.000	525.000	525.000
26	Sulawesi Tengah	100	31.000	3.100.000	3.100.000	75	7.000	525.000	525.000
27	Sulawesi Selatan	100	22.000	2.200.000	2.200.000	75	5.500	412.500	412.500
28	Sulawesi Tenggara	100	33.500	3.350.000	3.350.000	75	9.000	675.000	675.000
29	Gorontalo	50	37.000	1.850.000	1.850.000	75	7.000	525.000	525.000
30	Sulawesi Barat	100	18.700	1.870.000	1.870.000	75	5.500	412.500	412.500
31	Maluku	100	35.000	3.500.000	3.500.000	75	8.000	600.000	600.000
32	Maluku Utara	100	37.000	3.700.000	3.700.000	75	8.000	600.000	600.000
33	Papua Barat	100	64.000	6.400.000	6.400.000	75	13.000	975.000	975.000
34	Papua	100	53.000	5.300.000	5.300.000	75	13.000	975.000	975.000
Total		3.000		73.270.000	73.270.000	2.500		14.350.000	14.350.000

Lampiran 27. Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan

No	Provinsi	Perjalanan (PP) per Orang-Kunjungan (Rp)			Biaya pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan
		Volume	Harga Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	97.000	97.000	97.000
2	Sumatera Utara	1	117.000	117.000	117.000
3	Sumatera Barat	1	231.000	231.000	231.000
4	R i a u	1	288.000	288.000	288.000
5	J a m b i	1	179.000	179.000	179.000
6	Sumatera Selatan	1	130.000	130.000	130.000
7	B e n g k u l u	1	112.000	112.000	112.000
8	L a m p u n g	1	115.000	115.000	115.000
9	Kep. Bangka Belitung	1	103.000	103.000	103.000
10	Kep. Riau	1	297.000	297.000	297.000
11	DKI Jakarta	1	177.000	177.000	177.000
12	Jawa Barat	1	70.000	70.000	70.000
13	Jawa Tengah	1	84.000	84.000	84.000
14	DI. Yogyakarta	1	97.000	97.000	97.000
15	Jawa Timur	1	96.000	96.000	96.000
16	Banten	1	88.000	88.000	88.000
17	B a l i	1	78.000	78.000	78.000
18	Nusa Tenggara Barat	1	177.000	177.000	177.000
19	Nusa Tenggara Timur	1	291.000	291.000	291.000
20	Kalimantan Barat	1	329.000	329.000	329.000
21	Kalimantan Tengah	1	446.000	446.000	446.000
22	Kalimantan Selatan	1	199.000	199.000	199.000
23	Kalimantan Timur	1	630.000	630.000	630.000
24	Kalimantan Utara		1.643.000		-
25	Sulawesi Utara	1	133.000	133.000	133.000
26	Sulawesi Tengah	1	180.000	180.000	180.000
27	Sulawesi Selatan	1	134.000	134.000	134.000
28	Sulawesi Tenggara	1	194.000	194.000	194.000
29	Gorontalo	1	118.000	118.000	118.000
30	Sulawesi Barat	1	231.000	231.000	231.000
31	M a l u k u	1	1.160.000	1.160.000	1.160.000
32	Maluku Utara	1	585.000	585.000	585.000
33	Papua Barat	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000
34	Papua	1	4.305.000	4.305.000	4.305.000
Total		33		15.721.000	15.721.000

Lampiran 28. Personil

Nama Kegiatan	NIP	Nama	Jabatan	Disiplin Ilmu	Fungsi dalam Kegiatan
Survei Kinerja	10093	Ir. R. Moch. Haryono	Kepala Bagian	Insinyur	Penanggung jawab kegiatan
Survei Kinerja	13344	Sudarmanto, S.ST, M.Si	Kasubag Rencana Teknis	Master Ilmu Pengetahuan	Koordinator
Survei Kinerja	14546	Fatimah, SE, ME	Kasubag Rencana Non Teknis	Magister Ekonomi	Koordinator
Survei Kinerja	13333	Wahyu Indrarto, S.Si	Kasubag Keterpaduan Rencana	Sarjana Statistik	Koordinator
Survei Kinerja	54072	Agusta B. Yusuf, S.ST	Staf	Sarjana Statistik	Pelaksana
Survei Kinerja	13392	Suparman, S.Si	Staf	Sarjana Statistik	Pelaksana
Survei Kinerja	6005	Retno Apriliani, S.ST	Staf	Sarjana Statistik	Pelaksana
Survei Kinerja	17832	Titis Wahyu Setiowati, S.Si	Staf	Sarjana Statistik	Pelaksana
Survei Kinerja	55831	Madya Yogi P., SST	Staf	Sarjana Statistik	Pelaksana
Survei Kinerja	14945	Puji Amrih Handayani, S.Sos	Staf	Sarjana Sosial	Pelaksana
Survei Kinerja	51004	Abu Bukhori, A.Md	Staf	Sarjana Muda Komputasi	Pelaksana
Survei Kinerja	54372	Diah Trijayanti, SE	Staf	Sarjana Ekonomi	Pelaksana
Survei Kinerja	53420	Cornelius, S.S	Staf	Sarjana Sastra	Pelaksana
Survei Kinerja	53447	Putri Indriani, A.Md	Staf	Sarjana Muda Sekretaris	Pelaksana

Lampiran 29. Perkiraan Kebutuhan Anggaran

Tahun Anggaran	Output	Kebutuhan Anggaran
2016	Dokumen Perencanaan	4.099.089.500
2017	Dokumen Perencanaan	4.508.998.450
2018	Dokumen Perencanaan	4.959.898.295
Jumlah		13.567.986.245

Jakarta. November 2013
Pejabat Penanggung Jawab.

Ttd.

(Arie Sukarya. M.Comm)
NIP. 195708311981031002

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> BINAPROGRAM			109.062.000	Bag. Penyusunan Rencana
	1 Pembahasan penyusunan rencana (full board)	30 O-H	600.000	18.000.000	
	2 Uang saku Pembahasan penyusunan rencana (full board)	40 O-H	86.000	3.440.000	
	3 Transport lokal pembahasan penyusunan rencana	10 O-H	110.000	1.100.000	
	4 Pembahasan penyusunan anggaran (full board)	50 O-H	600.000	30.000.000	
	5 Uang saku Pembahasan penyusunan anggaran (full board)	72 O-H	86.000	6.192.000	
	6 Transport lokal pembahasan penyusunan anggaran	21 O-H	110.000	2.310.000	
	7 Pembahasan standar harga dan monitoring serta evaluasi (full board)	70 O-H	600.000	42.000.000	
	8 Uang saku Pembahasan standar harga dan monitoring serta evaluasi (full board)	70 O-H	86.000	6.020.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			229.000.000	Bag. Penyusunan Anggaran
	1 Honor nara sumber setingkat eselon I	60 O-J	1.300.000	78.000.000	
	2 Honor nara sumber setingkat eselon II	50 O-J	900.000	45.000.000	
	3 Honor nara sumber setingkat eselon III	80 O-J	800.000	64.000.000	
	4 Moderator	70 O-J	600.000	42.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			106.980.000	
	5 Perjalanan Pembahasan penyusunan rencana & anggaran	20 OP	3.000.000	60.000.000	
	ilanan dalam rangka Bimbingan Teknis Penganggaran	2 OP	4.900.000	9.800.000	
	ilanan supervisi	5 OP	7.436.000	37.180.000	
Sub Komponen					
B	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (KPPN-019-JAKARTA II)			763.480.000	
Sub Komponen					
521211	<u>Belanja Bahan</u>			61.300.000	Bag. Penyusunan Anggaran
	1 Pengadaan perlengkapan peserta penyusunan anggaran BPS	121 SET	300.000	36.300.000	
	2 Penggandaan Dokumen Anggaran	100.000 LBR	250	25.000.000	
521213	<u>Honor output kegiatan</u>			328.700.000	
	1 Honor penanggungjawab	6 O-B	700.000	4.200.000	
	2 Honor ketua	24 O-B	650.000	15.600.000	
	3 Honor wakil ketua	36 O-B	600.000	21.600.000	
	4 Honor anggota	198 O-B	500.000	99.000.000	
	5 Penyusunan Program/Tabel	1.738 PROG	50.000	86.900.000	
	6 Inventarisasi kegiatan BPS	507 DOK	100.000	50.700.000	
	7 Penyusunan skala prioritas kegiatan BPS	507 DOK	100.000	50.700.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			82.200.000	Bag. Penyusunan Anggaran
	4 Penyusunan perubahan/revisi anggaran	120 O-H	600.000	72.000.000	
	5 Uang saku Konsinyering penyusunan perubahan/revisi anggaran	120 O-H	85.000	10.200.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			42.000.000	Bag. Penyusunan Anggaran
	1 Honor Pembicara	70 O-J	600.000	42.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			249.280.000	Bag. Penyusunan Anggaran
	1 Pemanggilan peserta penyusunan anggaran BPS Pusat dan daerah	40 O-P	6.232.000	249.280.000	

Lampiran 31. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program PPIS, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program PSPA BPS Pusat, Dan Program P2A2 BPS

Menyusun Rekapitulasi RKA

